

**PASAR DAMPIT DALAM PERSPEKTIF
MARKET ATAU *GOVERNMENT*
(Studi pada Pasar Dampit Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

HEDA SWANDANING SARI

NIM. 0810310246



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2012**

MOTTO

Apapun perasaan dan tingkat semangatmu, disiplinkanlah dirimu dalam setidaknya satu kebaikan kecil. Disiplin tidak menjamin keberhasilan, tapi tidak ada keberhasilan tanpa disiplin. Disiplin adalah keteraturan, dan jika kita ingin membangun kekuatan, bangunlah keteraturan

(Mario Teguh)

Hidupitu SEDERHANA, kamu buat pilihan dan tidak menoleh kebelakang.

(Fauzi Ayatulloh)

Kita Hidup jangan sampai mengenal kata MENYERAH, karena Hidup ini penuh dengan PERJUANGAN. Jika kita menanam kebaikan tumbuhnya pasti akan baik juga.

SABAR, IKHLAS, DAN TAWAKAL

Do the BEST, Be the BEST, For the BEST,,,

SEMANGAT, SEMANGAT DAN SEMANGAT

(Heda Swandaning Sari)

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 5 Maret 2012
Jam : 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Heda Swandaning Sari
Judul : *Pasar Dampit dalam Perspektif Market atau Government*
(Studi pada Pasar Dampit Kabupaten Malang)

dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua



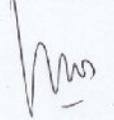
Dr. Sarwono, M.Si
NIP.19570909 198403 1 002

Anggota



Farida Nurani, S.Sos, M.Si
NIP. 19700721 200501 2 001

Anggota



Dr. Irwan Noor, MA
NIP.19611024 198601 1 002

Anggota



Drs. Abdullah Said, M.Si
NIP.19570911 198503 1 003



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

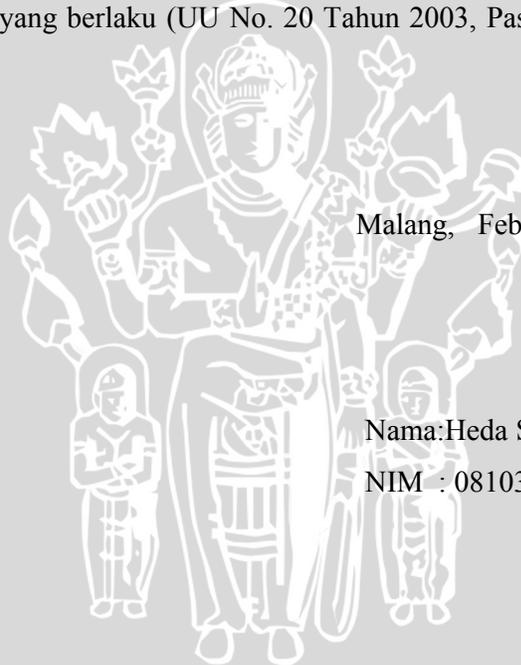
Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Februari 2012

Nama: Heda Swandaning Sari

NIM : 0810310246



RINGKASAN

Heda Swandaning Sari, 2012, **Pasar Dampit dalam Perspektif *Market* Atau *Government* (Studi Pada Pasar Dampit Kabupaten Malang)**.
Dr.Sarwono, M.Si. , Farida Nurani,S.Sos, M.Si 177 Hal + xxii

Pasar merupakan sarana yang sangat berperan dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. Keadaan demikian menjadikan penulis terdorong untuk melakukan penelitian di Pasar Dampit Kabupaten Malang kepada *stakeholders* masyarakat pasar dan *stakeholders* pemerintah dengan tujuan antara pemerintah dan masyarakat pasar bisa sama-sama memaknai pasar dan ada reformasi administrasi di bidang pasar. Dari masyarakat pasar (*market*) dan pemerintah diharapkan bisa memberikan perubahan-perubahan kepada Pasar Dampit Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lebih menekankan kepada pengembangan teknik *emic*. Teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara yang ditujukan kepada narasumber (informan) yang ditentukan sesuai kebutuhan penelitian, yakni masyarakat Pasar Dampit (seperti contohnya pedagang pasar Dampit, Pengunjung Pasar Dampit, serta pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya) dan para pemegang otoritas pasar yaitu UPPD Dampit, Dinas yang terkait , DPRD Kabupaten Malang. Fokus pada penelitian ini adalah mengenai tanggapan dari masyarakat pasar dan pemerintah mengenai kebersihan, ketertiban, keamanan, dan retribusi pasar dan juga sustainability Pasar Dampit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan fokus penelitian yang peneliti ambil dengan pemaknaan dari beberapa informan yang peneliti lakukan, keberadaan pasar Dampit perlu untuk di reformasi. Masyarakat Pasar Dampit menyerahkan semua urusan dan kepentingan kepada Pengelola Pasar. *Sustainability* Pasar Dampit memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat Dampit karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada pasar. Pengelolaan pasar Dampit kurang memiliki perencanaan dan konsep pengembangan. Permasalahan serius pada usaha Pasar Dampit adalah ketiadaan pelayanan yang memadai dari otoritas pasar dan dukungan fasilitasi infrastruktur yang layak dari pengelola pasar. Kelembagaan di Pasar Dampit tidak optimal dalam prakteknya kedua kelembagaan yang ada yaitu pasar dan pemerintah yang sama mempunyai kekurangan.

Saran dari peneliti adalah dalam usaha untuk menjaga eksistensi Pasar Dampit di tengah-tengah pertumbuhan toko modern, maka perlu dilakukan pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan. Pengelolaan pasar memiliki keharusan menjalankan secara baik kewajiban dan tanggung jawabnya untuk mengatur ketertiban, kebersihan, kenyamanan, serta keamanan pasar. Pemerintah perlu mengambil langkah tindakan yang mendorong Pasar Dampit bekerja lebih baik, tindakan pemerintah sebagai regulator juga diperlukan untuk mengatasi masalah yang dialami oleh para pelaku pasar.

SUMMARY

Heda Swandaning Sari, 2012, **Dampit Market in Perspective Market Or Government (Study at Dampit Market Malang Regency)**. Dr. Sarwono, M.Si; Farida Nurani, S.Sos, M.Si, 177 pages + xxii

The market was really instrumental in improving the economy. Local governments are also seen to have failed to protect traditional markets. The existence of the market not only to fund the budget, but also a source of income of its citizens, therefore the market is expected to become the backbone of the regional economy. This condition make the authors are encouraged to observe the above phenomenon through research in Dampit Market to market the community stakeholders and government stakeholders with the aim of the government and the public market could equally interpret the market and administrative reforms in the market. Of the markets and the government is expected to deliver the changes to the Dampit Market Malang Regency.

This study uses qualitative research emphasizes the development of emic techniques. Data collection techniques of research through interviews addressed to the informants who depend on the needs of research, that is the Dampit markets (such as for example Dampit market traders, Dampit market visitors, as well as parties concerned in it) and the holders of the market authority UPPD Dampit, Office related, and DPRD Malang regency.

The results showed that based on the focus of research that researchers take the meaning of some the informants who do research, market presence Dampit need to reform. Market society Dampit and submit all matters of interest to the Market Manager. Sustainability Dampit Market has a very important role for the survival of the Dampit because most people depend on the market. Market management Dampit lack of planning and concept development. Serious problems in the business market Dampit is the lack of adequate services from the market authority and adequate infrastructure support facilities from the market manager. Institutional in Dampit Market not optimal in practice there are both institutional government and markets with each other lacks.

Advice from researchers is the attempt to maintain the existence of Dampit market in the middle of the growth of modern market, there should be guidance, protection, and empowerment. Market management must execute well to have the obligation and responsibility to set the order, cleanliness, comfort, and security of markets. Government needs to take actions that encourage Dampit market work better, as a regulator of government action is also needed to exceed the problems by market participants.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dengan judul Pasar Dampit dalam Perspektif *Market* atau *Government*. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril dan materiil kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. MR. Khairul Muluk, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Sarwono, M.Si selaku dosen Ketua Pembimbing dan Ibu Farida Nurani, S.Sos, M.Si selaku dosen Anggota Pembimbing yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Irwan Noor, MA dan Bapak Drs Abdullah Said, M.Si selaku dosen penguji.
5. Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik dan semua dosen Fakultas Ilmu Administrasi Publik yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Bapak, ibu, adek dan keluarga besar yang telah banyak berdoa untuk kesuksesan anaknya dan memberikan spirit, motivasi dan dorongan kepada penulis agar selalu berada pada jalan yang terbaik dalam lindungan Allah SWT.

7. Semua pegawai UPPD Dampit dan Dinas Perindustrian,Perdagangan,dan Pasar. DPRD Kabupaten Malang Bapak Tono, ST dan Bapak Drs. Teguh Hariyono.
8. Masyarakat Pasar Dampit yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang meluangkan memberikan waktunya membantu peneliti dalam memberikan informasi.
9. Teman-teman FIA Publik angkatan 2008, khususnya sahabat-sahabatku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan bantuan kalian semua yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik kepada Anda semua.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hasil terbaik namun apabila masih kurang sempurna, dengan kerendahan hati penulis membuka diri terhadap segala kritik dan saran dari semua pihak untuk dapat menyempurnakan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dan dapat disempurnakan melalui penelitian dengan tema yang sama. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Amin.

Malang, Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kontribusi Penelitian	15
E. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	20
A. Administrasi	20
1. Pengertian Administrasi Publik	20
2. Perkembangan Paradigma dalam Administrasi Negara	21
3. Administrasi Pembangunan dan Reformasi Administrasi	25
4. Peran Administrasi Pembangunan	28
5. Sasaran Administrasi Pembangunan	31
B. Peranan Pemerintah	36
C. Kerangka teoritik Pelayanan Publik	42
D. Fungsi Manajemen Publik	46
E. Pasar	48
1. Pengertian Pasar	48
2. Jenis dan Macam Pasar	50
3. Fungsi dan Peran Pasar	53
F. Preposisi Penelitian	56
BAB III. METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian	57
B. Fokus Penelitian	59
C. Lokasi dan Situs Penelitian	60

D. Jenis dan Sumber Data	60
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Instrumen Penelitian	63
G. Analisis Data	64

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Gambaran umum Lokasi dan Situs Penelitian	69
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
a. Aspek Geografi Kabupaten Malang	69
b. Visi dan Misi Kabupaten Malang	71
c. Gambaran Umum Kecamatan Dampit	74
2. Gambaran Umum Situs Penelitian	75
2.1 Gambaran umum UPPD Dampit	76
a. Visi dan Misi UPPD Dampit	76
2.2 Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar	77
a. Tupoksi	77
b. Visi dan Misi	78
2.3 Gambaran Umum DPRD Kabupaten Malang	79
a. Visi dan Misi	79
2.4 Gambaran Umum Pasar Dampit	80
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	81
1. Tanggapan stakeholders Masyarakat Pasar	81
a. Keberadaan Pasar Dampit bagi Masyarakat Pasar	81
b. Tanggapan Masyarakat Pasar Dampit terhadap	
1. Tanggapan Masyarakat Pasar mengenai Kebersihan Pasar	91
2. Tanggapan Masyarakat Pasar mengenai Keamanan Pasar	96
3. Tanggapan Masyarakat Pasar mengenai Ketertiban Pasar	99
4. Tanggapan Masyarakat Pasar mengenai Retribusi Pasar	101
c. Substansi emic Pedagang pada Sustainability Usaha Pasar Dampit	104
2. Tanggapan Stakeholders Pemerintah	106
a. Keberadaan Pasar Dampit bagi Masyarakat Pasar	106
b. Tanggapan Pemerintah terhadap Pasar Dampit mengenai	
1. Tanggapan Pemerintah mengenai Kebersihan Pasar	108
2. Tanggapan Pemerintah mengenai Ketertiban Pasar	109
3. Tanggapan Pemerintah mengenai Retribusi Pasar	110
c. Substansi <i>Emic</i> Pemerintah pada <i>Sustainability</i> Usaha Pasar Dampit	112

C. Analisis dan Intrepetasi Data.....	119
1. Tanggapan stakeholders Masyarakat Pasar.....	119
a. Keberadaan Pasar Dampit bagi Masyarakat Pasar.....	119
b. Tanggapan Masyarakat Pasar Dampit terhadap	
1. Tanggapan Masyarakat Pasar mengenai Kebersihan Pasar	127
2. Tanggapan Masyarakat Pasar mengenai Keamanan Pasar	129
3. Tanggapan Masyarakat Pasar mengenai Ketertiban Pasar	130
4. Tanggapan Masyarakat Pasar mengenai Retribusi Pasar	132
c. Substansi emic Pedagang pada Sustainability Usaha	
Pasar Dampit.....	134
2. Tanggapan Stakeholders Pemerintah	138
a. Keberadaan Pasar Dampit bagi Masyarakat Pasar	138
b. Tanggapan Pemerintah terhadap Pasar Dampit mengenai	
1. Tanggapan Pemerintah mengenai Kebersihan Pasar	141
2. Tanggapan Pemerintah mengenai Ketertiban Pasar	142
3. Tanggapan Pemerintah mengenai Retribusi Pasar	145
c. Substansi <i>Emic</i> Pemerintah pada <i>Sustainability</i> Usaha	
Pasar Dampit	147
D. Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Reformasi Administrasi Publik ..	162
E. Pembahasan <i>Emic</i> menuju <i>Ethic</i>	166
BAB V. PENUTUP	172
A. Kesimpulan	172
B. Saran	174
DAFTAR PUSTAKA	xiii

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1.	Sistematika Pembahasan	17
2.	Hasil Pengolahan Data	150



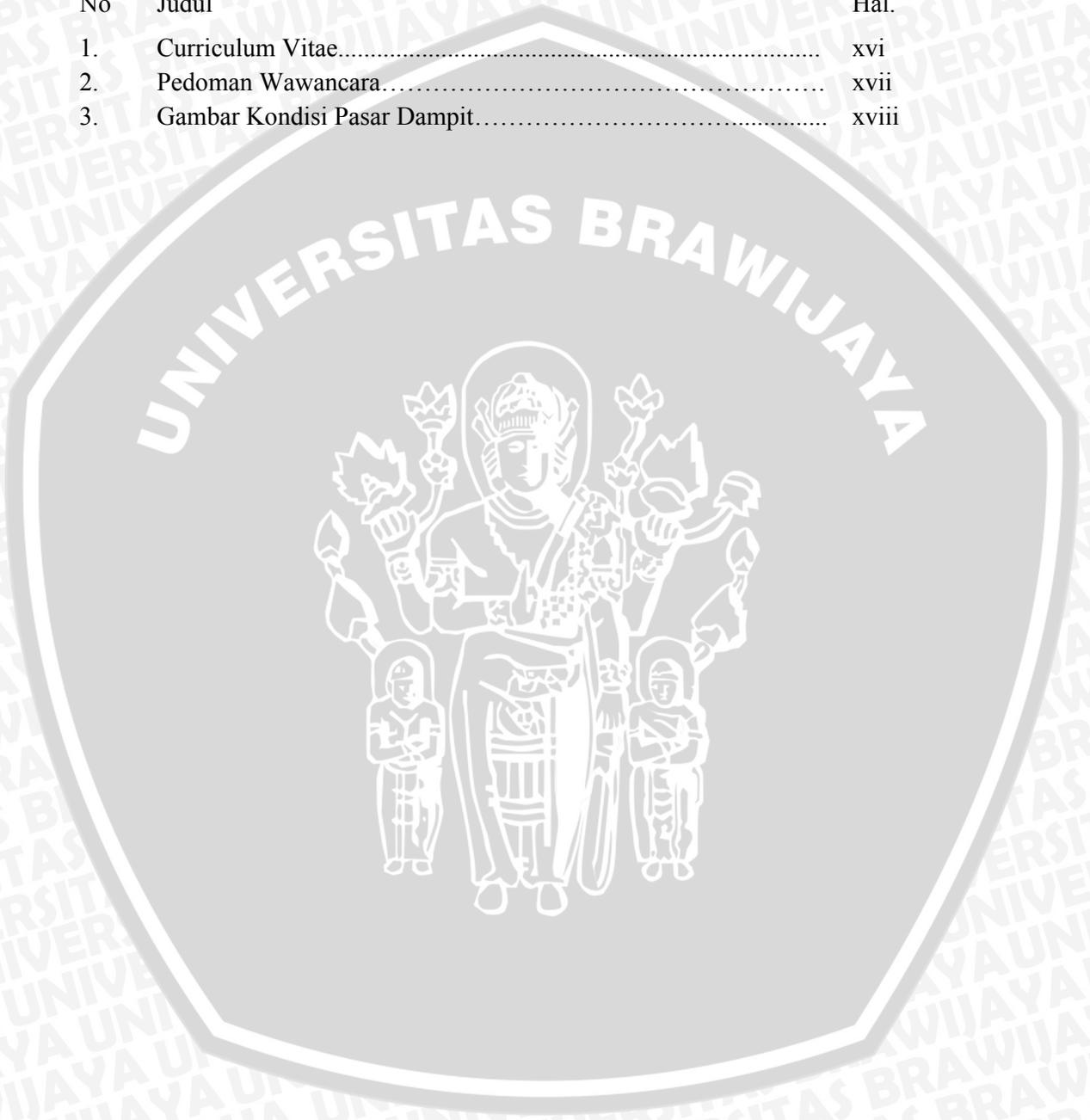
DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.	Penyajian Data	59
2.	Proses Pengolahan Data.....	61
3.	Banjir masuk ke dalam bedak	87
4.	Atap pasar yang rusak.....	89
5.	Tempat Pembuangan akhir sampah.....	92
6.	Jalan yang rusak tergenang air	91
7.	Jalan yang rusak penuh dengan sampah	98



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal.
1.	Curriculum Vitae.....	xvi
2.	Pedoman Wawancara.....	xvii
3.	Gambar Kondisi Pasar Dampit.....	xviii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia secara konstitusional menetapkan bahwa konsep Negara Indonesia adalah Negara kesejahteraan dan tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, yang dalam bahasa konstitusi disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara kesejahteraan secara konseptual adalah Negara yang memungkinkan semua dan setiap warga negara dapat menikmati hidup yang layak sebagai manusia atau dalam bahasa filsafat: “Negara kesejahteraan adalah negara yang mengusahakan dan memungkinkan semua dan tiap-tiap orang dalam kehidupan bersama negarawi dapat menikmati kemanusiannya, bangga dan puas dengan dirinya sebagai manusia”.(Hamzah,2007)

Dalam konteks berfikir suatu negara kesejahteraan adalah negara yang mengutamakan atau mendahulukan kepentingan atau kebutuhan rakyat kebanyakan dari kepentingan pribadi dan/atau golongan. Dengan perkataan lain, Negara kesejahteraan adalah Negara yang memfokuskan perhatian dan kegiatan terutama untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Makna dari konsep tersebut menunjukkan bahwa disatu sisi ada tanggung jawab pada penyelenggara negara untuk mengusahakan kesejahteraan itu. Sedangkan disisi lain ada hak dan kewajiban warga negara untuk bekerja agar kesejahteraan hidup dapat terpenuhi.

UUD Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum tertinggi yang menjamin kesamaan hak dan kewajiban setiap warga negara

Indonesia. Amanat mukadimah UUD Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi fondasi pembangunan Indonesia yang menyeluruh, konsisten, dan berorientasi masa depan. Pembangunan mempersiapkan bangsa Indonesia menghadapi perubahan sosial politik, budaya, arus pemikiran dan juga perubahan di bidang ekonomi yang sedang dan akan terjadi. Salah satu pembangunan yang harus dilakukan sebagai bagian integral dari pembangunan Indonesia adalah pembangunan ekonomi. Selama periode Reformasi yang sejak tahun 1998 hingga sekarang, bangsa Indonesia mulai melaksanakan pembangunan yang berdasarkan demokratisasi yang lebih luas, pelaksanaan desentralisasi dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Namun pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ternyata masih banyak kesulitan yang menghadang bahkan banyak suara-suara yang muncul menyatakan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan Reformasi di Indonesia karena di nilai tidak memperbaiki kesejahteraan dan keadilan secara signifikan. (Mas'ood,2003)

Salah satu akar dari permasalahan-permasalahan di atas adalah lemahnya sektor publik. Dalam arti yang luas sektor publik mencakup legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan dalam arti yang spesifik sektor publik lebih ditekankan pada aspek eksekutif. Studi dan analisis tentang sektor publik bagi masa depan sangat penting. Salah satu studi yang paling dikenal mengenai sektor publik adalah administrasi publik. Bidang studi ini sangat penting dan strategi karena keberhasilan pengelolaan kehidupan bersama, sangat ditentukan oleh daya dukung Administrasi Publik, dengan birokrasi sebagai tulang punggungnya. Pengalaman negara-negara maju maupun negara berkembang menunjukkan bahwa daya dukung

Administrasi Publik, khususnya daya dukung birokrasi, sangat menentukan keberhasilan perbaikan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat (Riyadi, 2000).

Administrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh sesuatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menciptakan keanekaragaman kegiatan perekonomian (Sukirno, 2007)

Pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa yang diselenggarakan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Salah satu hasil dari pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia adalah adanya perkembangan ekonomi nasional dan daerah yang tumbuh pesat selama ini. Hal tersebut turut serta mendorong usaha perpasaran atau perdagangan tumbuh dan berkembang secara pesat terutama pada kota-kota besar. Semakin tumbuhnya usaha perpasaran menunjukkan bahwa semakin tingginya kebutuhan akan tempat usaha

bagi masyarakat dan semakin meningkat serta beragamnya keinginan konsumen untuk menentukan tempat berbelanja.

Dalam pemikiran Adam Smith, persoalan ekonomi dan politik sangat terpisah, dan ekonomi mempunyai status yang lebih superior karena ia dianggap paling baik jika berjalan tanpa intervensi pemerintah dalam sistem hukum alam yang harmonis. Pasar dianggap sebagai mekanisme otomatis (*self regulating*) yang selalu mengarah pada kesetimbangan antara permintaan dan penawaran, sehingga ia menjamin terwujudnya alokasi sumber daya dengan cara yang paling efisien. Setiap pembatasan terhadap persaingan bebas dianggap mencampuri efisiensi alamiah dalam mekanisme pasar (Hamzah, 2007). Intervensi negara dalam perekonomian, pada titik tertentu dapat menghambat laju perekonomian yang dijalankan masyarakat. Tanpa disadari negara dapat menjadi pesaing bagi warganya dan mendistorsi mekanisme pembentukan harga. Pada titik ini kewajiban negara untuk mensejahterakan masyarakat dapat dipertanyakan manifestasinya. Karena itu negara, yang dijalankan sekelompok manusia, perlu selalu mempertanyakan benefit atas kebijakan yang diambil dengan mempertimbangkan kepentingan warganya. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi ujung dari setiap alur kebijakan yang diambil. Sebetulnya bukan soal intervensinya, tetapi soal negaranya. Sekali negara adalah tidak lebih dari kendaraan yang menjadi alat untuk mewujudkan aspirasi sekelompok manusia yang berkuasa.

Persoalan negara dan kesejahteraan masyarakat, selalu menjadi isu yang relevan di belahan dunia manapun dan dalam rentang waktu kapanpun. Tuntutan agar negara mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang inheren

dari manifestasi kedaulatan negara. Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari indikator keberhasilan negara menjalankan kedaulatannya. Persoalannya adalah bagaimana memformulasikan peran pemerintah secara tepat, sehingga menjamin berjalannya roda perekonomian yang benar-benar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sebuah institusi politik, negara bukanlah sebuah entitas yang bisa merasakan, mempercayai, atau menindak. Manusia yang bertindak atas nama negara, menggunakan kekuasaan atau menjalankannya melalui organ-organnya. Negara tidak lebih dari kendaraan yang menjadi alat untuk mewujudkan aspirasi sekelompok manusia yang berkuasa. Atas dasar itu, negara bergerak dalam bandul politik dari satu ekstrem ke ekstrem lain, termasuk keputusannya untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi. (Hamzah,2007)

Sebelum era globalisasi di tengah masyarakat bercirikan adanya pasar-pasar tradisional hampir menyebar keseluruhan tanah air, merupakan penjelmaan rasa solidaritas dan partisipasi bersama guna mewujudkan kehidupan yang lebih layak, bermartabat dan penuh dinamika. Pasar tradisional merupakan perwujudan kerjasama secara sukarela dalam pengembangan ekonomi yang sukarela dalam pengembangan ekonomi yang selalu dilakukan oleh masyarakat semenjak nenek moyang kita. Pasar tradisional merupakan sistem pasar yang dikelola secara sederhana yang dapat mengisi kegiatan-kegiatan yang dirasakan berguna bagi kegiatan ekonomi masyarakat yang menopang perekonomian kita. Sehingga tidak salah apabila dikatakan bahwa pasar tradisional merupakan suatu karakteristik penyangga ekonomi bangsa.

Pasar merupakan sarana yang sangat berperan dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. Perlu disadari bahwa pasar memiliki beberapa fungsi yang positif bagi peningkatan perekonomian daerah yaitu:

1. Pasar sebagai pusat pengembangan ekonomi rakyat
2. Pasar sebagai sumber retribusi daerah
3. Pasar sebagai tempat pertukaran barang
4. Pasar sebagai pusat perputaran uang daerah
5. Pasar sebagai lapangan pekerjaan

Pasar diharapkan menjadi cikal bakal perdagangan yang merupakan pranata ekonomi yang potensial, karena pasar merupakan perwujudan kegiatan jual-beli pada lapisan masyarakat paling bawah. Pasar secara ekonomis ditargetkan untuk mendorong perkembangan potensi produksi di daerah sekitarnya, memperkecil disparitas harga dan dapat menjadi bagian dari jaringan distribusi nasional yang dapat menunjang kelancaran pengadaan dan penyaluran kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut (Sugia: 2007).

Adanya pasar bukan hanya untuk mendanai anggaran, tetapi juga menjadi sumber penghasilan warganya, oleh karena itu pasar diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam parameter perkembangan ekonomi. Parameter ini memiliki empat isu strategis, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, investasi, kesempatan kerja, serta suprastruktur dan infrastruktur ekonomi. Peran pasar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat bergantung pada

upaya semua pihak yang terkait, terutama pemerintah, masyarakat serta para pelaku kegiatan pasar. Banyak masyarakat desa yang bergantung hidup pada Pasar Tradisional.

Pasar tradisional merupakan salah satu barometer kemajuan perekonomian masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Pasar mampu memotivasi masyarakat untuk terus berkeaktivitas dan berproduksi melalui kegiatan usaha kecil yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat maupun masyarakat desa. Dengan demikian pasar merupakan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam jangka panjang mempunyai prospek untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah harus dapat memberdayakan pasar desa(tradisional) melalui upaya-upaya serius dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi pasar tradisional, kelebihan-kelebihan yang dimiliki serta meminimalisir kelemahan-kelemahannya melalui kebijakan daerah yang menjadikan pasar tradisional dapat terus eksis dan berkembang, perbaikan fisik dan penataan pasar serta lingkungannya untuk memberikan kenyamanan terjadinya transaksi tanpa meninggalkan peran pedagang itu sendiri. (Feriyanto:2006)

Pasar sebagian besar muncul dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkannya serta konsumen yang membutuhkan barang-barang tertentu untuk kebutuhan sehari-hari. Pasar yang terus tumbuh karena kebutuhan masyarakat tersebut menjadi tidak tertata, tidak terurus secara baik karena memang tumbuh dengan sendirinya seiring aktivitas perdagangan masyarakat sekitarnya. Akibatnya kesan kumuh, semrawut, becek, panas, tidak aman dan tidak nyaman tidak dapat dihindari telah menjadi cap yang menempel pada pasar tradisional. Kebanyakan saat ini keadaan pasar baik secara

fisik maupun non fisiknya kini sangat memprihatinkan bagi penjual maupun pembeli. Karena sama sekali tidak ada fasilitas permanen yang menunjang kebutuhan pasar. Semakin lama pasar tersebut terkesan sebagai “pasar kumuh”, tenda-tenda berdiri tanpa tertata rapi. Aspek lingkungan belum dikelola dengan baik, sehingga pasar tidak mempunyai nilai estetika sama sekali, serta keamanan, kenyamanan kurang begitu terjamin yang mengakibatkan orang malas untuk pergi ke pasar tradisional.

Suatu konsep pasar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sebenarnya sangat bagus. Pasar desa/ tradisional harusnya bisa menjadi salah satu tempat pemasaran utama berbagai hasil produksi masyarakat sekitar, mulai dari produk pertanian (agro), kerajinan, dan industri rumah tangga. Di sisi lain, potensi yang besar dari keberadaan pasar ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Keberadaan sejumlah pasar di berbagai wilayah pedesaan, diharapkan mampu menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat tersebut.

Saat ini pasar tradisional secara potensi dan aktual mengalami kemerosotan “*trust*” (kepercayaan), akumulasi eksistensi mengarah pada trend yang negatif. Bilamana fenomena ini tidak dihentikan maka dapat di pastikan bahwa dari waktu ke waktu secara evolutif keberadaan pasar tradisional akan semakin menyusut dan *ending* (berakhir). Seperti yang diungkapkan oleh direktur eksekutif DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPP APPSI), N Dharma (Republika, 2005) mengemukakan bahwa “ secara rata-rata pengunjung pasar tradisional tinggal 40 persen, di Jakarta terdapat sembilan pasar yang hampir punah, karena konsumen

berbondong-bondong beralih ke pasar modern “. Salah satu penyebabnya adalah manajemen atau pengelolaan pasar tidak benar. ‘Data di Jawa Barat juga mendukung kenyataan ini, bahwa omzet penjualan rata-rata turun 30-50%, sementara rata-rata gross profit margin sektor ritel modern supermarket berkisar antara 25-30% sedangkan hipermarket lebih besar, sehingga akibatnya terdapat 20% pedagang yang gulung tikar (yang alih profesi atau menjadi pedagang kaki lima) (Pikiran Rakyat, 21 Mei 2007).

Menunjuk Pasar Dampit Kabupaten Malang, pasar yang bermula dirintis oleh pedagang tradisional, pada awalnya adalah hanya locus satu dua orang pedagang tradisional yang berjualan. Pedagang –pedagang *multi ethnics* dan *multi cultural* ini yang merintis jalan bagi terbentuknya tatanan sosial sehingga di sebut sebagai pasar. Pasar dampit sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang mempertukarkan barang yang disubstitusikan, dimana di dalam pasar dampit masyarakat bisa menjual dan membeli hasil buminya dan dapat membuka kesempatan lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ekonomi masyarakatnya. Banyak penduduk Desa Dampit yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani, dan mereka membutuhkan tempat untuk menjual hasil-hasil produksinya, yaitu di pasar Dampit. Dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satu kegiatan memerlukan adanya pasar sebagai sarana pendukungnya. Kegiatan di pasar berarti melibatkan masyarakat baik selaku pembeli maupun sebagai penjual yang saling membutuhkan satu sama lainnya.

Ketika di pasar hasil rintisan para pedagang tradisional setempat itu menjadi potensi ekonomi yang selama puluhan tahun terbangun menunjukkan

tanda-tanda “keuntungan” yang semakin besar, pada saat itu justru cenderung akan terdesak dan tersingkir karena hadirnya kepentingan-kepentingan dari kekuatan yang lebih besar, baik itu campur tangan pemerintah atas nama fungsi fasilitasi dan penataan maupun intervensi modal raksasa kapitalis yang hanya bisa hidup setelah ada masyarakat dan pasar yang sudah mapan.

Para pedagang tradisional, supaya tidak selamanya harus hadir di pinggir, terpaksa menyesuaikan diri dengan pola permainan baru, aturan modern yang serba formalistik. Tentunya, resiko yang cukup besar harus dan telah dipenuhinya, misalnya dari sejak harus mencicil sewa kios dalam bangunan baru dengan harga mahal, harus memiliki agunan untuk mendapatkan modal dari Bank, memiliki gudang stock barang,dll. Tetapi pedagang tradisional tetap saja memiliki keterbatasan untuk dapat mengimbangi pasar modern, semisal menciptakan suasana ruang yang bersih, nyaman, dan sejuk ber-AC, karena keadaan ini adalah diluar jangkauan kompetensinya.

Dengan pola perkembangan dinamika semacam ini, tatanan institusi pasar tradisional kini berada dalam situasi yang genting. Secara ideal turut campurnya pemerintah pada pasar tradisional di dasarkan atas kepentingan pemerintah untuk dapat mengawal kinerja pasar tradisional agar kinerjanya terpelihara secara baik, sehingga pasar mampu menginovasi kelembagaan di dalamnya bekerja secara optimal, efisien, dan memuaskan konsumen. Realitas empiriknya, banyak yang memberikan petunjuk bahwa pasar kurang dapat merespon secara baik dan benar terhadap persoalan fundamental pasar. Pemegang otoritas pasar yang pada awalnya menyatakan diri atas nama kepentingan penataan, pembinaan ketertiban ataupun

pemeliharaan kesejahteraan publik justru menjadi penghadang, karena kekurangpekaannya terhadap persoalan pasar tradisional.

Bagi pedagang tradisional dengan trend pertumbuhan pasar modern tentunya akan dan telah membawa akibat pada penurunan daya saing pasar tradisional dan melemahkan posisi tawar menawar terhadap para pemasok barang yang juga menjadi pemasok pasar modern. Mutu pelayanan yang cukup memuaskan merupakan sebuah alasan kuat yang menyebabkan pasar modern mampu menyedot minat para konsumen di berbagai wilayah tanah air. Berbagai jenis barang bisa diperoleh di pasar modern. Solusi terhadap persoalan peningkatan daya saing dan posisi tawar yang kuat tentunya pertama-tama terletak pada daya upaya pedagang pasar itu sendiri sehingga dapat teratasi, dan keduanya adalah keharusan dukungan pemerintah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab sosial, ekonomi maupun politis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat. Karena secara tidak langsung dengan keberadaan pasar tradisional bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kalangan ke bawah.

Optimalisasi upaya penggalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama yang berhubungan dengan pemungutan retribusi Daerah tidak identik dengan eksploitasi yang berlebihan. Bukan hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga melakukan pungutan retribusi yang justru akan memberatkan dan semakin menindas masyarakat menengah ke bawah, karena pungutan pasar adalah bukan satu-satunya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika Pemerintah Daerah berkeinginan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar, bisa dilakukan dengan cara menambah jumlah

pasar Daerah. Akan tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan, memperlebar pasar yang sudah tidak mampu menampung pedagang, memperbaiki sarana, yang dapat mendukung dan memperlancar kegiatan pasar, meningkatkan kinerja berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan pungutan retribusi pasar. Dengan demikian ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar.

Institusi pemerintah juga dituntut memiliki konsep kerja dalam menjalankan perannya. Sesuai dengan ide dasar alasan intervensi pada pasar, maka posisi utama yang diperlukan adalah sebagai pelayan masyarakat atau publik, bukan sebaliknya menjadi sarana untuk mengumpulkan modal keuntungan atau menjadi kepanjangan tangan-tangan kapitalis swasta yang mengembangkan pasar-pasar modern. Sehingga pula, dengan berbagai pungutan retribusi dan pajak maka pemanfaatan dana yang diperolehnya adalah pada semestinya dikembalikan secara proposional untuk pengembangan pasar. Keterlibatan pemerintah pada struktur pasar adalah dalam fungsinya menjadi regulator, fasilitator, dinamisator, yang mempertemukan kepentingan pelaku-pelaku pasar, dengan tujuan untuk mencapai harmonisasi mencegah adanya pelanggaran dan *moral hazard* diantara para pelaku dalam pasar tanpa mengurangi keleluasaan otonomi mekanisme transaksi melalui infrastruktur yang dikuasainya dan manajemen publik.

Pemerintah daerah juga dapat dipandang telah gagal melindungi pasar tradisional, ketika lebih terpicat perhatian dan fasilitasi perijinan dan penyediaan lahan pada berbagai pasar modern dan bermodal besar, sementara disisi lain pasar tradisional semacam Pasar Dampit menunjukkan kinerja ekonomi yang semakin

menurun. Pemerintah bertindak menjadi pihak ketiga yang berkepentingan mendapatkan pendapatan besar atas alasan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Ketika pemegang otoritas pasar menyelenggarakan pungutan pada para pedagang yang bernama “retribusi”, maka sifat daripada pungutan itu adalah bersifat timbal balik atau memenuhi hubungan *reciprocity* yaitu haruslah diimbangi dengan fungsi pelayanan yang memadai bagi kepentingan transaksi di pasar yang ini berbeda sifatnya.

Semestinya pula secara normatif dengan otonomi daerah menurut proporsinya pemerintah daerah termasuk warga masyarakat di dalamnya memiliki otoritas sendiri mengatur daerahnya dan itu mencakup pula pada aspek ekonomi di daerah yang juga menunjuk pada pasar tradisional sebagai institusi publik. Warga masyarakat termasuk pedagang tentunya memiliki hak dan kesempatan untuk menikmati fasilitasi dari pemerintah (kabupaten) agar kinerja pasar dapat meningkat. Dengan ini, penataan dan pengelolaan Pasar Dampit ini sebagai milik publik seharusnya lebih banyak berpihak pada kepentingan publik (masyarakat), karena dengan adanya pasar secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Untuk maksud tersebut, dalam mengungkap akar permasalahannya sekaligus sebagai ikhtisar dalam menemukan solusi atas masalah-masalah tersebut perlu dilakukan penelitian secara mendalam.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian yang akan dilakukan antara lain.

1. Bagaimanakah tanggapan *stakeholders* Pasar (masyarakat pasar) terhadap Pasar Dampit ?
2. Bagaimanakah tanggapan *stakeholders* Pemerintah terhadap Pasar Dampit ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan antara lain,

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tanggapan *stakeholders* pasar (masyarakat pasar) terhadap Pasar Dampit.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tanggapan *stakeholders* pemerintah terhadap Pasar Dampit.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini nantinya diharapkan mempunyai kegunaan antara lain,

1. Secara akademik,
 - a. memberi sumbangsih proses penelitian kepada peneliti berikutnya untuk menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *emic*, pemaknaan sangat penting untuk mendapatkan hasil

dari suatu penelitian karena selama ini masih jarang dilakukan .

- b. Kaitannya dengan reformasi administrasi pembangunan di bidang pasar tidak hanya pembangunan infrastruktur saja yang sasaran lainnya yang penting adalah pengembangan kelembagaan, pengembangan sumberdaya manusia, dan *capacity building*
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi pembanding bagi penelitian-penelitian yang telah lalu dan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang dalam judul atau topik yang sama yang berkaitan dengan Pasar Tradisional.

2. Secara Praktis

Pemerintah Daerah dapat mengatasi masalah-maslah yang ada di Pasar Dampit dan semua pasar Tradisional di Kabupaten Malang yang rata-rata mempunyai masalah yang sama. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan akan bisa mewujudkan suatu *good governance* dengan hasil yang sudah kelihatan wujudnya, Dalam penelitian ini ditekankan lagi bagaimana bekerjasama antara pihak pemerintah dengan masyarakat.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN



<p>BAB II</p>	<p>TINJAUAN PUSTAKA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi Administrasi Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kelembagaan - Pengembangan Sumber Daya Manusia - Pengembangan Kemampuan 2. Peranan Pemerintah 3. Pasar <p style="text-align: center;">↕</p> <p style="text-align: center;">Preposisi Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi pembangunan tidak hanya sekedar pembangunan fisik tetapi memberikan perubahan (kelembagaan,SDM, Kemampuan) dalam upaya reformasi administrasi pembangunan pasar 2. Peranan pemerintah sangat diperlukan dalam memberdayakan pasar. 3. Perubahan yang dilakukan diharapkan untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan pasar tradisional.Diharapkan nantinya masing-masing stakeholder sama-sama memaknai pasar.
<p>BAB III</p>	<p>METODE PENELITIAN</p>	<p>Penelitian Deskriptif Kualitatif lebih menekankan kepada pengembangan teknik <i>emic</i>.</p> <p>Memaknai pasar dari dua stakeholder (masyarakat pasar dan pemerintah)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Observasi, wawancara, Diskusi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Reduksi Data</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Penyajian Data</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Menarik Kesimpulan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Intrepretasi</p>



BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	<ul style="list-style-type: none">- Dalam bab ini lebih rinci membahas tentang gambaran umum lokasi dan situs penelitian- Menggambarkan deskripsi tentang stakeholder masyarakat pasar dalam memaknai pasar.- Menggambarkan deskripsi tentang stakeholder pemerintah dalam memaknai pasar.
BAB V	PENUTUP	Dari hasil dan pembahasan akan ditarik sebuah kesimpulan dan akan diberikan saran dari peneliti yang bisa dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang khususnya Dinas Pasar dalam memberikan kontribusi kepada keberadaan pasar Dampit.

Tabel 1.1 Sistematika Pembahasan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Ada berbagai pengertian mengenai Administrasi. Yang paling mendasar adalah pengertian dari Waldo, yang menyatakan bahwa administrasi Negara adalah species dari genus administrasi, dan administrasi itu sendiri berada dalam keluarga kegiatan kerjasama antar manusia. Waldo dan Siagian (1982:2) menyatakan yang membedakan administrasi dengan kegiatan kerja sama antar manusia lainnya adalah derajat rasionalitasnya yang tinggi. derajat rasionalitasnya yang tinggi ini ditunjukkan oleh tujuan yang ingin dicapai serta cara untuk mencapainya. Administrasi negara berkenaan dengan administrasi dalam lingkup negara, sering kali pula diartikan sebagai pemerintah. Seperti halnya dalam genusnya, administrasi, adanya tujuan yang ingin di capai merupakan konsep yang mendasar pula dalam administrasi negara. Tujuan itu sendiri tidak perlu hanya satu pada setiap waktu, tempat, bidang, atau tingkatan, bahkan kegiatan tertentu, terdapat tujuan-tujuan tertentu. Tetapi sebagai negara tentu harus ada asas, pedoman, dan tujuan, yang menjadi landasan kerja administrasi negara. Pada umumnya (meskipun tidak semuanya) gagasan-gagasan dasar tersebut ada dalam konstitusi negara yang bersangkutan.

Sebagian besar persoalan administrasi Negara adalah bersumber dari persoalan masyarakat. Administrasi Negara adalah bersumber dari persoalan masyarakat. Administrasi Negara merupakan suatu system yang menjawab persoalan-persoalan

masyarakat tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Gerald Caiden dalam Miftah Toha menegaskan, bahwa disiplin administrasi Negara pada hakekatnya adalah suatu disiplin yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat (*public affairs*), dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat. Hal ini meliputi segala sesuatu yang dapat dijelaskan sebagai jawaban masyarakat terhadap masalah-masalah yang memerlukan pemecahan kolektif bukan perorangan, melalui suatu bentuk intervensi pemerintah.

Perkembangan masyarakat membawa tuntutan-tuntutan masyarakat pun meningkat. Tuntutan-tuntutan ini membutuhkan jawabannya. Jika jawabannya tidak sepadan dengan perkembangan tersebut, maka terdapat ketidakpuasan. Administrasi Negara harus mampu menjawab tuntutan-tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang tersebut. Sehingga ketidakpuasan dapat diperkecil dan dipersempit jaraknya. Bidang kajian administrasi publik sudah mencakup hal-hal penting dalam kehidupan masyarakat ini. Ilmu administrasi Negara secara sensitive harus mampu menanggapi isu-isu pokok dalam masyarakat dan mampu memformulasikan ke dalam suatu rumusan kebijakan, serta cakap melaksanakan kebijakan tersebut ke dalam realisasi kerja sehari-hari.

2. Perkembangan Paradigma dalam Administrasi Negara

Administrasi Negara telah dikembangkan sebagai suatu kajian akademis melalui lima paradigam yang saling tumpang tindih. Tiap fase dari paradigam tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu sesuai dengan locus dan fokusnya. Locus menunjukkan di mana bidang ini secara institusional berada. Locus menunjukkan tempat dari bidang tersebut. Adapun focus menunjukkan sasaran spesialisasi dari bidang studi.

Paradigma I

Dalam Paradigma ini dikenal dengan paradig dikotomi Politik Administrasi, dari tahun 1900-1926.

Tonggak sejarah yang dapat dipergunakan sebagai momentum dari fase paradig pertama ini ialah tulisan dari Frank J.Goodnow dan Lenald D White. Di dalam bukunya *Politics and Administration* Frank Goodnow berpendapat bahwa ada dua fungsi pokok pemerintah yang amat berbeda satu sama lain. Dua fungsi pokok tersebut ialah politik dan administrasi sebagaimana yang tertulis dalam judul bukunya. Penekanan paradig I ini adalah pada lokusnya, yakni mempermasalahkan dimana seharusnya administrasi Negara ini berada secara jelas, menurut Goodnow dan pengikut-pengikutnya, administrasi Negara seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintahan. Sementara itu, walaupun badan legislative dan yudikatif mempunyai juga kegiatan administrasi dalam jumlah tertentu, namun fungsi pokok dan tanggung jawabnya tetap menyampaikan keinginan-keinginan Negara.

Paradigma 2

Prinsip-prinsip administrasi, Tahun 1927-1937

Pada fase paradig kedua ini, administrasi Negara benar-benar mencapai puncak reputasinya. Sekitar pada tahun 1930-an, administrasi banyak mendapat sumbangan yang berharga dari bidang-bidang lainnya seperti industry dan pemerintahan. Sehingga dengan demikian, pengembangan pengetahuan manajemen memeberikan pengaruh yang besar terhadap timbulnya prinsip-prinsip administrasi tersebut. Itulah sebabnya locus dari paradig ini mudah diketahui yakni pada

esensi prinsip-prinsip tersebut. Sesungguhnya walaupun administrasi itu sebenarnya bisa berada dimana saja, akan tetapi karena prinsip adalah prinsip dan administrasi adalah administrasi, maka menurut persepsi paradig ini administrasi Negara mempunyai suatu prinsip tertentu.

Paradigma 3

Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik, Tahun 1950-1970

Secara singkat dikatakan bahwa fase paradigma ketiga ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi Negara dengan ilmu politik. Akan tetapi konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini paling sedikit dalam hubungannya dengan focus keahliannya yang esensial. Ada dua perkembangan baru yang patut dicatat pada masa ini, yakni *Pertama*, tumbuhnya penggunaan studi kasus sebagai suatu sarana yang bersifat epistemologis. *Kedua*, timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai salah satu bagian dari administrasi Negara.

Paradigma 4

Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi, Tahun 1956-1970

Istilah ilmu administrasi (administrative science) digunakan dalam paradig 4 ini untuk menunjukkan isi dan focus pembicaraan. Dalam ilmu ini terdapat pula pembahasan-pembahasan mengenai teori organisasi dan ilmu manajemen. Sebagai suatu paradigma, pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan focus, tetapi tidak pada locusnya. Ia menawarkan teknik-teknik yang canggih dan memerlukan keahlian dan spesialisasi.

Paradigma 5

Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara, tahun 1970

Pada paradigma yang kelima ini locus administrasi Negara tidak semata-mata pada ilmu murni administrasi, melainkan pada teori organisasi. Perhatian itu lebih diberikan pada bagaimana dan mengapa dibandingkan pada bagaimana seharusnya hal-hal tersebut terjadi. Selain itu, pertimbangan-pertimbangan untuk menggunakan teknik-teknik ilmu manajemen ke dalam lingkungan pemerintahan menjadi perhatian pula dalam fase paradigam kelima ini. Lebih dari itu, administrasi Negara semakin bertambah perhatiannya terhadap wilayah ilmu kebijaksanaan (*policy science*), politik, ekonomi, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah dan analisisnya, dan cara-cara pengukuran dari hasil-hasil kebijaksanaan yang telah dibuat.

Aspek-aspek perhatian ini dapat dianggap dalam banyak hal sebagai suatu mata rantai yang menghubungkan antara *focus* administrasi Negara dengan *locus*nya. Sebagaimana yang terlihat dalam tren yang diikuti oleh paradigma ini, maka *focus* administrasi Negara adalah teori organisasi, praktika dalam analisis *public policy*, dan teknik-teknik administrasi dan manajemen yang sudah maju. Adapun locus normative dari administrasi Negara digambarkan oleh paradigam ini ialah pada birokrasi pemerintahan dan pada persoalan-persoalan masyarakat (*public affairs*).

3. Administrasi Pembangunan dan Reformasi Administrasi

Seperti yang diakui oleh Kristiadi (1994:3) bahwa administrasi pembangunan sebenarnya merupakan salah satu paradigma administrasi negara yaitu paradigma yang berkembang setelah ilmu administrasi negara sebagai ilmu

administrasi pada sekitar tahun 1970. Mengacu dari kerangka perkembangan administrasi pembangunan seperti tersebut di atas. Kristiadi memberi pengertian tentang administrasi pembangunan adalah “administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian”. Oleh karena itu administrasi pembangunan juga merupakan pendukung perencanaan dan implementasinya.

Masalah yang serius dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah lemahnya kemampuan birokrasi dalam menyelenggarakan pembangunan. Dari latar belakang ini, maka administrasi pembangunan yang berkembang di negara-negara sedang berkembang di negara-negara sedang berkembang memiliki perbedaan ruang lingkup dan karakteristik dengan negara-negara yang telah maju. Dasar inilah Tjokroamidjojo (1995:52) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai tiga fungsi :

Pertama, penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yang meliputi : upaya penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut *the development of administration* (pembangunan administrasi), yang lebih dikenal dengan istilah “*Administrative Reform*” (reformasi administrasi). Kedua, perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Ini disebut *the administration of development* (administrasi untuk pembangunan). Administrasi untuk pembangunan (*the development of administration*) dapat dibagi atas dua, yaitu : (a) Perumusan Kebijakanaksanaan pembangunan, (b) pelaksanaan kebijaksanaan

pembangunan secara efektif. Ketiga, pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintah saja. Faktor yang lebih penting adalah membangun partisipasi masyarakat.

Seperti yang diuraikan di atas bahwa administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang cocok diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang, namun Bintoro Tjokroamidjojo membedakan bahwa administrasi pembangunan lebih banyak memberikan perhatian terhadap lingkungan yang berbeda-beda, terutama lingkungan masyarakat yang baru berkembang. Sedangkan administrasi pembangunan berperan aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan berorientasi pada upaya yang mendorong perubahan-perubahan ke arah ke keadaan yang lebih baik dan berorientasi pada masa depan, sedangkan ilmu administrasi negara lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara efektif/tertib, efisien pada masing-masing unit pemerintahan.

Administrasi pembangunan berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yaitu kemampuan merumuskan kebijakan pembangunan sedangkan ilmu administrasi negara lebih menekankan pada tugas-tugas rutin dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Administrasi pembangunan mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang, ilmu administrasi negara lebih memperhatikan pada kerapian/ketertiban aparatur administrasinya sendiri. Administrator pada administrasi pembangunan merupakan penggerak perubahan (*agent of change*). Sedangkankan administrator pada administrasi pembangunan berorientasi pada

lingkungan, kegiatan dan pemecahan masalah sedangkan pada administrasi negara lebih bersifat legalitas.

Reformasi administrasi atau pembaharuan administrasi dilakukan karena ketidakmampuan administratif untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya. Studi yang dilakukan Heady (1995:82), menemukan lima ciri yang umum administrasi publik di negara-negara berkembang, yaitu: (1) pola dasar (*basic pattern*) administrasi publik bersifat ciplakan (*imitative*) daripada asli (*indigenous*)., (2) birokrasi di negara berkembang kekurangan (*difficient*) sumber daya manusia terampil untuk menyelenggarakan pembangunan. Kekurangan ini bukan dalam arti jumlah tetapi kualitas. Yang justru kurang adalah administrator yang relatif dengan kapasitas manajemen, keterampilan-keterampilan pembangunan (*development skills*) dan penguasaan tesis yang kurang memadai, (3) birokrat lebih berusaha mewujudkan tujuan pribadinya dibanding dengan pencapaian sasaran program. Dari sifat seperti ini lahir Nepotisme, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang, (4) adanya kesenjangan yang lebar antara apa yang hendak ditampilkan dengan kenyataan. Fenomena ini disebut dengan formalisme, yaitu gejala yang lebih berpegang pada wujud-wujud ekspresi formal dibanding dengan sesungguhnya, dan (5) birokrasi di negara berkembang acapkali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat. Dari fenomena dan wajah administrasi publik ini, maka administrasi publik menjadi suatu tuntutan dan keharusan.

Sebagaimana dikutip oleh Siagian dari Riggs (1982:111), pembaharuan administrasi merupakan suatu pola yang menunjukkan peningkatan efektivitas pemanfaatannya sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah di

tetapkan. Birokrasi itu sendiri menurut pandangan Riggs, merupakan sebuah organisasi yang konkrit, terdiri dari peran-peran yang bersifat hirarkis dan saling berkaitan, yang bertindak secara formal sebagai alat(agent) untuk kesatuan (*entity*) atau sistem sosial yang lebih besar. Dengan demikian menurut pandangan ini, tujuan dari birokrasi ditetapkan oleh kekuasaan di luar kewenangan birokrasi itu sendiri. Atas dasar ini, maka kebertanggungjawaban (*accountability*) dari birokrasi dalam menjalankan tugasnya sangat esensial sifatnya. Oleh karena itu, pembaharuan administrasi akan berkaitan erat dengan peningkatan kebertanggungjawaban dalam proses pengambilan keputusan atau dalam hal bagaimana sumberdaya instrumental di mobilisasi untuk mencapai tujuan.

4 . Peran Administrasi Pembangunan

Pembangunan pada hakikatnya adalah dari dan untuk seluruh rakyat. Dengan demikian dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dituju harus melibatkan dan pada gilirannya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Tuntutan ini sesungguhnya berteepatan atau sesuai dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*).“Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk Mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang, saling mengisi , saling melengkapi dalam 1 kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional “. Itulah hakekatnya peran administrasi negara dalam pembangunan di Indonesia”. (Kartasamita, 1996:67)

Banyak kegiatan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah setidak-tidaknya pada tahap awal pembangunan yang paling utama adalah

pembangunan prasarana dasar, baik prasarana ekonomi maupun sosial. Prasarana ekonomi meliputi perhubungan dan transportasi, energi, irigasi, pasar, dan sebagainya. Prasarana sosial mencakup prasarana pendidikan seperti sekolah-sekolah dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit. Pembangunan yang berkelanjutan menuntut administrasi publik yang tanggap terhadap masalah yang di hadapi lingkungan masyarakat, baik itu lingkungan fisik alam, lingkungan ekonomi maupun lingkungan sosial.

Suatu pembangunan dapat berkesinambungan apabila ekonomi rakyat berkembang dengan basis perekonomian yang lebih luas (tidak terpusat, pada perorangan, sekelompok orang/perusahaan tertentu), ketahanan perekonomian nasional terhadap guncangan-guncangan ekonomi eksternal dan internal menjadi lebih kukuh. Inti dari semua itu adalah pentingnya untuk mengembangkan ekonomi rakyat dan sekaligus mengamankan keberlangsungan pembangunan nasional. Posisi penting pengembangan ekonomi rakyat bagi pembangunan yang berkelanjutan menunjukkan adanya keterpaduan antara pemerataan dan pertumbuhan” karena administrasi publik pada hakekatnya merupakan *the administration of societal change/ the management of social change*, maka menjadi relevan bagi administrasi publik untuk memahami pembanguna tadi, pembangunan menjadi *ecological base* bagi administrasi publik (Kartasasmita,2007 :5).

Dalam ekonomi yang semakin terbuka dan berorientasi pasar sesungguhnya peranan pemerintah yang lebih besar makin dituntut untuk lebih di curahkan pada upaya pemerataan. Terlebih lagi tujuan bernegara adalah mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ekonomi yang di cita-citakan adalah

yang mengutamakan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang itu adalah dasar-dasar yang sudah diterima dan harus di pedomani administrasi negara Indonesia artinya administrasi negara tidak boleh netral dan harus berpihak kalau berhadapan dengan masalah keadilan sosial dan kepentingan rakyat banyak.

Bantuan kepada daerah dan masyarakat di arahkan untuk memberdayakan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga mampu meningkatkan peran nyata dalam melaksanakan pembangunan. Upaya mengkombinasikan kebijaksanaan dan pengeluaran pembangunan yang berlandaskan pada pendayagunaan investasi pemerintah, pemerintah daerah masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peranan administrasi dalam pembangunan di mana peran masyarakat telah tumbuh menjadi lebih besar. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan tidak hanya melalui investasi langsung pemerintah, tetapi juga bahkan makin penting dan besar peranannya, melalui kebijaksanaan pembangunan yang mendorong berkembangnya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena administrasi publik pada hakekatnya merupakan *the administration of societal change/ the management of social change* (proses perubahan sosial yang terencana), maka menjadi relevan bagi administrasi publik untuk memahami pembangunan.

5. Sasaran Pembangunan Administrasi

Menurut Siagian dalam bukunya yang berjudul “ Administrasi Pembangunan (2003:168)” ada berbagai sasaran pembangunan administrasi, di antaranya adalah :

a. Pengembangan Kelembagaan

Pembahasan tentang aspek kelembagaan sebagai salah satu sasaran pembangunan administrasi dengan sengaja dan secara sadar dibatasi pada organisasi di lingkungan eksekutif pemerintah negara, dan tidak termasuk aspek kelembagaan legislatif dan juga tidak yudikatif. Pembatasan yang dilakukan bukan karena aspek organisasional di kedua lembaga konstitusional tersebut tidak penting, akan tetapi hanya karena yang menjadi sorotan perhatian adalah pembangunan administrasi di lingkungan birokrasi pemerintahan. Dalam hal pengembangan kelembagaan, ada beberapa hal yang terkait di dalamnya salah satunya adalah mekanisme dan prosedur kerja. Pentingnya kejelasan mekanisme dan prosedur kerja berkaitan erat dengan pengelolaan suatu organisasi. Dikatakan demikian karena tiga alasan pokok, antara lain :

Pertama, mekanisme dan prosedur kerja merupakan “peraturan permainan” yang harus ditaati dalam penyelesaian tugas lintas sektoral dan multidimensional. Karena ini menyangkut interaksi, interdependensi, dan koordinasi antar instansi di samping berlaku secara internal dalam lingkungan satu-satuan kerja.

Kedua, kebenaran pandangan ini juga dapat terlihat dari teori organisasi yang mengatakan bahwa dalam menjalankan roda suatu organisasi, harus terjawab

pertanyaan-pertanyaan : (a) siapa yang melakukan kegiatan apa, (b) siapa bertanggung jawab kepada siapa, (c) siapa berinteraksi dengan siapa, (d) jaringan informasi apa yang terdapat dalam organisasi, dan (e) saluran komunikasi apa yang tersedia bagi siapa dan untuk kepentingan apa.

Ketiga, kejelasan mekanisme dan prosedur kerja berkaitan erat dengan transparansi dan keterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan fungsi dan kegiatannya, termasuk dalam hal penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perumusan dan penentuan kebijaksanaan, penegakan disiplin masyarakat, dalam memberikan pelayanan umum kepada semua masyarakat luas.

Perlu tekanan bahwa (a) secara implisit kejelasan mekanisme dan prosedur kerja juga mengandung pengertian kesederhanaan, baik dalam arti proses perumusannya maupun materinya, (b) mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan disebarluaskan kepada pihak-pihak yang akan menggunakan dan menjadi objeknya, (c) perlu konsistensi dalam penerapannya, (d) ketaatan penuh semua pihak mutlak diperlukan, dan (e) kejelasan sanksi disiplin bagi yang melanggarnya.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dapat ditegaskan bahwa dalam organisasi apapun, termasuk berbagai satuan kerja di lingkungan pemerintah, sumber daya manusia merupakan sumber yang paling strategis. Berbagai alasannya adalah sebagai berikut : *pertama*, bukan zamannya lagi untuk memperlakukan manusia hanya sebagai salah satu “alat produksi”. Memang benar bahwa berbagai sumber dan daya lain tetap penting dan

diperlukan. Seperti dimaklumi yang dimaksud dengan sumber dan daya lain itu adalah dana (uang), mesin termasuk yang paling canggih berkat kemajuan teknologi materi, sebagai bahan mentah atau bahan baku untuk diolah menjadi produk tertentu, metode kerja, pasar bagi dunia bisnis, pasar, energi, waktu dan informasi yang dewasa ini sering disebut sebagai “aset yang kritikal sifatnya” bagi suatu organisasi. Akan tetapi berbagai sumber tersebut hanya merupakan sarana dan prasarana kerja yang memungkinkan organisasi melaksanakan tugasnya. Perlu disadari bahwa pada dirinya sendiri berbagai sumber dan daya tersebut hanya merupakan “benda mati” dan berubah menjadi “alat yang hidup” apabila digerakkan dan digunakan oleh manusia.

Kedua : pentingnya sumber daya manusia juga terlihat dari kenyataan bahwa karena manusia mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh sumber daya lain, seperti harkat dan martabatnya yang mutlak perlu diakui dan dihargai, akal dan nalarnya yang membuatnya mampu berpikir konstruktif atau destruktif, kebutuhannya yang makin lama makin kompleks yang pada gilirannya membuat pemuasannya menjadi lebih sulit, latar belakangnya yang khas seperti tercermin pada karakteristik biografikalnya, kepribadiannya, kemampuannya, sistem nilai yang dianutnya, persepsinya mengenai makna kehidupan organisasional, dan motivasinya.

Ketiga: “predikat” yang umum diberikan kepada manusia menggambarkan bahwa manusia merupakan makhluk yang sangat kompleks karena manusia dikenal sebagai insan politik, insan ekonomi, makhluk sosial, dan sebagai individu dengan ciri-ciri yang khas dan tidak ada “duplikatnya” di dunia sehingga meskipun suatu

negara bangsa, misalnya tidak “mengagungkan” dan sebagai individu dengan ciri-ciri yang khas dan tidak ada “duplikatnya” di dunia sehingga meskipun suatu negara bangsa, misalnya, tidak “mengagungkan” dan bahkan menolak paham individualisme, individualitasnya setiap orang harus diterima dan diakui.

Keempat : dalam melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, penting bagi para pejabat pimpinan untuk menyadari bahwa dengan perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan sekalipun, pengenalan manusia secara paripurna belum terjadi. Yang sudah diketahui ialah bahwa tidak ada manusia yang benar-benar konsisten dalam perilaku organisasionalnya. Ketidakkonsistenan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti jenis pekerjaannya, suasana di tempat pekerjaan, bakatnya, minatnya, persepsinya tentang kepentingannya, waktu dan pengalamannya.

Hal-hal yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa keberhasilan seorang pejabat pimpinan dalam menjalankan dan mengemudikan roda organisasi sangat tergantung pada kemampuannya untuk meramalkan, mengenali, dan mengarahkan perilaku para bawahannya sehingga benar-benar mampu bekerja secara efisien, efektif, dan produktif antara lain dengan menampilkan perilaku yang positif dan menghindari perilaku yang negatif.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pengembangan sumber daya manusia harus dijadikan sebagai salah satu sasaran pokok dalam pembangunan administrasi.

c. Pengembangan kemampuan (*capacity building*)

Telah ditekankan bahwa jika dikaitkan dengan transparansi, keterbukaan, orientasi pelayanan, perubahan tuntutan masyarakat, perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta kesediaan menerima perubahan dengan segala implikasinya, menuntut seluruh aparat pemerintah untuk meningkatkan segala pengetahuan dan keterampilannya. Salah satu wahana yang paling efektif untuk melakukannya ialah melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Dalam kaitan ini perlu ditekankan bahwa bagi para karyawan pendidikan dimaksudkan sebagai bagian dari strategi pengembangan, bukan pembentukan. Dikatakan demikian karena secara teoritikal, pembentukan sudah seharusnya terjadi pada proses belajar-mengajar di lingkungan lembaga pendidikan formal, bukan setelah mereka memasuki lapangan pekerjaan.

Hal yang sangat mendasar untuk dijadikan titik tolak berpikir tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen pengembangan kemampuan ialah bahwa karena perkembangan ilmu pengetahuan yang demikian pesat, pengetahuan seseorang menjadi ketinggalan zaman dalam waktu yang relatif sangat singkat dan oleh karena itu perlu selalu dimutakhirkan.

Di lingkungan birokrasi pemerintahan dikenal berbagai jenis pendidikan dan pelatihan seperti pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan perjenjangan yang diperuntukkan bagi mereka yang menduduki jabatan struktural, pendidikan, dan pelatihan fungsional yang menyangkut bidang tugas fungsional suatu instansi tertentu dan pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis. Tanpa mempersoalkan jenis pendidikan dan pelatihan tersebut, yang jelas ialah bahwa program pendidikan dan pelatihan sudah waktunya diselenggarakan apabila : (a) terlihat gejala penurunan produktivitas kerja, (b) motivasi para karyawan tampak

menurun, (c) para karyawan makin sering berbuat kesalahan dalam penyelesaian tugas dan oleh karena itu sering ditolak oleh atasan.

B. Peranan Pemerintah

Pemerintah yang berdaulat diperlukan sebagai organ dan fungsi yang melaksanakan tugas-tugas esensial dan fakultatif negara. Pemerintah dalam arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintah yang melaksanakan fungsi negara. Dalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah yang berdaulat yaitu gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit yaitu pemerintah yang berdaulat adalah suatu badan yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri. (Budiyanto,2000)

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 32 tahun 2004, pemerintah dibagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah presiden republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara republik indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah Daerah dapat berupa pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah daerah provinsi terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Pemerintah daerah kabupaten atau kota terdiri dari pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota. Pemerintah

daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang di angkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Hakekat negara adalah penegakan atau pemaksaan: kemampuan pemungkas mengirim seseorang dengan seragam dan piston untuk memaksa orang-orang mematuhi undang-undang negara (Francis Fukuyama, 2005, h8). Peran negara harus dipahami dalam dua dimensi, yaitu cakupan (*scope*) maupun kekuatan ataupun kapasitas. Indikator negara kuat ditandai dengan sejauh mana kemampuan negara menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang dilahirkan ditaati oleh masyarakat tanpa harus menebarkan ancaman. Dengan kata lain negara yang kuat adalah negara yang mampu meminimalisir penggunaan kekerasan dan paksaan. Untuk itu dibutuhkan otoritas yang efektif dan terlembaga.

Negara yang kuat dan negara yang lemah memiliki cakupan peranan yang berbeda, dan tidak secara otomatis berhubungan. Cakupan ini ditentukan seberapa jauh negara melakukan atau tidak melakukan kegiatan publik tertentu misalnya, kesehatan, pendidikan, pertahanan, keamanan, memungut pajak, melakukan intervensi dan regulasi ekonomi dan lain sebagainya. Dalam hal ini fukuyama

mengajukan konsep untuk memperkuat negara dan menyimpulkan bahwa cakupan tugas negara (pemerintah) itu lebih baik sempit tetapi kuat.

Untuk mengetahui peran negara yang kuat, Fukuyama menawarkan dua perangkat alat analisis yaitu lingkup (*scope*) dan kekuatan atau kapasitas (*strength*) negara. Menurutnya, lingkup aktivitas negara harus dibatasi. Namun dalam lingkup terbatas itu, negara harus mampu menegakkan hukum dan aturan kebijakan lainnya. Sementara kekuatan negara terletak pada kemampuan, merencanakan, menjalankan, dan memberlakukan undang-undang secara bersih dan transparan (kemampuan institusional).

Dalam praktek bernegara di Indonesia, jika menggunakan kaca mata dimensi Fukuyama, negara ini dicirikan oleh lingkup fungsi yang luas, meski dengan keterbatasan kemampuan dan kekuatan. Justru di sini awal dan sumber aneka persoalan, yaitu fungsi negara yang luas tidak diiringi kemampuan negara untuk menyediakan berbagai kebutuhan dasar publik dan lemahnya penegakan hukum. Negara gagal melindungi kaum miskin dan meningkatkan keadilan karena kondisi birokrasi yang tidak efisien dan tidak efektif serta hilangnya sumber kekayaan negara karena tidak terkontrolnya penyakit KKN oleh penegak hukum. Mesin negara yang tidak efisien, tidak efektif, korup, dan tidak sensitif.

Reformasi di Indonesia berupaya membalik keadaan yang semula sentralistis menjadi keadaan desentralisasi serta otoriterisme di ubah menjadi demokratis. Selain itu muncul perubahan pendekatan yang semula dari “atas ke bawah” menjadi bawah ke atas”. Munculnya reformasi di Indonesia menuntut

pemerintah daerah untuk lebih berperan lagi dalam membangun masyarakat dan daerahnya.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras.

Dalam pembangunan nasional, pemerintah beserta seluruh aparturnya tidak hanya bertanggung jawab dalam penyusunan kebijaksanaan, strategi, rencana, program dan proyek akan tetapi juga dalam seluruh segi proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional, sehingga peranan pemerintah sangat penting dalam pembangunan. Peranan pemerintah terlihat dalam lima wujud utama (Siagian, 1984, h. 194-202), yaitu sebagai berikut :

1. Selaku modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi.
2. Selaku katalisator, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalisir, dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.

3. Selaku dinamisator, bahwa pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditujukan dengan sikap, tindak-tanduk, perilaku dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.
4. Selaku stabilisator, bahwa pemerintah adalah stabilisator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program, kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.
5. Selaku pelopor, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusun rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

Adanya kegagalan pasar membuat peran pemerintah diperluas, berkembang menjadi tiga fungsi yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (*Musgrave dan Musgrave dalam Muluk, 2006, h.58*). fungsi alokasi menunjukkan pada peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan *public goods* atau dengan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan, baik secara *private* maupun *public goods* dan menentukan komposisi dari *public goods*.

Regulasi yang dilakukan pemerintah termasuk dalam fungsi alokasi. Fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna menjamin terpenuhinya kondisi yang adil

dan merata. Fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat.

Pada kenyataannya meskipun peranan pemerintah mulai menguat ternyata masih menimbulkan persoalan karena pemerintah itu sendiri juga belum sempurna, pemerintah masih gagal dalam memberikan pelayanan publik secara efisien, merata dan memuaskan. Untuk mengatasi kegagalan pemerintah dan mekanisme pasar, Sebagaimana dikutip oleh Muluk dari Osborne dan Gaebler (2006, h.59). Mengusulkan agar pemerintah berorientasi pada pasar (*market-oriented government*), ini bukan berarti pemerintah menggunakan mekanisme pasar dalam tugas-tugas ke pemerintahannya, Tetapi lebih ditujukan agar pemerintah dapat menyelesaikan lebih banyak tugas daripada ketika menggunakan pendekatan komando atau kontrol.

Dalam Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Peran Pemerintah daerah Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional yaitu,

- a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional
- c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi

Pasar Tradisional;

- d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional (*Evaluate the management of Traditional*)

C. Kerangka Teoritik Pelayanan Publik

Pelayanan publik tidak lepas dari administrasi publik yang diterapkan banyak Negara. Pelayanan publik merupakan salah satu isu atau tujuan penting dari administrasi publik yang meliputi penyelenggaraan jasa-jasa publik, urusan-urusan publik (kebutuhan dan kepentingan publik) serta pemberian pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam perjalanannya tentang konsep pelayanan publik yang bisa digunakan untuk mengkaji pelayanan publik (Janet Denhardt & Robert Denhardt, 2003, dalam Luthfi,2008). Ketiga perspektif tersebut adalah: *pertama*, teori administrasi lama (*old public administration*), *kedua*, teori Administrasi Baru (*New Public Management*) dan ketiga adalah *New Public Service*.

1. Teori Administrasi Lama (Old Public Administration)

Fenomena praktek pelayanan publik dalam OPA menggambarkan bahwa hubungan pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan publik dengan publiknya semata-mata sebagai klien, konstituen dan atau sebagai pelanggan yang harus dipuaskan. Pemerintah sendiri secara politis berusaha mendefinisikan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan publik tanpa melibatkan publik. Setelah itu, pemerintah menganggap dirinya sebagai satu-satunya institusi yang mengetahui, memiliki sumber daya dan mempunyai kemampuan memecahkan

masalah publik. Oleh karena itu, pemerintahlah yang paling legitimate untuk memberikan pelayanan kepada publik dan untuk mendukung pelaksanaan peran pemerintah cenderung menggunakan organ-organ pemerintah yang sudah ada.

Perilaku pelayanan tersebut diatas diiringi juga dengan pendekatan birokratis yang mengandalkan hubungan hirarkial serta ketaatan yang bersifat *top-down*. Implikasinya adalah bahwa model pertanggungjawaban akan terbatas pada atasannya, kliennya ataupun pelanggan. Karena tingginya tuntutan kepatuhan terhadap atasannya maupun prosedur yang sudah ditetapkan, maka pada umumnya diskresi pejabat publik untuk mengembangkan cara-cara terbaik dalam pelayanan publik terbatas.

2. Teori Administrasi Publik Baru (New Public Management)

Gelombang manajemen sektor publik dimulai lebih dari dua dekade yang lalu yang dikembangkan di Negara maju. Dalam konteks ini, NPM muncul sebagai the new managerialism yang terefleksikan dalam pergeseran dari kebijakan dan administrasi ke manajemen. Dalam NPM, praktek pelayanan publik berdasarkan pertimbangan ekonomi yang rasional atau kepentingan pengambil keputusan. Kebutuhan dan kepentingan publik dirumuskan sebagai agregasi dari kepentingan-kepentingan publik. Publik diposisikan sebagai pelanggan (*customer*) sedangkan pemerintah berperan mengarahkan (*steering*) pasar. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan perlu diciptakan

mekanisme dan struktur social yang mendukung yakni melalui organisasi-organisasi privat atau non profit. Pendekatan akuntabilitas berdasarkan *market-driven* yang bisa ditentukan dari akumulasi kepentingan-kepentingan masyarakat atau kelompok masyarakat (*customers*) yang lebih besar. Dan untuk mencapai tujuan pelayanan, organisasi publik yang memberikan pelayanan mendapat ruang gerak yang lebih luas.

3. *New Public Service* (NPS)

Dalam perspektif NPS, dasar-dasar teoritis yang ingin digunakan berkaitan dengan teori-teori demokrasi dengan berbagai pendekatan yang positivistic, intrepetatif dan juga kritis. Pelayanan publik dikembangkan berdasarkan upaya untuk memenuhi dan mengakomodasi nilai-nilai kebutuhan dan kepentingan publik yang di definisikan melalui proses dialog publik yang rasional dengan pertimbangan politik, ekonomi maupun organisasional. Dengan demikian, peran pemerintah adalah melayani (*servng*) dan posisi publik bukan lagi sekedar klien, konstituen ataupun pelanggan, tetapi lebih sebagai warganegara (*citizen*). Materi pelayanan publik lahir dari apa yang menjadi kebutuhan publik, sedangkan bentuk dan pelaksanaan pelayanan publik merupakan hasil kesepakatan antara stakeholder. Oleh karena itu, pelaksanaan tanggungjawab oleh Negara kepada rakyatnya dalam pemenuhan hak-hak dasar perlu dipertegas untuk mencapai tersebut.

Dan untuk mendukung akuntabilitas pelaksanaannya dalam pencapaian tujuan, maka seluruh proses kerja tersebut harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, nilai publik yang kita sepakati, norma-norma politik yang etis, standar professional dan kepentingan publik. Setiap penyelenggara memiliki diskresi untuk mengoptimalkan perannya, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian pelayanan publik merupakan tanggungjawab Negara yang penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh berbagai kalangan yang dikembangkan sebagai kontribusi untuk menyelenggarakan urusan-urusan publik dan memberikan pelayanan publik secara adil dan tanpa diskriminasi.

D. Fungsi Manajemen Publik

a. Public Planning

Definisi mengenai perencanaan sangat banyak karena terletak pada kenyataan, bahwa kegiatan merencanakan ditemukan dalam semua ungkapan kehidupan sehari-hari. Perencanaan dapat diuraikan sebagai penentuan tindakan untuk waktu yang akan datang, dan jika perencanaan itu kita perlukan lebih metodis, maka kita dapat menguraikannya dengan pengkoordinasian kegiatan-kegiatan yang akan datang pada waktunya. (Syafiie : 2006)

Menurut F.X Soedjadi, MPA dalam Syafiie, perencanaan merupakan proses kegiatan pemikiran, dugaan dan penentuan prioritas yang harus dilakukan secara rasional sebelum melaksanakan tindakanyang sebesarnya dalam rangka mencapai

tujuan yang sudah ditetapkan. Selain itu perencanaan merupakan kegiatan-kegiatan rohaniah sebelum melakukan tindakan jasmaniah. Jadi amat diperlukan dalam rangka mengarahkan tujuan sasaran organisasi maupun tujuan suatu program pembangunan sebab daripadanya dipaparkan pula tentang kebutuhan penggunaan tenaga kerja, biaya waktu, peralatan, dan sumber-sumber lainnya.

Public Planning berarti pembuatan penetapan melalui proses pengambilan keputusan mengenai kegiatan publik dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu di masa depan secara terarah sesuai tujuan yang ditetapkan bersama, karena perencanaan publik tersebut bersifat kegiatan masyarakat umum secara keseluruhan, dipimpin oleh pemerintah dalam arti luas sebagai administrator publik.

b. *Public Actuating*

Pelaksanaan kerja sama sudah barang tentu yang paling penting dalam fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar semua kelompok mulai dari tingkat teratas sampai terbawah, berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan semula, dengan cara terbaik dan benar.

c. *Public Controlling*

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan, walaupun secara tidak sengaja tetap ke arah yang lebih baik, hal ini tampak klasik dan tradisional, disebut lepas control. Dengan demikian melalui

pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, penyelewengan, dll kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

d. *Public Coordinating*

Koordinasi adalah penyesuaian diri (*adjustment*) dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.

e. *Public Leading*

Secara etimologi, kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Berasal dari kata dasar “pimpin” berarti bimbingan atau tuntun. Dengan demikian, di dalamnya ada dua pihak, yaitu yang dipimpin dan yang memimpin
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi “pemimpin” berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak untuk mencapai tujuan tertentu
3. Apabila ditambah akhiran “an” menjadi pimpinan, artinya orang-orang yang mengepalai. Antara pemimpin dan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan cenderung lebih sentralistis, sedangkan pemimpin cenderung lebih demokratis.
4. Setelah dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi kepemimpinan yang berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses

kelompok.

E. Pasar

1. Pengertian Pasar

Peraturan Daerah kabupaten Malang nomor 10 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum menyebutkan bahwa pengertian pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, dengan tempat usaha berupa toko, kios, bedak, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki/dikelola dengan Hak Pemakaian Pasar.

Pada mulanya istilah pasar dikaitkan dengan pengertian tempat penjual dan pembeli bersama-sama melakukan pertukaran. Menurut Philip Kotler (1995:14) pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu. Pasar juga bisa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dan besarnya pasar tergantung dari jumlah orang yang memiliki kebutuhan, mempunyai sumber daya yang diminati orang lain dan mau menawarkan sumber daya itu untuk ditukar supaya dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian istilah pasar itu dikaitkan dengan pengertian ekonomi yang mewujudkan pertemuan antara penjual dan pembeli.

Secara teoritis dalam ekonomi, pasar menggambarkan semua pembeli dan penjual yang terlibat dalam transaksi aktual dan potensial terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Transaksi potensial ini dapat terlaksana apabila kondisi berikut ini terpenuhi, yaitu :

1. Terdapat paling sedikit dua pihak
2. Masing-masing pihak memiliki sesuatu yang mungkin dapat berharga bagi pihak lain
3. Masing-masing pihak mampu untuk berkomunikasi dan menyalurkan keinginannya
4. Masing-masing pihak bebas untuk menerima atau menolak penawaran dari pihak lain. (Assauri 2004 :75)

Sedangkan Moekijat (1982:146) memberikan pengertian pasar sebagai berikut : “ pasar adalah suatu persetujuan antara penjual dan pembeli untuk memudahkan hak milik sesuatu barang atau jasa, suatu pasar adalah suatu golongan (arena) untuk pertukaran-pertukaran potensial.” Lebih lanjut memberikan pengertian pasar sebagai berikut: “pasar pada umumnya adalah waktu dan tempat guna membeli dan menjual barang dan jasa. Suatu tempat atau rangkaian keadaan yang mengumpulkan para pembeli dan penjual, baik yang berhadapan muka satu sama lain ataupun melalui suatu alat perantara, agen pedagang perantara dan seterusnya untuk melakukan pembelian, penjualan barang, dan jasa.”

2. Jenis dan Macam Pasar

Pasar merupakan kegiatan penjual dan pembeli yang melayani transaksi jual-beli. Pasar dibagi menjadi dua:

a. Pasar tradisional

Merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun

suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

Menurut peraturan presiden republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pasar tradisional di definisikan sebagai : “pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.”

Pasar merupakan pusat belanja versi tradisional (Ma'ruf,2006). Di setiap kota, kecamatan, sampai pada tingkat desa, pasar dapat ditemukan. Dalam suatu pasar tersedia berbagai gerai dengan segala macam produk yang diperlukan masyarakat, dari barang kebutuhan sehari-hari hingga produk tahan lama (tempat tidur, televisi). Pasar terdiri dari kios-kios di bagian dalam dan toko-toko di bagian luarnya yang menghadap jalan. Pasar di daerah perkotaan akan menyediakan segala kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut di atas juga di dukung oleh Wikipedia (2007) yang menyatakan bahwa pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan

pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi antara penjual dan pembeli secara langsung di dalam bangunan yang bangunan tersebut biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan barang-barang atau produk yang dijual berupa kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan pada umumnya terletak di dekat atau bahkan di kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

b. Pasar modern

Pasar Modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat tabel harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan-makanan seperti : buah, sayuran, daging, sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan dan hypermaket, supermarket, dan minimarket. (<http://id.wikipedia.org>)

Pasar modern biasanya merupakan pusat belanja seperti plaza, mall, department store dan sejenisnya yang pengelolaannya dengan menggunakan metode manajemen modern, yang di dukung dengan teknologi modern, serta mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja, space atau ruangan tempat berjualan disewakan berdasarkan kontrak atau dijual kepada pihak lain sebagai

tempat usaha dengan manajemen pengelolaan gedung tetap berada disatu tangan dan bermodal relatif kuat.

3. Fungsi dan Peran Pasar

Pasar memiliki lima fungsi utama. Kelima fungsi ini menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap sistem ekonomi (Sudarman, 2001, hal 16). Fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut:

- a. Pasar menetapkan nilai (*sets value*). Dalam ekonomi pasar, harga merupakan ukuran nilai. Fungsi ini memecahkan masalah penentuan apa yang harus dihasilkan oleh suatu perekonomian. Barang yang relatif lebih tinggi dibandingkan barang yang tidak diinginkan masyarakat. Produsen menghasilkan barang yang lebih diinginkan masyarakat akan mendapat keuntungan yang lebih besar.
- b. Pasar mengorganisasi produksi. Dengan adanya harga-harga faktor produksi di pasar, maka akan mendorong produsen untuk memilih metode produksi yang paling efisien. Dalam ilmu ekonomi dianggap bahwa antara faktor-faktor produksi selalu mempunyai kemungkinan substitusi. Apabila salah satu faktor produksi mengalami peningkatan harga, maka produsen akan berusaha mencari faktor produksi pengganti. Fungsi pasar ini menunjukkan bagaimana cara menghasilkan barang.
- c. Pasar mendistribusikan barang. Kemampuan seseorang untuk membeli suatu barang tergantung dari tingkat pendapatannya. Pendapatan seseorang selain tergantung dari jumlah faktor produksi yang dimiliki juga

tergantung pada harga dari faktor produksi tersebut. Fungsi ketiga ini menjelaskan untuk siapa barang tersebut dihasilkan.

- d. Pasar berfungsi sebagai penyelenggara penjatahan. Dalam jangka waktu tertentu jumlah produksi yang tersedia menjadi terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dilakukan penjatahan. Apabila terdapat barang dengan jumlah yang relatif sedikit maka tingkat harganya akan relatif tinggi dan pada akhirnya akan membatasi tingkat konsumsi.
- e. Pasar mempertahankan dan mempersiapkan keperluan masa yang akan datang. Tabungan dan investasi semuanya terjadi di pasar dan keduanya merupakan usaha untuk mempertahankan dan mencapai kemajuan perekonomian.

Sejalan dengan ide dasarnya, peran dan fungsi pasar adalah sebagai locus transaksi untuk mengurangi ketidaksetaraan informasi, menekan biaya transaksi, dan meningkatkan kepercayaan (*trust*). Pasar melalui mekanisme harga diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk memecahkan masalah pokok ekonomi yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Secara ideal, mekanisme pasar dipandang paling dapat dipercaya, efektif dan efisien. Karena esensi dari pasar adalah transaksi, maka pasar harus bisa mengeliminasi segala sesuatu yang mengganggu kelancaran transaksi. Sampai saat ini pasar dalam ranah ekonomi masih dipandang sebagai lembaga yang paling penting untuk memecahkan seputar masalah ekonomi tersebut, walaupun fungsi dan peran pasar antara kenyataan dan praktek sehari-hari bila disandingkan dengan ide dasarnya menunjukkan banyak beda kesenjangan.

Baik dalam lingkup global maupun mikro, fungsi dan peran pasar tidaklah akan pernah sempurna, karena secara genetic terkandung penyakit paradigma kapitalis dan dalam realitas mekanismenya pasar selalu terbawa informasi yang tidak utuh.

Menurut sudut pandang yang lain, Sofyan Assauri dalam Leksono Sonny (2009:152) mengemukakan bahwa pasar adalah merupakan arena pertukaran potensial baik dalam bentuk fisik sebagai tempat berkumpul atau bertemunya para penjual dan pembeli, maupun yang berbentuk non fisik yang memungkinkan terlaksananya pertukaran, karena dipenuhi persyaratan pertukaran, diantaranya yaitu adanya minat dan citra yang baik serta daya beli yang memadai. Sesuatu kajian yang bersangkutan paut dengan fungsi dan peran pasar, kiranya akan diperoleh pemahaman yang holistic dan integrative ketika mempertimbangkan terdapatnya mekanisme lain di luar ‘penawaran dan permintaan’ yang realitasnya memang ada bekerja dan utamanya berlangsung menonjol di pasar tradisional. Sehingga, sangkut paut menyertakan berlangsungnya pertukaran pasar dalam konteks perspektif logika memberi dan logika tanda.

Dalam pola pandang ini sesuatu transaksi barang tidak dapat ditarik menurut perspektif yang dikotomis ‘keuntungan yang maksimal, kerugian yang minimal’. Seorang pedagang di pasar tidak sebatas menerima barang dan atau sebaliknya pihak lain tidak hanya menerima uang, terdapat pula kebutuhan sosial yang ingin di dapat dari pihak lain, yakni penghargaan yang bersifat timbal balik, berlangsung dalam hubungan yang setara, terjalinnnya ikatan hubungan personal emosional. Tanpa mengkesampingkan fungsi dan peran pasar untuk memfasilitasi sesuatu transaksi secara efisien serta penuh perhitungan untuk mendapatkan untung,

senyatanya tidak dapat menutup realitas pula jika pasar adalah juga sebagai modus interaksi sosial budaya bahkan pasar juga mengandung fungsi religius sebagai sarana ibadah.

E. Preposisi Penelitian

Berdasarkan Tinjauan Pustaka tersebut di atas, dapat disimpulkan oleh peneliti dalam sebuah preposisi penelitian sebagai berikut :

- 1) Administrasi Pembangunan tidak hanya sebagai sekedar pembangunan tetapi memberikan perubahan dalam peran administrasi pembangunan itu sendiri dan sasaran pembangunan administrasi dalam upaya reformasi administrasi pembangunan pasar.
- 2) Peranan Pemerintah sangat diperlukan, pemerintah harus dapat memberdayakan pasar tradisional melalui upaya-upaya serius dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi pasar tradisional, kelebihan-kelebihan yang dimiliki serta meminimalisir kelemahan-kelemahannya melalui kebijakan daerah yang menjadikan pasar tradisional dapat terus eksis dan berkembang, perbaikan fisik dan penataan pasar serta lingkungannya untuk memberikan kenyamanan terjadinya transaksi di dalam pasar.
- 3) Perbaikan yang dilakukan dalam hal ini sebagai upaya menjaga keberlangsungan pertumbuhan pasar tradisional. Diharapkan nantinya Reformasi Administrasi memperhatikan dua lembaga (masyarakat pasar dan pemerintah) yang harus sama-sama memaknai pasar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Dengan metode penelitian akan didapatkan data informasi yang mendukung analisa dalam penelitian ini. Selain itu juga akan jelas dan terfokus ruang lingkup penelitiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Moleong (2002:6) adalah “penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta dan tidak menggunakan pengujian hipotesa”. Sedangkan metode penelitian kualitatif sebagaimana dikutip oleh Moleong dari Bogmen dan Taylor (2003 : 3) adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati”.

Menurut Moleong (2002 : 27) penelitian kualitatif berakar pada latar belakang ilmiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisis data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak peneliti dan subyek penelitian.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif deskriptif, yang ingin dideskripsikan adalah bagaimana kondisi pasar dampit sebagai pasar tradisional dengan segala bentuk kendala-kendalanya dan kontribusi adanya pasar dampit. Alasan dipilihnya jenis penelitian ini adalah untuk memahami secara aktual mengenai kondisi pasar Dampit, peran pemerintah dalam pengelolaan pasar.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lebih menekankan kepada pengembangan teknik *emic*, karakter utama pendekatan ini adalah mengedepankan makna, mementingkan kedalaman informasi daripada cakupan penelitian sehingga dapat mengungkapkan keunikan, proses-proses subyektif dan memahami makna-makna. Berarti *emic* lebih memandang fenomena dan makna lebih aspiratif (Leksono, 2009). Pendekatan ini mendasarkan pada penyikapan bahwa konsep yang digunakan untuk menegaskan difinitif tentang fenomena yang dikaji, tidak lain dan seharusnya adalah fenomena yang menjadi persepsi subyek pelaku (Pedagang Pasar Dampit dan Pemerintah) sebagai kenyataan. Dengan ini ditegaskan lagi bahwa yang hendak dikaji sebenarnya bukanlah kejadian-kejadian di alam empiris berdasar persepsi peneliti, namun lebih tepat menurut persepsi subyek pelaku (pedagang pasar Dampit) yang kemudian dimaknai sebagai realitas–realitas menurut subyek pelaku pedagang (pasar Dampit tersebut).

Sebenarnya memang keharusan bagi peneliti kualitatif menggunakan pendekatan “perspektif *emic*” artinya dalam memperoleh data bukan sebagaimana seharusnya, bukan berdasarkan apa yang difikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan

sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan yang di alami, dirasakan, dan difikirkan oleh partisipan atau sumber data.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Moleong (2001 : 237) diperlukan dalam kegiatan penelitian karena penentuan fokus mempunyai dua tujuan yaitu :

1. Penetapan fokus penelitian akan membatasi studi yang dibahas oleh peneliti.
2. Penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (memasukkan-mengeluarkan) suatu informasi yang diperoleh dilapangan.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka fokus penelitian yang diambil adalah sebagai berikut :

- 1) Tanggapan *stakeholders* Masyarakat Pasar
 - a. Keberadaan Pasar Dampit bagi Masyarakat Pasar
 - b. Tanggapan Masyarakat Pasar Dampit terhadap:
 - Kebersihan Pasar Dampit
 - Keamanan Pasar Dampit
 - Ketertiban Pasar Dampit
 - Retribusi Pasar Dampit
 - c. Substansi *emic* Pedagang pada *Sustainabilitas* Usaha Berdagang di Pasar Dampit
- 2) Tanggapan *stakeholders* Pemerintah

- a. Keberadaan Pasar Dampit bagi Pemerintah
- b. Tanggapan Pemerintah terhadap:
 - Kebersihan Pasar Dampit
 - Keamanan Pasar Dampit
 - Ketertiban Pasar Dampit
 - Retribusi Pasar Dampit
- c. Substansi *emic* pemerintah terhadap *sustainability* Pasar Dampit

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil lokasi pada pasar Dampit Kabupaten Malang. Alasan pemilihan lokasi penelitian sebab kegiatan pasar ada di pasar Dampit akan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan pengambilan data baik data primer maupun sekunder.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap fenomena yang sesungguhnya terhadap obyek yang diteliti. Dengan demikian situs yang diteliti pada penelitian ini adalah pasar Dampit Kabupaten Malang, UPPD Dampit, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang, dan DPRD Kabupaten Malang.

D. Sumber dan Jenis Data

Penelitian yang dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif

sebagaimana dikutip oleh Moleong dari Lofland (2006 : 157) adalah :“Kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah kata tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut sumber data yang dimaksud adalah menyangkut sumber-sumber informasi yang dapat memperkaya dan memperpadat informasi tentang hal-hal yang menjadi pusat perhatian. Dengan kata lain sumber data adalah menyangkut orang atau pihak yang akan dijadikan sebagai narasumber”.

Menurut Arikunto (2000 : 107) yang dimaksud dengan sumber data adalah merupakan subyek bagi peneliti dalam memperoleh data-data yang diperlukan dan relevan dengan tema penelitian. Berkaitan dengan hal ini maka sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui narasumber yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian maupun permasalahan yang ada yang berupa kata-kata lisan. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari komponen-komponen dari

- a. Individu pedagang pasar Dampit, dilengkapi individu lain yang menjadi rekan dan partner usaha serta pihak-pihak lain yang terkait dengan jaringan kerjanya, masyarakat pembeli di pasar, tukang ojek, dan tukang Delman.
- b. *Key person* maupun pihak yang mendeterminasi kegiatan usahanya, termasuk dalam konteks ini adalah aparat pemegang otoritas pasar.
- c. komponen-komponen dari Kantor UPPD Dampit beserta stafnya, Disperindag dan Pasar, dan juga anggota DPR.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya dilakukan bukan oleh peneliti sendiri melainkan orang lain. Adapun sumber data dapat diperoleh dari dokumen resmi, catatan, laporan atau arsip yang ada pada Kantor UPPD Dampit dan serta dari media massa, makalah serta media-media publikasi yang lain yang dapat memberikan informasi kepada peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan usaha pengumpulan data yang secara langsung mendatangi lokasi penelitian dan mengamati kejadian atau keadaan sebenarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan beberapa literatur, media cetak, makalah seminar atau pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan dialog atau tanya jawab dengan para informan yaitu pihak pemerintah dan masyarakat pasar secara langsung untuk

memperoleh informasi dan keterangan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti,

b. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap obyek penelitian. Dengan observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati sendiri kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Yaitu merupakan teknik untuk memperoleh data sekunder atau informasi dengan cara mencari data yang tepat dalam sejumlah dokumen, laporan-laporan, catatan-catatan maupun inventarisasi arsip pada instansi yang dianggap penting dan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Yang dimaksud instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk menggali data dalam penelitian. Moleong (2000:121) mengatakan bahwa :“Dalam penelitian kualitatif, manusia sebagai instrumen penelitian merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya”.

Adapun yang menjadi instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti itu sendiri, dimana peneliti dapat menangkap fenomena-fenomena yang terjadi mengenai apa yang diteliti. Serta peneliti menggunakan alat panca indera untuk melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.
2. Pedoman wawancara, sebagai kerangka atau dasar dalam mengadakan wawancara dengan aktor yang terlibat sebagai sumber data dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan juga berfungsi sebagai pengarah dalam proses wawancara dengan informan.
3. Alat-alat tulis untuk membantu dalam pencatatan hal-hal yang penting di lapangan, dalam hal ini penulis menggunakan buku tulis dan ballpoint untuk mencatat hasil wawancara dan juga alat bantu rekam.

G. Analisa Data

Analisis data menurut Moleong (2000:190) adalah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

Analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman (1992:16-20), yang terdiri dari tiga komponen analisa, yaitu :

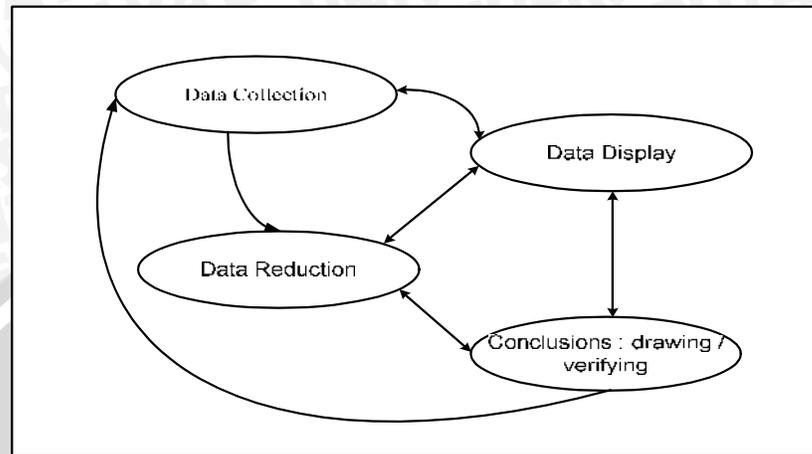
1. Reduksi data (*Data Reduction*) merupakan proses pemilihan, pemusatan

perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data “mentah” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan reduksi. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, meringkas, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasikan.

2. Penyajian data (*Data Display*), penyajian adalah sehubungan informasi yang tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, melalui penyajian nyata, peneliti menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam bentuk yang lebih sederhana atau konfigurasi yang mudah dipahami.
3. Menarik kesimpulan atau menverifikasi (*Conclusion Drawing atau Verifying*), kegiatan ini memberi makna yaitu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab atau akibat proposisi. Verifikasi berarti meninjau ulang catatan-catatan lapangan, bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Makna yang muncul dari atau untuk harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya. Inilah yang disebut validitas.

Berdasarkan uraian analisa diatas maka dalam penyajian data dan dalam penulisan skripsi nantinya peneliti akan merujuk pada poin-poin diatas, sehingga diharapkan skripsi yang akan dibuat lebih terarah dalam proses penulisannya. Jika digambarkan dalam bagan, maka komponen-komponen tersebut akan terlihat pada

gambar 3.1 sebagai berikut :



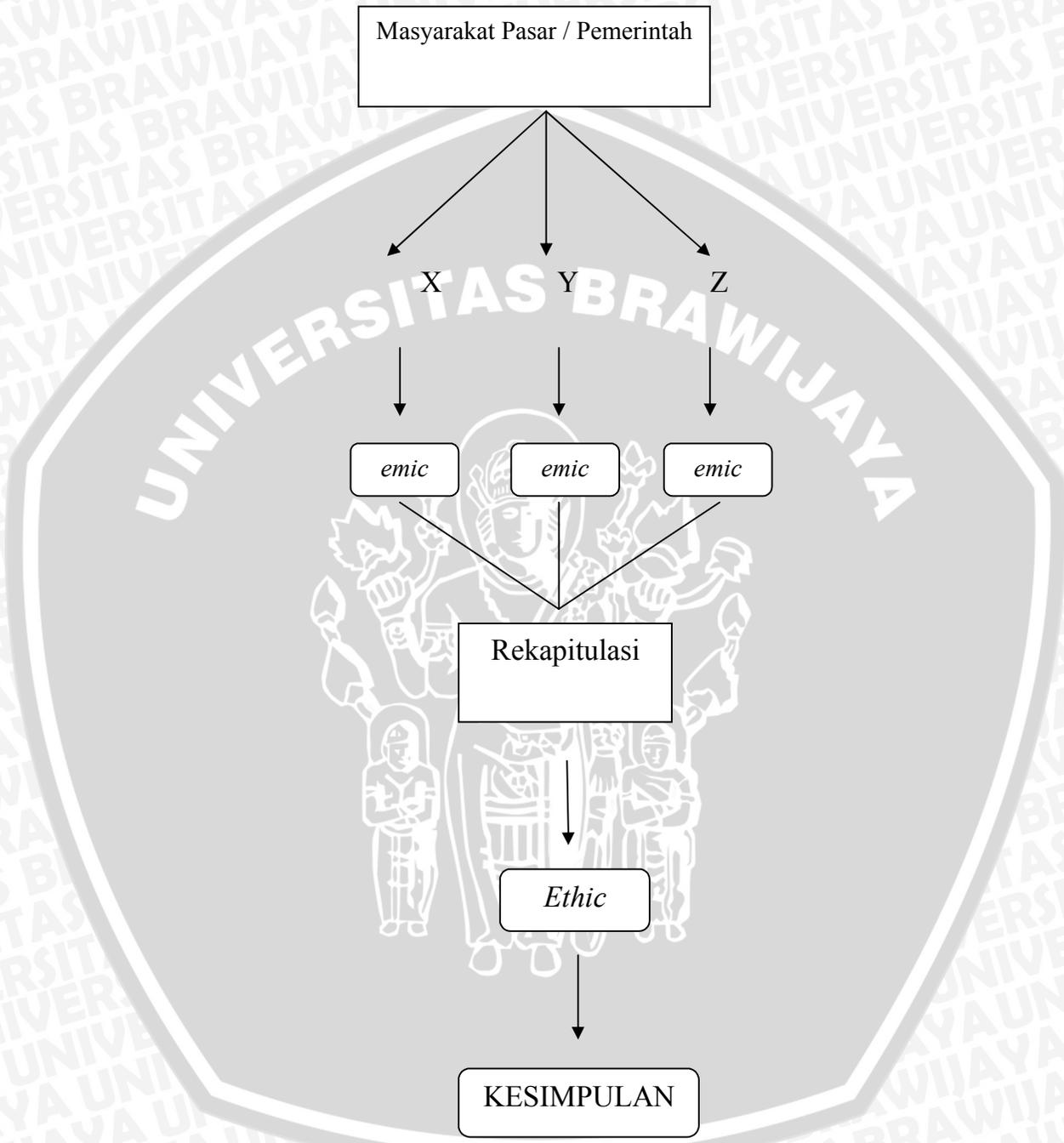
Sumber: Sugiyono (2010 : 247)

Analisa data selain dilakukan secara bertahap juga dilakukan secara interaktif, artinya sejak dari penyusunan usulan penelitian sampai dengan penyusunan laporan akhir. Kegiatan analisis data dilakukan secara berurutan dan saling berhubungan sehingga diperoleh data yang dapat memperkaya dan menambah informasi guna memantapkan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif, karena tidak memakai statistik atau tanpa hitungan dan tidak menguji teori atau hipotesis. Dalam hal ini, yang akan dianalisis adalah kondisi pasar dampit itu sendiri, peran serta pemerintah dalam pengelolaan pasar dampit dan kontribusi pasar Dampit. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data deskriptif. Karena metode yang digunakan deskriptif, maka peneliti akan

menggambarkan dan menjelaskan tentang gambaran kondisi pasar Dampit, peran serta dari pemerintah dalam pengelolaan pasar dan kontribusi pasar Dampit.

Proses pengerjaan analisis dilakukan sejak awal bersamaan dengan saat pengumpulan data berlangsung, menurut perspektif *emic* dan perspektif *ethic*. Informasi *emic* yakni informasi yang disampaikan informan (sebagai aktor subyek pelaku) menurut sudut pandang pelaku pasar itu sendiri, peneliti tidak memaksakan pandangannya sendiri. Peneliti melaksanakan tanpa generalisasi, tidak berstruktur, seolah-olah peneliti tidak mengerti sedikitpun, sehingga dapat memusatkan perhatian penuh pada konsep-konsep atau nilai yang termuat dalam data. Informasi *ethic* (pandangan peneliti) dalam (Leksono,2009) adalah data yang diinterpretasi berdasar sudut pandang peneliti, karena terdapat alasan penting untuk memperoleh data dan informasi tertentu, yang bersumber dari pertanyaan, wawancara dan observasi. Namun ketika harus dikonstruksikan sebuah teori baru maka terhadap data yang bersifat *emic* (pandangan aktor subyek yang diteliti) tersebut memerlukan pengolahan, analisis, interpretasi, pemaknaan tertentu berdasar teori, metode pelaku studi ; maka perspektif yang sedemikian ini adalah bersifat *ethic*. Berikut ini adalah gambaran proses pengolahan data ;



Gambar 3.2 Proses Pengolahan Data

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Aspek geografi

Wilayah kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi dengan koordinat antara 112°17'10,90"-122°57'00,00" bujur timur, 7°44'55,11"-8°26'35,45" Lintang selatan. Luas wilayah kabupaten Malang adalah 3.534,86 km² atau 353.486 ha terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, terdiri dari 33 kecamatan 12 kelurahan, 378 desa, 3217 Rukun Warga (RW) dan 14.718 Rukun Tetangga (RT), yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan dan terletak antara 0-2000m dari permukaan laut.

Wilayah datar sebagian besar terletak di kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum, Gedangan. Wilayah bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing wetan, Wagir dan Wonosari. Daerah terjal perbukitan sebagian besar di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, wajak, Ampelgading, dan Tirtoyudo. Secara administrasi wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Pasuruan, probolinggo, mojoserto, dan Jombang

Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang

Sebelah Selatan: Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri

Lingkar dalam: Kota Malang dan Kota Batu

Kondisi topografis Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada

ketinggian 250-500 meter dari permukaan laut yang terletak di bagian tengah wilayah kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Gunung Kendeng) di bagian Selatan pada ketinggian 0-650 Meter dari permukaan laut, daerah lereng Tengger Semeru di Bagian Timur membujur dari Utara ke Selatan pada ketinggian 500-3600 meter dari permukaan laut dan daerah lereng Kawi Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dari permukaan laut. Terdapat sembilan gunung dan satu pegunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan, dan Barat wilayah Kabupaten Malang : Gunung Kelud (1.731m), gunung Kawi (2.651 m), Gunung Panderman (2.040 m), Gunung Anjasmoro (2.277 m), Gunung Welirang (2.156 m), Gunung Arjuno (3.339 m), Gunung Bromo (2.329 m), Gunung Batok (2.868 m), Gunung Semeru (3.676 m), Pegunungan Kendeng (600 m). Dengan kondisi topografi seperti ini mengindikasikan potensi hutan yang besar, memiliki sumber air yang cukup yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya untuk mengairi lahan pertanian. Memiliki 18 sungai besar, diantaranya Sungai Brantas sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur.

b. Visi dan Misi Kabupaten Malang

1. Visi

Pada Tahun 2015. Terwujudnya Kabupaten Malang Yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing. “MADEP MANTEB”

Penjelasan Visi :

Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu : mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib, dan berdaya asing, artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu masyarakat sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan datang ini di perlukan upaya memujudkan :

1. **Mandiri** : yang dimaknai dengan pertama : kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi SDA dan buatan yang didukung

oleh kemampuan SDM, energi, infrastruktur, dan pelayanan publik. Kedua : kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat *entrepreneurship* untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa *leadership* di kalangan pemerintah dan semangat *entrepreneurship* di kalangan masyarakat luas.

2. **Agamis** : yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keamanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban, dan produktivitas tinggi.
3. **Demokratis** : yang dimaknai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling menghargai perbedaan dalam berfikir, bertindak, maupun pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan.
4. **Produktif** : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah.
5. **Maju** : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas SDM dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.
6. **Aman** : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa

memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.

7. **Tertib** : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
8. **Berdaya Saing** : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya saing daerah dalam rangka menarik minat investor.

Hal ini sejalan dengan pesan filosofis pembangunan dalam sesanti lambang Kabupaten Malang yaitu : *Satata Gama Karta Raharja* atau terwujudnya Kabupaten Malang yang adil dan makmur materiil dan spirituil disertai kerukunan beragama atas dasar kesucian yang langgeng (abadi). Dengan kata lain kemakmuran atau kesejahteraan yang ingin diwujudkan bukan hanya kesejahteraan materiil atau lahiriyah namun juga kesejahteraan secara spiritual dan batiniyah. Kesejahteraan yang utuh itu diyakini dapat dicapai dengan mewujudkan kemajuan secara komprehensif dari 8 kunci tersebut di atas.

2. Misi

Misi adalah implementasi dari keinginan menyatukan langkah dari gerak dalam melaksanakan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemandirian melalui pemberdayaan masyarakat kalangan *wong cilik* di Kabupaten Malang untuk keperluan pemanfaatan potensi sosial dan ekonomi serta untuk mengoptimalkan prakarsa-prakarsa cerdas dalam kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan pembinaan mental spiritual masyarakat di Kabupaten Malang, sehingga kualitas kehidupan beragama tidak hanya ditumpukan pada kesalahan pribadi, tetapi juga tercermin pada menguatkan kesalahan ritual sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang kemudian diterjemahkan dalam kesalahan sosial

3. Meningkatkan pendidikan politik dan hukum kepada masyarakat Kabupaten Malang demi terwujudnya tatanan masyarakat madani yang berkeadaan dengan berlandaskan keadilan dan kebenaran
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Malang melalui reformasi sistem pelayanan kesehatan berdasarkan semangat populisme dan negara kesejahteraan
5. Meningkatkan pendidikan dasar bagi masyarakat Kabupaten Malang untuk keperluan menyongsong era globalisasi yang mem-prasyaratkan adanya kemampuan berpikir secara sistematis dan logis
6. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Malang melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kesetaraan gender
7. Mewujudkan revitalisasi pertanian dan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Malang sebagai bagian penting dari upaya peletakan dasar industrialisasi di pedesaan
8. Mempercepat Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur
9. Membangun sumberdaya manusia yang "Berdaya Saing" tinggi yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.

c. Gambaran Umum Kecamatan Dampit Kabupaten Malang

Dampit adalah sebuah [kecamatan](#) di [Kabupaten Malang](#), [Provinsi Jawa Timur](#). Secara Umum kecamatan Dampit berpotensi menghasilkan Kopi yang bermutu. Dampit terdiri dari 12 Desa atau Kelurahan yaitu :

1. Amadanom
2. Baturetno
3. Bumirejo
4. Dampit
5. Jambangan
6. Majangtengah
7. Pamotan

8. Pojok
9. Rembun
10. Srimulyo
11. Sukodono
12. Sumberoko

Kecamatan Dampit berbatasan dengan:

- Selatan: Sumbermanjing Wetan dan Tirtoyudo
- Barat: Sumbermanjing Wetan dan Turen
- Utara: Turen dan Wajak
- Timur: Tirtoyudo

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

2.1 Gambaran Umum Unit Pengelolaan Pasar Daerah (UPPD) Dampit

Unit Pengelolaan Pasar Daerah Dampit merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan pasar daerah. UPPD Dampit Kabupaten Malang juga merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung terhadap Kepala Daerah atau Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar.

a. Visi Misi UPPD Dampit

Visi : Menuju Pasar yang Tertib, Bersih, Indah, dan Nyaman.

Misi :

1. Penertiban Retribusi Pasar dalam rangka Peningkatkan Daerah.
 - Sosialisasi dan Pelaksanaan retribusi pasar berdasarkan PERDA No. 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum

- Pembinaan pedagang pasar dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
2. Mewujudkan kondisi lingkungan Pasar yang Tertib, Bersih, Indah, dan Nyaman.
 - Pelaksanaan tertib administrasi, pungutan, dan setoran.
 - Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur lingkungan pasar
 - Peningkatan Standar keamanan
 3. Mewujudkan SDM yang produktif dan Berdaya Saing
 - Pembinaan petugas melalui pendidikan dan Pelatihan
 - Meningkatkan performance petugas baik secara fisik dan intelektual.

2.2 Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar merupakan salah satu dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang terbentuk mulai tanggal 29 Pebruari 2008 sesuai dengan Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang, yang merupakan gabungan dari Dinas Pasar yang terbentuk mulai tahun 1991 dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang di dalamnya terdapat Bidang Koperasi, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan serta Bidang Penanaman Modal terbentuk mulai bulan Mei 2004. Sedangkan mulai tahun 2008 untuk Bidang Koperasi dan Bidang Penanaman Modal berdiri sendiri menjadi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkantor di Jl. Trunojoyo Kav. 1 Kepanjen, Kabupaten Malang dan Kantor Penanaman Modal yang berkantor di Jl. Nusa Barong No. 13 Kota Malang, untuk Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan bergabung dengan Dinas Pasar menjadi

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar yang terdiri dari Bidang Industri Logam, Mesin Kimia dan Aneka, Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan, Bidang Perdagangan serta Bidang Pengelolaan Pasar yang berkantor di Jl. Trunojoyo Kav. 6 Lantai II Kepanjen – Kabupaten Malang.

a. Tupoksi

-Tugas

- a. Melaksanakan kewenangan desentralisasi yang berbentuk *database* di bidang perindustrian, perdagangan dan pasar
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Malang sesuai dengan bidang tugasnya

-Fungsi

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan mengumpulkan data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
- c. Pelaksanaan kebijakan daerah dan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
- d. Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
- e. Penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
- f. Pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya
- g. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
- h. Pembinaan kepada masyarakat tentang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
- i. Pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga lain

b. Visi Misi

Visi

Sejalan dengan Visi Kabupaten Malang, maka Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah:

“ Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Produktif dan berdaya saing melalui peningkatan pelayanan industri perdagangan dan pengelolaan Pasar”

Misi

Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah:

1. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan industri dan perdagangan serta meningkatkan daya saing industri kecil menengah
2. Pengembangan dan pembinaan usaha perdagangan , ekspor dan impor dan perlindungan konsumen
3. Meningkatkan pengelolaan pasar untuk mewujudkan pasar yang tertib ,bersih, indah, dan nyaman.

2.3 Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Malang

a. Visi dan Misi

Visi

Mewujudkan DPRD yang kredibel, kapabel, dan akseptabel yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta meningkatkan peran dan fungsi dewan dalam legislatif, anggaran, dan pengawasan.

Misi

1. Meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja lembaga DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan Rakyat.
2. Menjunjung tinggi moralitas agama dalam kapasitas sebagai anggota DPRD.
3. Berpihak kepada kepentingan rakyat/masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme Anggota DPRD sebagai penyalur aspirasi masyarakat.
5. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga Legislatif dengan Eksekutif.
6. Menjadikan Lembaga Dewan sebagai arena ruang publik yang bebas dan bertanggung jawab sehingga masyarakat dapat menyampaikan/menyalurkan aspirasinya.
7. Mendorong terwujudnya hubungan yang strategis antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mendukung terwujudnya tata pemerintah yang baik.
8. Mendorong terwujudnya lembaga Legislatif yang bersih dan berwibawa dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi lembaga DPRD

d. Gambaran Pasar Dampit

Pasar Dampit yang berada di desa Dampit kecamatan Dampit Kabupaten Malang sudah ada sejak lama. Sekitar tahun 1990-an pemerintah ingin merelokasi pasar ke tempat yang lebih luas tetapi masyarakat pasar menolak dan tidak lama kemudian Pasar Dampit terbakar. Pasar Dampit dengan terpaksa di pindahkan sesuai dengan yang telah disediakan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan pihak swasta yaitu PT. Emosi Nasional Indotama tetapi setelah dua tahun PT. ENI mengundurkan diri dan diteruskan oleh PT. Bina Harita Utama Untuk melanjutkan pembangunan Pasar Dampit yang letaknya jadi satu dengan terminal. Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang telah disepakati dengan pemerintah tetapi para pedagang tidak memenuhi syarat angsuran tersebut. Banyak pedagang terhenti dengan alasan para pedagang tidak dapat memenuhi kewajibannya dan akhirnya banyak para pedagang yang masih belum mempunyai SK Karena belum lunas pembayarannya, akhirnya masalah itu berlarut-larut sampai saat ini.

Pasar Dampit selalu tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan sebagai pusat perdagangan. Kondisi fisik bangunan pasar Dampit sampai sekarang cukup baik namun karena kurang terawat sehingga penampilannya terkesan kumuh. Sementara kondisi dalam pasar tidak memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun maupun dari segi kebutuhan sebagai layaknya pasar. Pola sirkulasi penunjang maupun barang saling tumpang tindih, hal ini menyebabkan kemacetan disana sini sehingga rawan terhadap keamanan dan ketertiban baik bagi pedagang maupun pengunjung. Jenis komoditas satu dengan yang lainnya bercampur baur sehingga bagi pedagang sendiri terjadi persaingan tidak sehat. Bagi pengunjung pasar, keadaan ini menimbulkan ketidaknyamanan. Masalah lainnya adalah adanya kesulitan dalam pengendalian keamanan dan ketertiban. Dari segi ketersediaan sarana dan prasarana sebagai pasar satu-satunya di daerah dampit masih belum memadai, seperti lahan parkir, lokasi tempat bongkar muat barang, sirkulasi kendaraan barang dan pengunjung sangat kompleks karena lokasi pasar campur dengan terminal, fasilitas pejalan kaki, pemadam kebakaran maupun kebersihan masih kurang. Di sekitar bangunan pasar banyak terdapat pedagang kaki lima yang tidak tertata sehingga mengakibatkan macetnya arus barang, lalu lintas maupun manusia sehingga menimbulkan suasana tidak aman dan nyaman.

Pasar Dampit kabupaten Malang yang terdiri dari kurang lebih 1.087 jumlah pedagang (buku profil UPPD Dampit) merupakan pusat sarana pelayanan dan jasa serta pusat kegiatan perekonomian desa Dampit dan daerah sekitarnya, mengharuskan adanya kebutuhan khusus dalam mendahulukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Pasar Dampit mempunyai peran strategis baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat Dampit dan sekitarnya. Pasar Dampit sangat berperan dalam penciptaan kesempatan kerja, sumber PAD yang potensial, tempat studi dan pendidikan, serta merupakan barometer perekonomian daerah. Mengingat kondisi dan peranan pasar dampit sebagaimana digambarkan di atas, tuntutan terhadap perbaikan (renovasi) sarana dan prasarana pasar menjadi sangat penting dalam rangka :

- Pemenuhan tingkat kebutuhan masyarakat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- Memenuhi kebutuhan masyarakat luas sebagai salah satu pusat perbelanjaan dan perdagangan dalam usaha memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan lokasi yang relatif mudah.
- Memenuhi kebutuhan masyarakat daerah lain dan sekitarnya.
- Untuk memenuhi kebutuhan pasar yang bersih, nyaman dan sehat
- Memenuhi kebutuhan peningkatan pendapatan pedagang
- Mampu menyerap banyak tenaga kerja.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Tanggapan *stakeholders* Masyarakat Pasar

d. Keberadaan Pasar Dampit bagi Masyarakat Pasar

Indonesia sebagai Negara yang besar penduduknya, memiliki jumlah pasar tradisional yang besar. Kurang lebih 13.450 pasar tradisional di Indonesia. Dari jumlah tersebut mampu menampung sekitar 13 juta pedagang. Namun demikian, dari sekian banyak jumlah pasar tradisional, sekitar 90 % tidak dikelola dengan baik padahal pasar tradisional memberikan nilai positif bagi pembangunan. (Perspektif:2011) Banyak kearifan lokal yang terdapat di pasar tradisional, adanya interaksi yang murni antara pedagang dan pembeli, tawar-menawar yang kadang menggunakan strategi, canda-tawa antar pedagang maupun pembeli, penjual dan pembeli mampu menentukan harga. Secara tidak langsung hal ini membentuk budaya dan pola interaksi khas yang membuat banyak pedagang menjadi akrab dengan pelanggannya.

Dari uraian di atas juga diperjelas dengan pernyataan pedagang pemilik bedak Ojo Dumeh yaitu ;

“Pasar itu tempat orang jual beli, ada transaksi di dalamnya walaupun kelihatannya hanya itu saja pengertian pasar, tetapi terdapat makna dalam di pasar itu, dengan adanya pasar saya bisa bekerja karena saya hanya lulusan SMP, sekarang saya bisa menyekolahkan kelima anak saya min sampai jenjang SMK. Di pasar tempat paling mudah untuk mendapatkan uang walaupun sekarang gak seperti dulu, selain transaksi jual beli kita sesama pedagang saling membantu, dalam bahasa jawa itu dikatakan ‘*guyub*’ kita di sini walaupun ada persaingan usaha tetapi tetap gotong royong dengan pembeli pun kita berusaha untuk menjadikan *seduluran*.”

(Wawancara, Tanggal 19 November 2011, di Pasar Dampit)

Pernyataan di atas bisa memberi pengertian kepada kita tentang pasar tradisional yang memberikan banyak arti. Banyak nilai-nilai budaya dalam pasar tradisional yang tidak bisa dibangun dalam pasar modern. Nilai-nilai moral juga banyak terdapat dalam pasar tradisional antara lain kejujuran, perjuangan hidup, adapula masalah premanisme, semua hal itu menjadi satu dalam suatu tatanan dan membentuk satu kesatuan yang menampilkan ciri khas manusia. seperti yang dikemukakan juga oleh pemilik bedak Nabila bahwa “Pasar mempunyai arti di dalamnya yang sangat kompleks, bagi saya pasar merupakan bagian dari hidup, mulai awal sampai sekarang hidup saya bergantung di pasar. Pasar dampit menjadi bukti nyata perjuangan saya untuk kelangsungan hidup keluarga”. (Wawancara, Tanggal 12 November 2011, di Pasar Dampit)

Tanggung jawab pemerintah salah satunya adalah membuat masyarakat hidup lebih sejahtera, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Pemerintah dituntut untuk kreatif mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya. Pasar Dampit adalah sebuah pasar desa, sebuah pasar yang terdapat di desa Dampit yang penduduknya masih sangat tradisional. Letak pasar Dampit jauh dari kota, maka barang atau komoditi utama yang diperjualbelikan di pasar pada umumnya adalah barang-barang hasil pertanian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pasar Dampit, sarana dan prasarana kurang begitu memadai sehingga masih perlu perbaikan dan

pembenahan secara baik agar para pedagang dan konsumen merasa nyaman dalam menjual dan membeli barang-barang kebutuhan. Pada hakekatnya pasar merupakan tempat kegiatan menumbuhkan motivasi ekonomi setiap masyarakat untuk menyediakan barang dan jasa. Kini para produsen di desa Dampit seperti para petani, peternak dan pengrajin memanfaatkan pasar yang ada di desa Dampit untuk menjual hasil-hasil produksinya, sehingga mereka dengan mudah dapat menjual hasil-hasil produksinya.

Pasar Dampit terletak di pusat desa Dampit diantara beberapa desa, sehingga posisinya sangat strategis. Pada hari pasaran jalanan yang berada di sebelah pasar digunakan oleh para pedagang yang digunakan oleh para pedagang yang kebanyakan para makelar, pemborong, pedagang perantara yang menampung barang-barang produksi hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan dari masyarakat sekitar ataupun pedagang kecil yang menjual hasil-hasil produksinya. Mereka ada yang menjual barang-barangnya hanya di pinggir jalan saja, selain itu karena letak pasar Dampit dekat dengan terminal banyak kendaraan angkutan desa, seperti *pick up* serta mobil angkut yang berasal dari luar desa.

Diakui, bahwa memang pedagang ketika menawarkan barang pada banyak hal juga memberi harga tinggi, namun sudah menjadi khas pula tingkat harga yang dinyatakan pada awal negoisasi sesudah harga itu direspon oleh calon pembeli itu selalu diikuti dengan tambahan komunikasi lisan, sebagaimana siasat klasik P.Herman dengan meluncurkan kata-kata “*saget dinyang*” (bisa ditawar) ; dengan harapan agar pembeli tidak segera pergi meninggalkan bedak dan berlanjut dengan transaksi. Disamping seorang calon pembeli menanyakan harga sesuatu barang untuk kepentingan sekedar menjajagi perkiraan harga umum, berkemungkinan pula calon pembeli yang ingin berbelanja sesuatu barang tapi tidak berani menawar, sehingga pedagang yang dapat membaca gelagat calon pembeli akan berdaya upaya untuk mengikatnya dalam proses transaksi untuk tidak beralih menuju tempat lain.

Menyapa dan menegur sapa “cari apa sayang?!”, atau “Cari apa mbak?, *takon thok gak popo*” (bertanya saja tidak masalah) adalah kata-kata yang sering meluncur tanpa rasa beban dan seolah tanpa dibuat-buat yang ucapan itu bagi para pedagang merupakan upaya semenarik mungkin mengundang seseorang yang sedang memandang kiri kanan seolah mencari sesuatu melewati depan bedaknya. Tegur sapa pada setiap pengunjung pasar yang lewat rupanya merupakan cara kebiasaan yang sering memberikan hasil yang efektif untuk dapat menghentikan langkah seorang calon pembeli. Kemenangan ini semakin terasa di saat terjadi transaksi yang sukses, karena jaringan relasi telah terbuka melalui interaksi inter personal yang kuat. Boleh jadi ini yang membedakan dengan banyak pedagang lain. Pak Herman pemilik bedak Amin ini menyikapi setiap konsumen adalah sebagai suatu potensi untuk membangun relasi melalui tawar menawar jual beli yang sukses.

Tidak satupun pembeli yang berada di pasar tradisional pasar Dampit ketika berbelanja melepaskan kesempatan menawar barang walaupun sudah mendapatkan penjelasan harga dari penjual, kecuali hal ini tidak dilakukannya ketika menjadi konsumen disaat berbelanja makan di warung di dalam pasar tradisional. Demikian pula hampir tidak dijumpai pedagang yang tidak ‘menawar-sapa’ kepada setiap pengunjung yang masuk ke pasar. Kebanyakan pengunjung lebih banyak bertindak dengan cara melihat, mengamati barang daripada bertanya, maka satu sama lain pedagang berlomba menarik perhatian pengunjung. Jadi komunikasi verbal sangat diperlukan dalam berdagang seperti yang diungkapkan oleh pemilik bedak Moro Dadi dengan perspektifnya mengatakan:

“Setiap pembeli itu berbeda-beda, ada yang hanya berdiri saja di depan toko dengan raut muka yang bingung mencari barang yang diinginkan tapi karena tidak ditanya akhirnya berlalu begitu saja. Ada juga pembeli yang memilih barang dan tidak ditanya, kemudian pergi tanpa menawar dulu barangnya. Ada juga pembeli yang hanya iseng-iseng niatnya tidak mau beli tapi hanya ingin mengetahui harga barang itu kalau kita pintar mengambil hatinya dalam hal ini merayu agar yang tadinya tidak membeli akhirnya jadi beli tanpa kita paksa.”

(Wawancara, Tanggal 13 November 2011, di Pasar Dampit)

Tawar menawar adalah nafas kehidupan pasar tradisional sebagaimana halnya Pasar Dampit, dengan kata lain kalau di dalam pasar ini tidak ada terdengar suara-suara yang berdengung, maka disaat itu menandakan bahwa pasar ini sedang lesu karena tiada kunjungan pembeli yang melakukan transaksi. Dengan kata lain, kalau dalam sebuah pasar tidak ada tawar menawar, maka pasar itu adalah bukan disebut sebagai pasar tradisional.

Tentulah dari pernyataan di atas terdapat rasionalitas yang menjadi alasan sehingga pedagang memilih dan tetap berjualan di Pasar Dampit, ketika motif daya ikat dan daya pikat itu dapat disebut sebagai insentif atau *rent* maka yang dimaksud adalah kunjungan dari banyak orang. Selama pedagang yakin bahwa pasar masih mendapatkan kunjungan banyak orang maka selama itu pula pedagang akan memandang pasar masih sebagai tempat usaha yang menjanjikan. Terdapatnya keanekaragaman, atau ketersediaan berbagai macam barang membuka peluang bagi kunjungan berbagai kalangan pengunjung serta pengunjung dapat mendapat kemudahan untuk memperoleh keperluan berbagai barang. Pasar Dampit juga menjadi barometer terhadap informasi tingkat harga barang kebutuhan pokok dan semacamnya. Bagi kebanyakan pembeli, bahwa informasi harga-harga barang adalah bersumber dari tingkat harga di Pasar Dampit, adanya harga yang relatif lebih murah karena pasar Dampit adalah satu-satunya pasar yang ada di desa Dampit ini menjadikan pasar Dampit selalu mendapat kunjungan dari para konsumen pembeli, bahkan dari luar desa.

Bagi ibu Paimah, salah satu pembeli di pasar Dampit menilai pasar Dampit sebagai pasar yang besar dan lengkap, berikut penuturannya “Kalau belanja keperluan rumah tangga saya selalu ke pasar , karena dekat dengan rumah dan disini barangnya sangat lengkap mau cari apa saja yang saya butuhkan selalu ada di pasar ini, ini saya habis beli beras dan bahan-bahan dapur lainnya. Harganya juga tidak mahal masih bisa ditawar dibandingkan dengan toko-toko diluar.”

(Wawancara, Tanggal 20 November 2011, di Pasar Dampit)

Keberadaan Pasar Dampit ini sangat memberikan kontribusi oleh pedagang, hal ini diungkapkan oleh pemilik bedak rezeki yang menjual barang-barang pecah belah; “ Saya sangat beruntung dik bisa berjualan di Pasar Dampit ini karena pasar Dampit ini sangat membantu keadaan ekonomi saya, walaupun semakin tahun omset saya menurun tetapi saya bersyukur masih selalu dikasih rezeki karena juga mau bekerja apa dik sekarang nyari kerja juga sulit.”

(Wawancara, Tanggal 13 November 2011, di Pasar Dampit)

Alasan ini tidak jauh beda dengan yang dikemukakan oleh pemilik bedak Bunda :

“Pasar sekarang semakin sepi, penjual semakin banyak sedangkan pembelinya sedikit. Walau begitu kita harus selalu bersyukur karena rezeki itu Tuhan yang mengatur yang penting kita berusaha Alhamdulillah anak-anak saya bisa sekolah semua dari pendapatan usaha berdagang di Pasar Dampit sini walaupun pasar Dampit ini sekarang sepi, namun tak pernah sekalipun barang tidak laku dalam sehari karena pasar adalah tempat kumpulnya orang dan Pasar Dampit ini adalah pasarnya pasar karena satu-satunya pasar yang ada di Dampit.”

(Wawancara, Tanggal 26 November 2011, di Pasar Dampit)

Perspektif lainnya diungkapkan oleh pemilik toko emas Barokah :

“ Dengan berjualan di pasar Dampit ini semakin hari semakin naik omset saya karena di desa dampit ini banyak penduduknya yang bekerja menjadi TKW jadi banyak keluarganya atau orang itu membelikan perhiasan untuk dijadikan asset karena perhiasan mudah dijual.”

(Wawancara, Tanggal 6 November 2011, di Pasar Dampit)

Namun ketika informasi itu telah menyentuh kelompok komoditi sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, dan ayam potong maka informasi dari P. Amin ini memberikan gambaran yang lebih utuh tentang keadaan pasar Dampit ini. Kunci jawaban gambaran penyebab memudarnya pasar tradisional dapat terjelaskan lebih akurat, melalui penuturan P. Amin,

“Para pedagang yang jualan di samping kiri – kanan pasar itu menyebabkan pasar di dalam itu sepi karena pembeli akan memilih membeli di luar daripada di dalam. Di luar sudah kena udara selain itu juga tidak terlalu bau, beda dengan di dalam pengap dan bau. Sekarang juga banyak masyarakat yang berjualan dengan obroknya yaitu mlijo ke desa-desa jadi orang-orang semakin malas untuk ke pasar”.

(Wawancara, Tanggal 27 November 2011, di Pasar Dampit)

Bahwa pedagang pasar Tradisional yang relatif mengalami kegagalan pasar adalah kelompok komoditi basah yang memiliki sifat gampang busuk, mudah rusak dan penghasil sampah cukup banyak.

Tentang keberadaan pasar Dampit ini juga diungkapkan oleh tukang ojek yaitu Pak Abdul yang menjalani pekerjaannya mulai tahun 1993 :

“Saya sangat bersyukur dengan bisa menjadi tukang ojek di pasar dampit ini karena banyak masyarakat yang jauh sering ngojek kalau ke pasar karena *wong ndeso sek akeh sing durung nduwe kendaraan dewe mbak* (orang desa banyak yang masih belum punya kendaraan sendiri). Aku iki sehari mendapatkan penghasilan sekitar Rp. 50.000 mbak tapi sekarang agak menurun karena musim hujan orang-orang males ke pasar tapi mbak *lek mau lebaran waduh banjir rezeki mbak.*”

(Wawancara, Tanggal 12 November 2011, di Pasar Dampit)

Tetapi lain halnya yang diungkapkan oleh tukang delman yaitu mas Arif :

“Sekarang sepi mbak banyak orang-orang cari cepetnya jadi ngojek, tapi saya senang mbak saya mewarisi dari orang tua saya banyak anak-anak kecil dan orang tua yang memilih naik delman karena enak dan *nyante*, sekarang kebanyakan orang naik delman sebagai sarana rekreasi, mangkal saya yah selalu di pasar Dampit ini mbak karena mau dimana lagi karena pasar dampit selalu rame dengan orang.”

(Wawancara, Tanggal 12 November 2011, di Pasar Dampit)

Sedemikian kuatnya masyarakat pasar tradisional yang selalu saja tetap memandang penting pasar ini sebagai tempat usaha yang menjanjikan bagi sumber penghidupannya.

e. Tanggapan Masyarakat Pasar Dampit mengenai

1. Tanggapan Masyarakat Pasar mengenai Kebersihan Pasar

Ibu Sri berusia 50 tahun, seorang pengunjung pasar dampit atau pembeli meskipun berbelanja di pasar dampit memiliki kesan bisa menjamin keakraban antara pembeli dan penjual namun menyatakan bahwa “Pasar Dampit ini kebersihannya masih kurang terjaga, sampahnya masih gak karu-karuan sehingga baunya tidak enak dan jalan masih ada yang berupa menjadi tanah jadi kalau hujan sering becek dan pasarnya kelihatan kumuh, dan kalau sudah begitu kadang saya jadi malas pergi ke pasar.” (Wawancara, Tanggal 19 November 2011, di Pasar Dampit)

Pendapat ini tidak berbeda dengan yang dikemukakan oleh kalangan pedagang sendiri, seperti yang dikemukakan oleh penjual sayuran yang berada di unit III, yaitu “kebersihan pasar sangat kurang, banyak sekarang orang malas belanja ke pasar karena kotor dan bau sekarang pasar sepi tidak kayak dulu apalagi banyak mlijo di kampung-kampung”. (Wawancara, Tanggal 19 November 2011, di Pasar Dampit)

Di saat hujan deras memang sering banjir karena atapnya banyak yang bocor dan lahan di luar lahan pasar selalu mendapat jatah luapan air dari selokan yang buntu oleh sampah dan tidak ketinggalan menebar aroma busuk. Ketika keadaan ini berlangsung pada jam pasar, sontak pula para pedagang beramai-ramai menghalau air yang masuk ke dalam pasar dengan alat yang diperlukan untuk segera mengalirkan ke arah saluran pembuangan atau resapan air. Tanpa campur tangan petugas pasar pula, kemudian pembersihan ini berlanjut di bedak masing-masing. Seperti tampak pada gambar berikut ini yang peneliti ambil di lapangan :



Gambar 4.1. Banjir masuk ke dalam bedak

Keluhan setengah bernada menegur pernah disampaikan pada petugas pasar oleh pedagang :

“ Pak, sampean gak isin pasar koyok ngene”

(Pak, kamu tidak malu pasarnya seperti ini).

Dan menurut banyak pedagang, penyebab banjir adalah atap yang bocor yang tidak segera di perbaiki, dan selokan buntu. Penyebab selokan buntu adalah para PKL di luar yang membuang sampah seenaknya sehingga menyumbat saluran pembuangan air limbah. Atas kritik itu, pengelola pasar kemudian menertibkan PKL, walaupun tidak maksimal dan tidak konsisten. Senada dengan hal di atas juga di ungkapkan oleh pemilik bedak Sahabat :

“Pasar Dampit ini bisa dikatakan sebagai pasar yang kumuh, karena sampah-sampah sering terlambat di angkut, jadi kalau hujan jadi bau nya menyebar kemana-mana dan tidak enak dipandang karena sampah ditumpuk begitu saja. Kebersihan petugasnya dari pasar, iurannya termasuk jadi 1 dari karcis retribusi itu. Tapi menurut saya pasar dampit itu masih kotor dan terkesan kumuh dalam penanggulangan sampah tidak bisa bersih sampai sekarang. Dari sini pasti tercium aroma yang tidak sedap. Minimnya petugas kebersihan membuat penanganan kebersihan menjadi lambat dan pada akhirnya para petugas hanya membersihkan yang tampak dari luar pedagang yang ada di dalam jarang tersentuh lantainya oleh petugas.”

(Wawancara, Tanggal 6 November 2011, di Pasar Dampit)

Dari ungkapan pedagang tersebut di atas bisa diketahui kondisi sesungguhnya yang ada di lapangan :



Gambar 4.2. Atap pasar yang rusak



Gambar 4.3. Tempat pembuangan akhir sampah

Namun secara regular pula, setiap hari menjelang pukul 17.00, terdapat petugas kebersihan pasar yang bekerja menyapu pasar, tetapi sekarang hanya di bagian toko utama atau depan-depan saja jarang sekali untuk membersihkan sampai masuk ke dalam-dalam. Terlepas daripada hasil kerja petugas kebersihan pasar itu dapat memelihara kebersihan secara memadai atau tidak, keesokan harinya pada para pedagang masih memerlukan menyapu lantai di sekitar bedaknya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Misnah penghuni unit II “Petugas kebersihan sekarang gak seperti dulu, yang di sapu hanya yang bagian-bagian depan saja, yang dalam jarang sekali disentuh. Dan banyak para pengunjung pasar yang seenaknya sendiri membuang sampah di mana-mana. Karena juga masih belum banyak disediakan tempat sampah oleh petugas pasar.”

(Wawancara, Tanggal 13 November 2011, di Pasar Dampit)

Hal yang senada juga diungkapkan oleh pemilik toko Ojo Dumeh :

“Petugas pasar yang menangani kebersihan sekarang ini kurang tanggap karena banyak sampah-sampah di selokan , akhirnya kalau musim hujan kayak gini jadi banjir. Padahal kita juga ditarik retribusi kebersihan tetapi tetap saja pasarnya kotor apalagi tumpukan sampah di ujung selatan barat sana TPA masih belum *ajeg* diangkut dan akhirnya menjadi bau. Perlu ada ketegasan dari pemerintah dalam hal kebersihan ini.”

(Wawancara, Tanggal 19 November 2011, di Pasar Dampit)

Ketika musim hujan keadaan di pasar sangat memprihatinkan, perlu ada ketegasan dari petugas pasar dalam menangani masalah ini. Seperti pada gambar di bawah ini banyak jalan yang rusak jadi ketika hujan datang air menjadi tergenang.



Gambar 4.4 Jalan yang rusak tergenang air.

2. Tanggapan Masyarakat Pasar Mengenai Keamanan Pasar

Percakapan dengan ibu Suharmi, pedagang pakaian berikut dapat memberikan sekilas gambaran tentang bagaimana Tanggapan pedagang mengenai keamanan pasar, yaitu; “ keamanan di dalam pasar ini sangat menurun drastis, masih banyak copet atau maling kalau malam. Petugas pasar jarang atau bisa dikatakan tidak pernah memantau keadaan pasar. Kita semua diwajibkan membayar keamanan dan yang jaga adalah seorang satpam.” (Wawancara, Tanggal 11 November 2011, di Pasar Dampit)

Dilain kesempatan pemahaman tentang keamanan pasar melalui interaksi pedagang melalui perbincangan kepada Pak Parjo pada tanggal 13 November 2011 pukul. diperoleh catatan wawancara sebagai berikut : “ masalah keamanan dalam pasar ini biasa saja, bisa dikatakan tidak aman karena masih banyak pedagang pasar yangkehilangan. Petugas kurang tanggap, tidak ada *control* karena petugas masuk pasar hanya menarik retribusi dan waktu malam yang jaga adalah satpam.”

(Wawancara, Tanggal 22 November 2011, di Pasar Dampit)

Pencopetan adalah salah satu masalah keamanan yang klasik yang berada di pasar Dampit, kerawanan tidak lebih dari itu, namun pula relatif

susah untuk dihilangkan. Semakin ramai pasar, maka semakin maraknya pencopetan. Banyak pedagang, sedikit banyak mengenal pelaku-pelaku copet karena terkait peristiwa yang satu dan yang lainnya. Namun kebanyakan kasus para pedagang dan pembeli tidak berani melaporkan pencopetan walaupun melihat peristiwanya secara langsung karena takut dihadang apabila bertemu dengan pencopet di jalan. Taraf pekerjaan petugas keamanan sehari-hari adalah pada tingkat melakukan pemantauan keamanan pada siang hari dan penjagaan keamanan pada malam hari, menerima laporan pengaduan pengunjung pasar yang kehilangan dan tidak lebih dari itu. Tetapi nyatanya peran dari aparaturnya masih belum kelihatan, seperti yang diungkapkan pemilik bedak Barokah: “kalau ada pengunjung yang kecopetan atau ada pedagang yang kemalingan, petugas responnya kurang maksimal, hanya di “iya” kan saja tapi tidak diproses lebih lanjut, jadi terkesan cuek pegawainya itu”.

(Wawancara, Tanggal 6 November 2011, di Pasar Dampit)

Bila otoritas pasar berhak menarik biaya retribusi keamanan, secara normatif semestinya juga bahwa pedagang menikmati rasa nyaman, aman yang sebanding. Ini yang semestinya dimasalahkan dan dipertanyakan oleh pedagang. Persepsi lainnya di ungkapkan oleh Pak Parjo yang menjual sandal dan sepatu :

“Masalah keamanan itu dipungut setiap bulan tapi selama ini kalau ada yang kehilangan yah tidak ada tanggung jawab atau tindak lanjut dari pihak atas, kita bayar uang keamanan sebulan Rp. 5000,- tim keamanan berdiri sendiri tapi sepengetahuan dari dinas, kalau ada pencurian yah langsung lapor ke polisi tapi tidak ada tindak lanjutnya lagi cuman hanya mngecek-ngecek aja sesuai dengan tugasnya.”
(Wawancara, Tanggal 13 November 2011, di Pasar Dampit)

Bertolak dari ungkapannya di atas beliau juga memberikan pernyataan yaitu; “Tapi kalo dilihat dari luas dan besarnya pasar ini tidak berat membayar sebesar Rp 5000,- kita kalau malam juga tidak bisa menjaga bedak kita, tapi yah harus tanggung jawab dengan tugasnya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.”

(Wawancara, Tanggal 13 November 2011, di Pasar Dampit)

Jika di pasar terjadi kriminalitas, pada umumnya yang menjadi pelaku adalah para preman yang ada di pasar Dampit ini. Menurut istilah Pak Parno yang pekerjaannya sebagai tukang ojek yang selalu mangkal di Pasar Dampit ini, preman adalah orang yang mempunyai perilaku jelek, jika sudah melakukan perusakan atau yang melanggar peraturan. “Tetapi tidak semua orang disebut preman, yang berambut gondrong mungkin anggapan kita, dialah seorang preman tetapi belum tentu “preman” tukasnya. Penjelasannya lebih lanjut; “ seperti juru parkir di sini yang rambutnya gondrong dan disemir tapi mereka bukan preman, tetapi memang keamanan perlu dijaga di pasar ini karena kalau pasar ramai sering rawan adanya pencopet, dan di pasar Dampit ini petugas keamanannya hanya menjaga setiap malam saja kalau siang jarang ada yang mengecek keamanan di pasar. Kalaupun ada itu di waktu bulan puasa karena pasarnya ramai.”

(Wawancara, Tanggal 12 November 2011, di Pasar Dampit)

3)Tanggapan Masyarakat Pasar Mengenai Ketertiban Pasar

Menunjuk pada salah satu sumber dari ketidaktertiban pasar tradisional, yakni PKL, diantara para pedagang terdapat penyikapan yang berbeda demikian pula pada pengelola pasar juga memiliki standar terhadap keberadaan para PKL. Pemerintah memberikan sebutan sebagai pedagang tidak bersurat. PKL ini dianggap sebagai pengganggu ketertiban. PKL yang menempati seputar lingkaran sisi luar pasar, kanan-kiri pasar, tangga jalan masuk, ruang terbuka, bahkan di dalam pasar sepanjang lorong jalan utama pasar, di depan tokoh/ bedak pedagang yang membuat pelintas/pengunjung susah lewat karena jalan sempit.

Ketika situasi ini ditanyakan pada pedagang, dengan pertanyaan “apakah keberadaan PKL-PKL di dalam pasar mengganggu proses berjualan ibu?”, maka jawabnya; “Sebenarnya sangat mengganggu karena menyebabkan kesan morat-marit,dan banyak pengunjung yang membeli di PKL-PKL karena malas masuk ke dalam pasar. Biasanya para petugas mengusir para PKL-PKL itu kalau kedatangan ada di dalam pasar, setelah

petugas pasar pergi para PKL-PKL juga akan kembali lagi. Tapi memang mereka juga cari nafkah mau gimana lagi”.

(Wawancara kepada Bu. Paimah, Tanggal 19 November 2011, di Pasar Dampit)

Dari wawancara tersebut di atas adanya PKL akan menjadi pandangan yang tidak enak dipandang, semua pedagang meresahkan hal ini, tetapi belum ada kejelasan dari petugas pasar dalam menangani PKL-PKL. Ketika menjawab pertanyaan “ seandainya para pedagang mempunyai keluhan di pasar ini dalam hal yang menyangkut PKL, kebersihan pasar, ataupun keamanan pasar apakah keluhan itu pernah ditanggapi oleh kepala pasar dampit ini?”

“Tanggapan selalu beralasan jawabannya cuman iya-iya saja, tapi tidak ada kelanjutannya, mungkin banyak prosedurnya jadinya yah gak ada jalan keluarnya, memang keberadaan PKL di dekat pasar sangat mengganggu sekali, jalan semakin sempit, pandangan pasar juga semakin kumuh tapi walaupun kami sebagai pedagang mengeluh belum tentu para PKL-PKL ini diusir atau digusur begitu saja.”

(Wawancara kepada pak Parlan, Tanggal 12 November 2011, di Pasar Dampit)

Hal yang senada juga di ungkap oleh penjual barang pecah belah, menurutnya; “ keluhan-keluhan percuma dilontarkan tapi gak ada realisasinya, pemerintah hanya diam membisu saja.” (Wawancara kepada Ibu Fatma, Tanggal 12 November 2011, di Pasar Dampit)

Menurut pemilik bedak Sahabat yaitu Pak Parjo, kelemahan pasar tradisional yaitu masalah ketertiban yang di pasar Dampit ini banyaknya PKL yang berjualan di jalan-jalan masuk di tangga-tangga.

“Kelemahan di pasar sini itu adalah penataan PKL, Pasar kelihatannya tidak rapi dan kelihatan morat-marit (berantakan) jadi tidak jelas pasra ini itu sebenarnya hadap kemana, gak tau yang depan yang mana yang belakang yang mana. Masih belum ada ketegasan dari aparat, jadi penataan tidak karuan seperti yang bisa dilihat paling berantakan yaitu yang berada di unit 1.mungkin para PKL setau saya hanya disuruh membuat surat pernyataan kapan-kapan kalau ada ptugas dari pusat harus mau digusur.” (Wawancara, Tanggal 13 November 2011, di Pasar Dampit)

Ia meneruskan penjelasannya, :

“Petugas pasar kewibawaannya saya rasa kurang dalam menghadapi pedagang, seperti contohnya adanya PKL mereka hanya berpikiran *‘sing penting wes tak kandani’* (yang penting sudah saya kasih tahu) seumpama dulu ada tindakan tegas mungkin gak ada PKL-PKL tapi sekarang nasi sudah menjadi bubur, sudah banyak PKL tapi memang mereka juga membayar retribusi.”

Banyak ketidaktertiban di dalam pasar Dampit ini bukan dari para PKL saja kebanyakan pedagang juga bisa menjadi sumber tidak tertiban, salah satunya juga dapat dijelaskan oleh seorang pengunjung pasar Dampit ini yaitu Bu. Ari; “ pasar Dampit ini kelihatan tidak tertib karena semakin hari pasar ini kelihatan sempit karena pedagang mengeluarkan barang dagangannya sampai keluar bedak/tokonya jadi *gak karu-karuan gak tertata jalannya menjadi sempit.*”

(Wawancara, Tanggal 19 November 2011, di Pasar Dampit)

4) Tanggapan Masyarakat Pasar mengenai Retribusi Pasar

Ketika ditanya masalah retribusi kebanyakan para pedagang sangat antusias untuk menjawabnya. Apa kata pemilik bedak Ojo Dumeh mengenai retribusi? Menurutnya; “Retribusi seharusnya untuk pembenahan atau perbaikan pasar tapi ya itu kalau pasar harus direnovasi lagi buntut-buntutnya para pedagang lagi yang rugi, dengan mengeluarkan biaya lagi dalam pembenahan pasar jika direnovasi harus ini, harus itulah”.

(Wawancara, Tanggal 19 November 2011, di Pasar Dampit)

Sedangkan pemahaman pedagang lain pemilik toko Adinda tentang retribusi adalah sebagai berikut :

“Retribusi adalah kewajiban-kewajiban yang berupa iuran yang harus dipenuhi, diantaranya iuran kebersihan, iuran keamanan. Harapannya terhadap pengelola pasar Dampit, yaitu peningkatan keamanan yang lebih baik lagi agar baik para penjual maupun para pembeli tidak merasa was-was lagi , demikian pula kebersihan dan sarana umum lainnya seperti kamar mandi (toilet) dan sarana ibadah juga perlu ditingkatkan supaya kita tidak membayar lagi ketika masuk toilet, fasilitas toilet dan mushola yang kurang memadai.

(Wawancara, Tanggal 12 November 2011, di Pasar Dampit)

Lebih kontroversial lagi adalah dengan pemahaman yang dikemukakan pemilik bedak Sido Dadi:

“Retribusi itu pajak pedagang menempati bedak-bedak di pasar Dampit ini, retribusi ini biasanya ditargetkan oleh pimpinan pasar (disperindag dan pasar) perhari. Kemudian yang melaksanakan penarikan retribusinya itu adalah bawahannya (petugas pasar). Misalnya : Kepala pasar menargetkan hari ini terkumpul Rp. 300.000,- dan apabila petugas pasar menarik lebih dari itu, maka sedikit lebihnya itu mungkin akan masuk kantong petugas itu.” (Wawancara, Tanggal 13 November 2011, di Pasar Dampit)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan target penerimaan retribusi, baik retribusi pasar maupun PKL ditetapkan oleh pemerintah kabupaten malang. Jumlahnya tidak tetap terus bergerak naik disesuaikan dengan Perda dari anggota dewan dan hasilnya Retribusi selalu naik . masalah retribusi tidak ada habisnya, seperti yang di ungkapkan pemilik toko sepatu dan sandal ini :

“Kalau disesuaikan dengan Perda saya kena Rp. 5000 setiap harinya, kalau sesuai dengan Perda ya tidak kuat bayar mbak. Saya hanya membayar Rp 2000/ hari, dari sini seharusnya ada timbal balik dari pihak pasar kepada kita, yah sekedar pembenahan lah yang kurang baik, sekali waktu ada petugas yang survey tapi saya tidak pernah tau karena petugas hanya menarik retribusi saja tidak mau mengontrol dan memantau perkembangan pasar.” (Wawancara, Tanggal 19 November 2011, di Pasar Dampit)

Dengan pengertian maupun pemahaman tersebut di atas telah menunjukkan kalau bagi kebanyakan pedagang, mengkesankan bahwa pembayaran uang retribusi harus disertai dengan hak-hak pelayanan yang harus diterimanya terkait dengan pembayaran termaksud. Bahwa pelayanan yang diperoleh pedagang terkait dengan retribusi dari pengelola pasar belum memadai sesuai dengan harapan para pedagang. Seperti pada gambar di bawah ini keadaan pasar.



Gambar 4.5 Jalan yang rusak dan penuh sampah.

f. Substansi *Emic* Pedagang pada *Sustainability* Usaha Berdagang di Pasar Dampit

Secara substansial, terhadap masalah yang dihadapi oleh hampir semua pasar tradisional di Indonesia, yakni *omzet* usaha yang menurun dan daya saing yang tidak dapat mengimbangi dan menandingi kinerja pasar modern.

“Perkembangan pasar dari tahun ke tahun grafiknya tidak menanjak, walaupun naik tapi kenaikannya tidak drastis, bisa dikatakan semakin tahun semakin menurun, ini disebabkan karena banyak pengaruh dari toko-toko besar di luar. Padahal disana kan harganya sudah pas, disini masih ada tawar menawar tapi yah ada yang masih memilih di sini karena ada kepuasan tersendiri dari proses tawar menawar itu. Begitu ungkap dari Pak Parno salah satu pedagang pasar Dampit.”

(Wawancara, Tanggal 19 November 2011, di Pasar Dampit).

Hal yang senada juga diungkapkan oleh beliau, berisi keinginannya kedepan dengan pasar Dampit ini, yaitu :

“Sekarang pasar menurun banyak yang sepi, harapan saya dengan pasar Dampit ini lebih diperhatikan lagi keberadaannya jangan hanya dipungut saja, setidaknya ada kerjasama dengan pemerintah, komunikasi dengan pedagang, sekali waktu kepala pasar survey, bagaimana sih maunya orang pasar agar tau keluhannya orang pasar. Jadi kalau kita melihat itu petugas pasar itu hanya menarik

retribusi saja tetapi penanganan masalah-masalah di pasar masih kurang.”

(Wawancara, Tanggal 19 November 2011, di Pasar Dampit)

Pesatnya perkembangan pasar modern membuat pasar tradisional semakin terdesak. Pasalnya pasar tradisional yang selama ini dicitrakan becek, bau, kumuh, dan jorok membuat masyarakat enggan berbelanja di pasar tradisional. Sementara tawaran lebih baik datang dari pasar modern. Konsumen terfasilitasi dengan tempat yang bersih, nyaman, dan strategis, berbeda jauh dengan pasar tradisional yang fasilitasnya sangat kurang. Hal ini juga diungkapkan oleh Pak Parjo salah satu pedagang pasar Dampit; “Fasilitas di pasar dampit yang disediakan oleh pemerintah ini masih belum ada, kamar mandi dan mushola yang ada di pasar Dampit ini adalah milik pihak swasta, jadi tidak diolah dari pasar setempat, jadi mau kencing aja kita harus bayar.”(Wawancara, Tanggal 13 November 2011 di Pasar Dampit)

Ia meneruskan penjelasannya :

“Keadaan fisik pasar Dampit sekarang banyak yang rusak, jalan, atap banyak yang bocor, keinginan saya sebagai pedagang ada renovasi tapi walaupun di renovasi kayaknya sulit, harus benar-benar ada dana yang banyak jangan nanti akhir-akhirnya biaya dikenakan kepada pedagang, yah yang penting untuk saat ini yang harus segera ditangani adalah atap-atap yang bocor dan saluran-saluran air yang dipenuhi dengan sampah.”

Kondisi pasar Dampit yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat pasar khususnya kebanyakan pedagang untuk pembenahan terhadap infrastruktur pasar. Upaya pembenahan infrastruktur sangat perlu untuk mengembalikan minat konsumen terhadap pasar tradisional dan mengembangkan keberadaan pasar Dampit sebagai pasar tradisional. Pihak pemerintah masih belum menyentuh bangunan pasar. Seperti yang diungkapkan oleh pak Ponidi penghuni pasar Dampit yang berada di unit II, yaitu bahwa :

“Mulai pasar pindah belum ada renovasi sama sekali, tapi kemarin saya dan teman-teman mengajukan. Disini himpunan pedagang semu, baru kalau ada masalah kayak gini seperti atap banyak yang bocor kita baru berkoordinasi. Jadi pedagang pasar kalau kesulitan

atau ada masalah seperti ini baru pedagang merasa butuh adanya organisasi. Seperti juga kemarin ketika retribusi mau dinaikkan para pedagang berkumpul dan mereka mengajukan permintaan kalau memang retribusi naik biar bisa seimbang.”
(Wawancara, Tanggal 20 November 2011, di Pasar Dampit)

Kurangnya komunikasi antara pedagang dan aparat membuat tidak seimbang dan berjalan sendiri-sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Ponidi, bahwa; “komunikasi kita dengan petugas pasar sangat kurang, walaupun kemarin ada sosialisasi tapi menurut saya yah kurang kalau sosialisasinya hanya lewat selebaran kertas saja karena itu tidak dipedulikan lagi sama pedagang-pedagang di pasar.”

Pak Ponidi meneruskan keinginannya,

“Kalau bisa adanya toko-toko besar di luar sana dibatasi atau jaraknya di atur jangan sampai dekat dengan pasar karena munculnya toko-toko besar di sana mematikan kita. Pasar semakin sepi, konsumen sekarang pada pindah tangan mereka tidak masuk ke pasar, di luar ada toko-toko yang besar banyak swalayan yang muncul seperti alfamart indomaret yang membludak dimana-mana, pokoknya menurun drastis bagi saya yang jual kosmetik, dulu handbody laris sekali sekarang tidak laku sama sekali. Yang saya harapkan dari Pemerintah yaitu ada celah, ada jalan keluar bagaimana pasar tradisional ini lebih dikembangkan agar tidak terkesan sebagai pasar kumuh dan menggolkan Perda pendirian alfamart dan indomaret dan juga Pembenahan pasar tidak hanya dari pedagang saja tapi ada kerja sama dengan pemerintah. Merealisasikan atau membenahi pasar setidaknya minimal 6 tahun sekali ada rehabilitasi pasar (gorong-gorong, atap) setidaknya kalau pemerintah bertindak pasti retribusi akan lancar.
(Wawancara, Tanggal 20 November 2011, di Pasar Dampit)

2. Tanggapan *stakeholders* Pemerintah

d. Keberadaan Pasar Dampit bagi Pemerintah

Pasar Dampit merupakan pasar kelas 1 yang sangat luas dan jumlah toko/bedak sebanyak 1.085. di bagi menjadi 3 unit dan I unit punden. Menurut Pak Hadi salah satu pegawai UPPD Dampit, pasar sangat berpotensi seperti yang telah diungkapkan bahwa; “ Pasar adalah tempat jual dan beli banyak potensi-potensi di dalam pasar yang menumbuhkan perekonomian

masyarakat.” Beliau juga menambahkan “ pasar Dampit ini adalah pasar yang sangat luas jadi banyak pedagang – pedagang dari hasil pertaniannya atau ternaknya di bawah ke pasar Dampit ini karena pasar Dampit ini adalah satu-satunya pasar yang berada di Desa Dampit .” (Wawancara, Tanggal 26 November 2011, di Ruang Kerja)

Hal ini juga di ungkapkan oleh tenaga administrasi UPPD Dampit ini, bahwa :“ Pasar Dampit ini merupakan pasar tradisional kelas 1 yang mempunyai wilayah cukup luas, di pasar Dampit ini tingkat kesadarannya sangat kurang dalam hal pembayaran pajak, para pedagang kurang disiplin. Tetapi juga ada pedagang yang membayarnya tepat waktu dan tidak pernah membleset.”

(Wawancara, Tanggal 28 November 2011, di Ruang Kerja)

Pak Hadi yang masih tergolong baru menjabat di UPPD Dampit, mengemukakan penjelasan,

“Bahwa melalui mantri pasar pengelolaan Pasar Dampit dan tugasnya cukup banyak, yaitu : (a) menjaga ketertiban, (b) menjaga keamanan, (c) menjaga kebersihan, (d) memeriksa timbangan, (e) menarik retribusi pasar, (f) mendata jumlah pedagang pasar, (g) melakukan operasi pasar apabila terjadi kenaikan sembako yang melampau tinggi, (h) mencegah penimbunan barang kebutuhan pokok.”

(Wawancara, Tanggal 26 November 2011, di Ruang Kerja)

Menurut informan yang mempunyai jabatan lebih tinggi dan bertanggung jawab dalam pengembangan pasar mengungkapkan mengenai Pasar tradisional, yaitu “ Pasar merupakan denyut nadi perekonomian di masyarakat jadi kita harus benar-benar memikirkan jalan terbaik untuk kemajuan pasar tradisional yang di dalamnya juga termasuk Pasar Dampit.”

(Wawancara, Tanggal 12 Januari 2012, di Ruang Kerja)

e. Tanggapan Pemerintah terhadap Pasar Dampit mengenai

1. Tanggapan Pemerintah mengenai Kebersihan Pasar

Paradigma masyarakat bahwa pasar itu adalah tempat yang jorok, kotor, dan becek dan sebagainya. Dari pasar Dampit ini yang banyak

dipermasalahan oleh masyarakat pasar maupun petugas pasar adalah masalah kebersihan, seperti yang di ungkapkan oleh salah satu staf pegawai UPPD Dampit, bahwa :“ kebersihan selalu menjadi masalah,kita juga mempunyai petugas kebersihan yang selalu membersihkan sampah tetapi juga kembali lagi kepada pribadi masing-masing harus sadar membuang sampah jangan di selokan, akhirnya kalau hujan jadi banjir dan baunya kemana-mana kalau sudah begitu kita yang disalahkan.” (Wawancara,Tanggal 24 Desember 2011, di Ruang Kerja).

Keluhan sedikit bernada menyindir terlontarkan, dengan melanjutkan penjelasannya :

“Kewajiban kita mengangkut sampah ke TPS tapi kalau di TPS sampai numpuk-numpuk itu sudah bukan tanggung jawab kita tapi itu tanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, kita hanya membantu menarikkan karcis saja, jadi kalau ada sampah berhari-hari numpuk di TPS bukan tanggung jawab kita lagi, mereka juga jarang ke lapangan. Kita selalu setorkan retribusi kebersihan ke Disperindag dan Pasar bagian kebersihan pasar. (Wawancara, Tanggal 24 Desember 2011, di Ruang Kerja)

Masalah kebersihan memang sangat *urgent* karena untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat agar berbelanja di pasar tradisional seperti pasar Dampit. Masyarakat pasar khususnya pedagang selalu menlemparkan masalah kepada pihak pasar, seperti yang dinyatakan oleh salah satu staf di UPPD Dampit yaitu Bu Yanti adalah sebagai berikut; “Selama ini pedagang itu taunya di TPS kalau ada sampah numpuk-numpuk itu tanggung jawab kita, tapi kita juga tidak menyalahkan pedagang kan mereka memang taunya di TPS itu milik Pasar Dampit dan di wilayah pasar.”

(Wawancara, Tanggal 24 Desember 2011, di Ruang Kerja)

Beliau meneruskan penjelasannya :

“ kita selalu mengupayakan untuk selalu menjaga kebersihan dan petugas kami selalu rutin dalam melaksanakan tugasnya, perlu juga

kesadaran dari pedagang untuk bersama-sama menjaga kebersihan.”

3. Tanggapan Pemerintah Mengenai Ketertiban Pasar

Otoritas pasar sudah berusaha untuk menertibkan pasar dampit, tetapi memang butuh kesabaran dalam menangani para pedagang ketika dibombong pertanyaan masalah PKL, karena para PKL kebanyakan berasal dari *ethnis* tertentu. Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan salah satu petugas pasar Dampit, yang menyatakan :

“Ketertiban di pasar dampit ini masih kurang teratur dimana masih banyak pedagang kaki lima yang menggunakan tempat atau fasilitas umum untuk digunakan sebagai tempat berjualan. Masalah yang ada di pasar dampit ini terlalu kompleks dengan pasar yang luas. Tetapi kami tetap berusaha yang terbaik untuk semua pihak. Keadaan sekarang lebih baik, karena ada penertiban, tapi ya gak begitu langsung kelihatan hasilnya. Ya gitulah keadaannya, mereka semua pada nekat-nekat, padahal yang kita lakukan juga untuk kebaikan mereka juga, kalau pasarnya bersih yang datang ke pasar pasti makin banyak.”

(Wawancara, Tanggal 26 November 2011, di Ruang Kerja)

Adanya masalah PKL juga di ungkapkan oleh salah satu staf administrasi UPPD Dampit ini; “ kita sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menangani PKL tetapi PKL-PKL ini sangat nakal mereka membangun bedaknya pada malam hari, pernah ada juga yang dirusak karena mengganggu jalan di pasar, mereka selalu kita peringatkan.”

(Wawancara, Tanggal 26 November 2011, di Ruang Kerja)

Pernyataan ini juga didukung juga oleh petugas pasar Dampit yang menjabat sebagai juru pungut Pak Arya yang juga mengatakan :

“Bagaimana ya kalau masalah di pasar ini memang terlalu kompleks. Tetapi kami tetap mengusahakan sesuai dengan prosedur dari atasan yang ada karena pedagang di sini banyak yang nekat-nekat sampai pernah ada yang membawa senjata tajam dari *ethnic* tertentu. Para PKL itu juga kena retribusi karena berada di wilayah pasar Dampit, ketika mereka para PKL mendirikan bedak selalu kita panggil dan kita mengadakan perjanjian kalau sewaktu-waktu

pasar membutuhkan lahan itu dan kita rusak jangan minta ganti rugi.”

(Wawancara, Tanggal 26 November 2011, di Ruang Kerja)

3. Tanggapan Pemerintah Mengenai Retribusi Pasar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan target penerimaan retribusi, baik retribusi pasar maupun PKL ditetapkan oleh pemerintah kabupaten malang. Jumlahnya tidak tetap terus bergerak naik.

“Bila hari itu tidak tercapai targetnya misalnya karena hari libur, atau penjual lagi sepi ataupun ada kegiatan yang banyak menyita perhatian penjual sehingga mereka tidak berjualan seperti contohnya kalau mantu, ini harus dipenuhi hari lain. Pemerintah menuntut agar dalam satu bulan, jumlah penerimaan retribusi pasar harus memenuhi target yang telah di tetapkan. Jika terpaksa target tidak bisa dipenuhi UUPD harus menyampaikan surat secara resmi dengan menyampaikan alasan-alasan yang rasional yang menyebabkan target tidak tercapai, baru kemudian alasannya bisa diterima.” Hal ini diungkapkan oleh Pak Hadi

(Wawancara, Tanggal 24 Desember 2011, di Ruang Kerja)

Tata cara pemungutan retribusi pasar sebagaimana diungkap oleh Bu Yanti, salah seorang staf pada pasar dampit dilakukan sebagai berikut:“Pemungutan retribusi pasar ini dilakukan oleh juru pungut (petugas pemungut) dengan cara mendatangi para pedagang setiap hari. Ini dilakukan dengan menggunakan karcis yang dikeluarkan oleh seksi penerimaan dan penagihan . Karcis ini berguna sebagai bukti pembayaran retribusi.” (Wawancara, Tanggal 28 November 2011, di Ruang Kerja)

Tata cara pengumpulan dana retribusi pasar dampit sebagaimana dijelaskan oleh Pak Arya, dilaksanakan sebagai berikut :

“ Dana retribusi yang telah dikumpulkan oleh petugas pemungut, diserahkan kepada bendahara pasar untuk dicatat pada buku harian penerimaan retribusi pasar beserta nomor karcis yang habis terpakai pada hari itu.kemudian dana retribusi tersebut diserahkan kepada kepala pasar untuk disetorkan kepada pemegang kas daerah/dinas. Begitu seterusnya dilakukan setiap hari.”

(Wawancara, Tanggal 24 Desember 2011, di Ruang Kerja)

Hasil penelitian menunjukkan, ternyata pemungutan retribusi pasar tidak berjalan sesuai dengan ketentuan tarif yang ditentukan oleh otoritas

pasar berdasarkan Perda. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu staf yaitu Bu. Ratna, sebagai berikut :

“Memang pedagang pasar dampit ini banyak yang tidak mau membayar. Mereka sulit sekali diberi pengertian. Bahkan sampai sekarang ini ada pedagang yang tidak mau bayar sama sekali. Tapi dalam hal ini saya tidak punya kekuatan untuk memaksa. selama kerja disini, tidak pernah ada pedagang baik yang menempati toko, bedak , loss maupun PKL yang membayar sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau mereka dipaksa bayar sesuai perda mungkin tidak ada yang akan bayar retribusi. Semuanya rata-rata seperti itu, alasannya, ya macam-macam; karena pasar sepi, belum laku dan sebagainya.pokoknya, bayarnya cuman segitu.yang penting kita melaksanakan tugas kemudian uangnya disetorkan,selesai.”
(Wawancara, Tanggal 24 Desember 2011,di Ruang Kerja)

Pemungutan retribusi, baik retribusi pasar dan PKL maupun retribusi pemeliharaan kebersihan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyetoran dana retribusi pasar maupun kepada pemegang kas dinas yang dilakukan setiap hari dengan menyertakan nomor karcis yang habis dipakai. kesadaran yang tinggi dari pedagang mengenai pentingnya karcis dalam pembayaran retribusi semakin menjamin pelaksanaan prosedur pemungutan ini berjalan dengan baik.

c.Substansi *Emic* Pemerintah terhadap *Sustainability* Pasar Dampit

Hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan bahwa menurut responden dari pemerintah yang dapat dipeercaya, mengungkapkan hal sebagai berikut :

“Dari masalah-masalah yang ada di Pasar Dampit dan pasar Tradisional pada umumnya bahwa pedagang pasar harus diberdayakan, pemerintah memfasilitasi, kemudian di dalam melestarikan pasar tradisional dengan mengadakan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana. Itu sudah diajukan ke pemerintah pusat karena di daerah sudah tidak *direken*, APBD tipis, anggaran tidak layak.”
(Wawancara, Tanggal 12 Januari 2012, di Ruang Kerja)

Beliau menjabat mulai tahun 2009 yang memiliki Tupoksi sesuai dengan yang ditugaskan, seperti yang telah dijelaskan bahwa :

“ Pemeliharaan lantai, atap, kalau pasar Dampit masih sebagian di unit I tapi di unit II masih belum. Walaupun masalah

pemeliharaan pasar itu Tupoksi kita, tapi belum ada dukungan dari Pemerintah Daerah, padahal kita sudah mengajukan, kita sudah membuat rancangan gambar yang kita ajukan ke pusat dan bekerjasama dengan kemitraan.”

(Wawancara, Tanggal 12 Januari 2012, di Ruang Kerja)

Usaha untuk terus menyelamatkan pasar tradisional terus dilakukan, sedikit bernada kesal kepada anggota Dewan beliau menceritakan bahwa :

“Kita mengajukan sudah mulai tahun 2011 tapi belum dituruti padahal ini sudah memasuki tahun 2012, kita sudah berusaha bagaimana langkah perhatian kepada pasar tradisional. Kita sudah sering *eker* (rame) sama anggota Dewan, malah sebenarnya keenakan dewan kita kasih masukan mereka tapi sampai sekarang belum dikasih apa-apa lha dari sini lah saya pendekatan dengan Sekda.”

(Wawancara, Tanggal 12 Januari 2012, di Ruang Kerja)

Dilanjutkan oleh bapak Hadi:

“ Saya mempunyai tekanan batin dengan para pedagang di sini jadi beban moral bagi saya karena setiap bertemu dengan para pedagang selalu ditagih janjinya. Padahal kita juga sudah berusaha mengajukan ke atasan kita.” (Wawancara pada tanggal 24 Desember 2011, di Ruang Kerja)

Tidak berhenti sampai di situ saja Bapak Hari sangat bersemangat untuk benar-benar memberikan perubahan keberadaan pasar tradisional yang sudah sedikit demi sedikit menurun. Beliau melakukan rencana-rencana atau terobosan baru, seperti yang telah diungkapkan :

“Sekarang saya mencoba pola baru, yaitu melakukan kemitraan, sementara kemitraan yang ada yaitu Dinas Pengairan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga, dan Dinas Perhubungan.

Kita disini berusaha menelusuri, walaupun menjabat disini saya baru 3 tahun saya trombol dengan kemitraan tadi, sementara yang saya ajukan ada 18 pasar, termasuk pasar Dampit. Kita mengajukan 1,6 M. Sekarang katanya masih dirundingkan. Seandainya nanti kita dapat akan dibagi secara proporsional sesuai dengan acuan.”

(Wawancara, Tanggal 12 Januari 2012, di Ruang Kerja)

Hasil wawancara yang dilakukan di lapangan dengan koresponden yang dapat dipercaya ini sedikit membela perannya sebagai pengembangan pasar, berikut ungkapnya :

“Yang melekat di pasar tradisional termasuk pasar Dampit adalah pasar kumuh, tapi perlu diketahui tidak hanya pihak pasar saja yang menjadi tersangka dalam penanganannya tetapi di dalamnya menyangkut beberapa dinas lain yang berkepentingan di pasar Dampit itu, contohnya : Dinas Perhubungan. Setelah parkir tutup mereka pulang, parkir gak karu-karuan langsung ditinggal pulang begitu saja jadi kotor banget dan kita yang membersihkan. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pun tidak rutin mengangkut sampah. Kalau ada apa-apa yang kena sini.”

(Wawancara, Tanggal 12 Januari 2012, di Ruang Kerja)

Setelah banyak diwawancara pemerintah satu ini yang bertanggung jawab dengan adanya pasar tradisional mempunyai keinginan-keinginan dan terus ingin berjuang mempertahankan eksistensi pasar tradisional, seperti yang telah diungkapkan bahwa :

“ Pasar merupakan denyut nadi perekonomian di masyarakat jadi kita harus benar-benar memikirkan jalan terbaik, tidak hanya asal renovasi saja atau dipindahkan. Di tata bagaimana pasar tradisional bisa jadi pasar yang terbina, tertib, bersih, indah, aman kalau bisa jadi pasar *sapta pesona*.”

Meneruskan penjelasannya terkait dengan pasar Dampit ;

“Di Dampit yang kelihatannya perlu segera di renovasi adalah atap-atap di unit II, dan jalannya. Kalau di unit III itu sulit, orangnya tidak bisa di kasih tau. Banyak orang-orangnya yang menempati situ juga. Mereka dulunya itu para PKL. Kalau pasar Dampit itu orang lama yang banyak tau, karena disini kan saya baru 3 tahun jadi gak begitu paham dengan sejarahnya, yang sudah saya pegang dan dalam tahap pembenahan adalah pasar Karanglo dan pasar Tumpang.”

(Wawancara, Tanggal 12 Januari 2012, di Ruang Kerja)

Keluhan dari perjalanannya menangani pasar tradisional diceritakan dengan nada sedikit agak setengah kecewa dengan para pedagang pasar tradisional yang ada di Kabupaten Malang ini, yaitu :

“Peran dari pedagang sangat diperlukan sekali, kita sudah berusaha memberdayakan tetapi kalau pedagang tidak menjaga ya sama dengan Nol hasilnya. Jadi harus perlu kerja sama antara pihak kita dan pedagang. Walaupun selama ini kita sudah berusaha nata pasar berusaha mengajukan ke dewan sampai ke pemerintah pusat tapi para pedagang tidak pernah ada rasa terimakasihnya mereka selalu kurang saja.”

(Wawancara, Tanggal 12 Januari 2012, di Ruang Kerja)

Tanggapan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang mengenai Keberadaan Pasar Tradisional yang di dalamnya termasuk Pasar Dampit. Ketika ditanya masalah Pasar tradisional yang ada di kabupaten Malang Anggota Dewan ini yang berada di Komisi A yaitu Bapak Drs.Teguh Hariyono menanggapi bahwa :

“Pasar tradisional harus dilindungi makanya kita lagi membuat Raperda yaitu Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Karena selama ini kan Pasar Tradisional kurang berdaya dan tidak dilindungi. Ada sisi lain yang harus di perhatikan dan dipahami bahwa apapun yang pemerintah lakukan sama-sama dengan kita semua yang ada di sini apapun, tidak berarti kalau Pasar Tradisional tidak menyadari arti penting keberdayannya. Padahal kalau kita lihat potensi pasar itu sangat besar.”

Beliau meneruskan penjelasannya :

“Kedua tidak lepas dari sikap mental dari para pedagang, istilahnya *fighting spiritnya* harus digugah lagi karena sudah kalah dengan pasar Modern yang sudah di dukung dengan infrastruktur yang kuat tapi kita malah ‘ngoko’ jadi kayaknya nanti saya takut kalau pasar tradisional hanya tinggal cerita saja makanya akan kita payungi dengan Perda.”

(Wawancara, Tanggal 13 Januari 2012, di Ruang Kerja)

Selama ini beliau beserta rekannya mencari pembanding ke daerah-daerah yang sudah berhasil memberdayakan pasar Tradisional seperti yang telah diungkapkan, yaitu :

“ Kami tidak berhenti dari sini, secara empiris melakukan perjalanan studi banding ke beberapa daerah yang sudah secara baik menjalankan seperti di Tulungagung dan Kulonprogo, di sana pasar modern belum sampai menjamur seperti di kita sudah dipageri jadi lebih bagus daripada di sini tetapi kita pun tidak menutup kemungkinan bisa melakukan ini.Tidak berhenti di situ tapi juga harus *sharing* dengan *social charity* dan dilindungi dengan Undang-Undang juga makanya Perda ini ada tenggang waktu 2 tahun untuk penyesuaian yang tidak sesuai dengan Perda ini.”

(Wawancara. Tanggal 13 Januari 2012, di Ruang Kerja)

Walaupun ada peraturan mengenai penataan pasar tradisional dan pasar modern yaitu Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tetapi tidak

bisa memberikan perlindungan kepada pasar tradisional dengan semakin maraknya pasar modern, seperti juga yang diungkapkan oleh Bapak Drs.Teguh Hariyono, yaitu :“ Banyak yang sudah berjalan tetapi tidak sesuai dengan Undang-Undang, kenyataannya masih banyak bermunculan pasar modern, makanya kita menggodok Perda ini yang di dalamnya juga berisi jarak pendirian pasar Modern.”

(Wawancara, Tanggal 13 Januari 2012, di Ruang Kerja)

Dinas Perindustrian Perdagangan, dan Pasar yang lebih bertanggung jawab dengan pasar- pasar tradisional di Kabupaten Malang dan tentunya juga dukungan dari pihak-pihak terkait dan bertanggung jawab dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat salah satunya yang berperan adalah para anggota DPR. Bapak Drs.Teguh Hariyono menjelaskan bahwa :“ kita tetap berkomunikasi dan sharing dengan Disperindag dan Pasar karena ini adalah Tupoksi mereka dan ini inisiatif dari mereka dari pihak eksekutif dan ada tim Raperda, kita bahas bersama secara kondusif dan setiap Perda dalam peraturan perundang-undangan harus bisa mendapat persetujuan dari DPRD.”

(Wawancara, Tanggal 13 Januari 2012, di Ruang Kerja)

Untuk rencana selanjutnya dengan pasar Dampit sebagai pasar tradisional dan pasar-pasar lain yang ada di Kabupaten Malang ini akan terus diupayakan keberadaanya, yaitu :

“ Ke Depan InsyaAllah Pasar-pasar Tradisional yang ada di Kabupaten Malang ini, ada 39 pasar Tradisional termasuk di dalamnya Pasar Dampit akan kita berikan penataan lagi. Dan tidak kalah pentingnya bahwa ada keterbatasan dana kita karena anggaran untuk memberdayakan Pasar itu. Seperti yang kita ketahui di kota kan cuman 5 kecamatan, di Batu 3 Kecamatan itu pun masih ribut masalah pasar. Lha kita ada 33 Kecamatan dengan jumlah 39 pasar Tradisional yang harus kita pikirkan dengan keterbatasan anggaran yang harus kita bagi ke sekian luas wilayah.”

(Wawancara, Tanggal 13 Januari 2012, di Ruang Kerja)

Beliau meneruskan penjelasannya :

“ Kita akan menata Kepanjen dulu yang sebagai ibu kota kabupaten, ya memang kita ini kayaknya diskriminatif apalagi melawan arus globalisasi dsb tapi tidak papa, di tempat lain sudah bisa diterapkan dan kalau itu salah, Perda ka nada uji petik nantinya yang disampaikan mulai dari Depdagri sampai ke Pemerintah Pusat dari Gubernur, kalau mereka melawan ada uji materi di MK atau MA.”
(Wawancara, Tanggal 13 Januari 2012, di Ruang Kerja)

Perkembangan yang ada di Kabupaten itu sendiri tidak terlepas dari perkembangan pasar Tradisional, dimana terdapat interaksi social antara penjual dan pembeli, yang membuat suasana menjadi *guyub*.

“ Sejauh ini kalau ada sentuhan kebersamaan dalam berekspresi di dunia ekonomi ini antara yang Modern dan Tradisional pasti bisa bangkit. Padahal ada seni di dalam pasar tradisional itu seperti tawar menawar itu yang sangat mendukung. Tapi masalah kebersihan, penataannya tidak begitu diperhatikan akhirnya dikatakan Pasar Tradisional sebagai pasar kumuh, *brand imagenya* sudah seperti itu beda kalau kita belanja di Indomaret tempatnya nyaman, ada AC nya dan kita tinggal memilih saja.”
(Wawancara, Tanggal 13 Januari 2012, di Ruang Kerja)

Keberadaan pasar mempunyai peran yang sentral terhadap masyarakat, baik dari segi social maupun ekonomi. hubungan antara pasar, budaya, dan masyarakat sudah melekat, seperti yang telah diungkapkan oleh anggota Dewan komisi A ini ;

“ Contoh lain yaitu pasar di Solo, bisa menjadi kacamata kita itulah wajah dari orang Indonesia khususnya Jawa untuk perpasaran tradisional. *Culture* sangat mempengaruhi, di Solo mentaramannya di sana orangnya bisa di ajak ngomong, nerimo ing pandum tapi budaya kita disini orangnya sulit di atur, banyak *ethnic* yang dominan yang selalu melawan di dalam Pasar Tradisional.”
(Wawancara, Tanggal 13 Januari 2012, di Ruang Kerja)

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Tanggapan *stakeholders* Masyarakat Pasar

a. Keberadaan Pasar Dampit bagi Masyarakat Pasar

Berdasarkan penelitian yang diperoleh di lapangan baik melalui wawancara maupun pengamatan di lapangan dapat diketahui dan digambarkan bahwa banyak kearifan lokal yang terdapat di pasar Dampit, adanya interaksi yang murni antara pedagang dan pembeli, tawar-menawar yang kadang menggunakan strategi, canda-tawa antar pedagang maupun pembeli, penjual dan pembeli mampu menentukan harga. Secara tidak langsung hal ini membentuk budaya dan pola interaksi khas yang membuat banyak pedagang menjadi akrab dengan pelanggannya. Pasar itu tempat orang jual beli, ada transaksi di dalamnya seperti juga yang tertuang dalam Peraturan Daerah kabupaten Malang nomor 10 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum menyebutkan bahwa pengertian pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar-menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, dengan tempat usaha berupa toko, kios, bedak, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki/dikelola dengan Hak Pemakaian Pasar. Walaupun kelihatannya hanya itu saja pengertian pasar, tetapi terdapat makna dalam di pasar itu, dengan adanya pasar banyak memberikan kontribusi bagi para pedagang walaupun hanya lulusan SMP bisa mencari uang di dalam pasar, selain transaksi jual beli sesama pedagang saling membantu walaupun ada persaingan usaha tetapi tetap gotong royong dan menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian yang tinggi.

Pernyataan di atas bisa memberi pengertian tentang pasar tradisional yang memberikan banyak arti. Banyak nilai-nilai budaya dalam pasar tradisional yang tidak bisa dibangun dalam pasar modern. Nilai-nilai moral juga banyak terdapat dalam pasar tradisional antara lain kejujuran, perjuangan hidup, adapula masalah premanisme, semua hal itu menjadi satu dalam suatu tatanan dan membentuk satu kesatuan yang menampilkan ciri khas manusia. Banyak pedagang yang hidupnya hanya bergantung pada pasar.

Pasar Dampit Kabupaten Malang adalah sebuah pasar nyata yang kegiatannya digerakkan oleh pelaku-pelaku ekonomi tradisional . Pasar Dampit adalah juga sebuah kelembagaan komunitas public yang sarat dengan motif ekonomi, lingkungan kelembagaan ekonomi yang di dalamnya mewujudkan prinsip-prinsip pertukaran dan distribusi yang berlangsung melalui interaksi mutual dalam bentuk transaksi barang dan jasa. Peran keberadaan pasar Dampit bagi masyarakat pasar dampit saat ini sudah sedemikian besar dan akan menjadi semakin besar sejalan dengan semakin tumbuh berkembangnya kehidupan perekonomian pada berbagai lapisan masyarakat. Bagi para pedagang, lingkungan pasar dampit tidak lagi bermakna sebagai tempat atau lokasi belaka, namun sebagai suatu komunitas turun temurun sudah menjadi habitat di dalamnya. Dilain sisi pasar dampit juga masih memiliki tradisi kelembagaan yang ditunjukkan melalui solidaritas sesama pedagang.

Pasar Dampit adalah sebuah pasar nyata, artinya pasar sebagai tempat pertukaran uang dengan barang, jual beli pertemuan tatap muka secara langsung diantara actor pelakunya. Secara keseluruhan yang menjadi actor pelaku di pasar selain daripada aparat otoritas pasar adalah para pedagang, pembeli, pelanggan, produsen, konsumen, pekerja, pengusaha, pemasok, pengujung, atau aktor kombinasi peran diantara subyek tersebut.

Tanggung jawab pemerintah salah satunya adalah membuat masyarakat hidup lebih sejahtera, baik di bidang ekonomi maupun social. Karena itu pemerintah dituntut untuk kreatif mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya. Pasar dampit adalah sebuah pasar desa , sebuah pasar yang terdapat di desa Dampit yang penduduknya masih sangat tradisional. Letak pasar Dampit jauh dari kota, maka barang atau komoditi utama yang diperjualbelikan di pasar pada umumnya adalah barang-barang hasil pertanian.

Pasar dampit terletak di pusat desa dampit diantara beberapa desa, sehingga posisinya sangat strategis. Pada hari pasaran jalanan yang berada di sebelah pasar digunakan oleh para pedagang yang digunakan oleh para

pedagang yang kebanyakan para makelar, pemborong, pedagang perantara yang menampung barang-barang produksi hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan dari masyarakat sekitar ataupun pedagang kecil yang menjual hasil-hasil produksinya. Mereka ada yang menjual barang-barangnya hanya dipinggir jalan saja, selain itu Karen letak pasar Dampit dekat dengan terminal banyak kendaraan angkutan desa, seperti pick up serta mobil angkut yang berasal dari luar desa.

Di pasar tradisional ini pedagang memiliki cara tersendiri dalam menentukan harga jual barang yaitu harga luncur yang belum fixed, dipihak lain pula pembeli pada banyak kejadian dalam menawar barang juga amat berlebihan bahkan dibawah harga pokok pembelian.

Diakui, bahwa memang pedagang ketika menawarkan barang pada banyak hal juga memberi harga tinggi, namun sudah menjadi khas pula tingkat harga yang dinyatakan pada awal negoisasi sesudah harga itu direspon oleh calon pembeli itu selalu diikuti dengan tambahan komunikasi lisan, sebagaimana siasat klasik Pedagang dengan meluncurkan kata-kata “*saget dinyang*” (bisa ditawar) ; dengan harapan agar pembeli tidak segera pergi meninggalkan bedak dan berlanjut dengan transaksi.

Tegur sapa pada setiap pengunjung pasar yang lewat merupakan cara kebiasaan yang sering memberikan hasil yang efektif untuk dapat menghentikan langkah seorang calon pembeli. Kemenangan ini semakin terasa disaat terjadi transaksi yang sukses, karena jaringan relasi telah terbuka melalui interaksi inter personal yang kuat. Boleh jadi ini yang membedakan dengan banyak pedagang lain, Pedagang menyikapi setiap konsumen adalah sebagai suatu potensi untuk membangun relasi melalui tawar menawar jual beli yang sukses.

Tidak satupun pembeli yang berada di pasar tradisional yaitu di sini adalah pasar Dampit ketika berbelanja melepaskan kesempatan menawar barang walaupun sudah mendapatkan penjelasan harga dari penjual, kecuali hal ini tidak dilakukannya ketika menjadi konsumen disaat berbelanja makan di warung di dalam pasar tradisional. Demikian pula hampir tidak dijumpai

pedagang yang tidak 'menawar-sapa' kepada setiap pengunjung yang masuk ke pasar. Karena kebanyakan pengunjung lebih banyak bertindak dengan cara melihat, mengamati barang daripada bertanya, maka satu sama lain pedagang berlomba menarik perhatian pengunjung. Jadi komunikasi verbal sangat diperlukan dalam berdagang.

Tawar menawar adalah nafas kehidupan pasar tradisional sebagaimana halnya Pasar Dampit, dengan kata lain kalau di dalam pasar ini tidak ada terdengar suara-suara yang berdengung, maka disaat itu menandakan bahwa pasar ini sedang lesu karena tiada kunjungan pembeli yang melakukan transaksi. Dengan kata lain, kalau dalam sebuah pasar tidak ada tawar menawar, maka pasar itu adalah bukan disebut sebagai pasar tradisional.

Tentulah dari pernyataan di atas terdapat rasionalitas yang menjadi alasan sehingga pedagang memilih dan tetap berjualan di Pasar Dampit, ketika motif daya ikat dan daya pikat itu dapat disebut sebagai insentif atau *rent* maka yang dimaksud adalah kunjungan dari banyak orang. Selama pedagang yakin bahwa pasar masih mendapatkan kunjungan banyak orang maka selama itu pula pedagang akan memandang pasar masih sebagai tempat usaha yang menjanjikan. Terdapatnya keanekaragaman, atau ketersediaan berbagai macam barang membuka peluang bagi kunjungan berbagai kalangan pengunjung serta pengunjung dapat mendapat kemudahan untuk memperoleh keperluan berbagai barang. Pasar Dampit juga menjadi barometer terhadap informasi tingkat harga barang kebutuhan pokok dan semacamnya. Bagi kebanyakan konsumen pembeli, bahwa informasi harga-harga barang adalah bersumber dari tingkat harga di Pasar Dampit, adanya harga yang relative lebih murah karena pasar Dampit adalah satu-satunya pasar yang ada di desa Dampit ini menjadikan pasar Dampit selalu mendapat kunjungan dari para konsumen pembeli, bahkan dari luar desa.

Berdasarkan hasil penelitian banyak pedagang pasar yang bergantung pada Pasar Dampit ini, tidak hanya pedagang saja banyak masyarakat yang

membutuhkan pasar karena alasan bahwa di pasar Dampit lebih lengkap dan pasar Dampit ini adalah pasarnya pasar masyarakat Dampit. Pasar Dampit merupakan lahan bagi tukang ojek dan penarik delman dalam mencari penghasilan. Dari ungkapan-ungkapan yang penulis temukan di lapangan tersebut di atas menunjukkan bahwa Pasar Dampit memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat pasar Dampit (pedagang, pembeli, tukang ojek, dll). Sedemikian kuatnya masyarakat pasar tradisional yang selalu saja tetap memandang penting pasar ini sebagai tempat usaha yang menjanjikan bagi sumber penghidupannya.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas banyak masyarakat desa Dampit yang menaruh harapan hidupnya di pasar dan menjadi sandaran hidup, dalam kondisi apapun, sebaiknya pasar tradisional harus tetap dijaga eksistensinya karena dari pasar tradisional tersebutlah sebagian besar masyarakat kita menggantungkan hidupnya. Bukan hanya keberadaannya saja yang harus dipertahankan, melainkan kearifan local, nilai-nilai luhur yang murni dalam pasar tradisional juga harus tetap dijaga.

Di pasar tradisional pula memang terjadi persaingan antara satu pedagang dengan pedagang lainnya seperti yang telah diungkap di atas, tetapi dalam pasar tradisional tersebut terdapat ikatan kekerabatan yang bersifat “*family*”, sehingga terciptanya rasa toleransi, tolong menolong, dan kerukunan dalam hubungan antar pedagang tersebut, contohnya ketika ada seorang pembeli yang mencari barang, ternyata pedagang tersebut telah kehabisan stok barang itu, tak jarang pedagang itu meminjam barang untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Dari hal itu bisa dilihat bahwa di dalam pasar juga memberikan kepuasan bagi konsumen. Rasa kepercayaan yang timbul antara pedagang membuat konsumen merasa puas dan senang berbelanja di pasar. Masyarakat Dampit yang sebagian besar adalah golongan Mentaraman, hidup dalam dinamika pandangan kejawaan memiliki relasi sosial yang cukup baik.

Pasar tradisional juga bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, tetapi di dalamnya secara tidak sadar

tercipta budaya komunikasi yang hangat antara penjual dan pembeli, hal-hal tersebut yang masih jarang ditemui di pasar modern yang cenderung berifat individualistik. Jika pasar tradisional mulai ditinggalkan masyarakat, secara otomatis nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam pasar tradisional bisa luntur.

Pada zaman serba modern ini, masyarakat lebih cenderung datang ke supermarket atau minimarket yang memang menciptakan suasana nyaman, bersih, sejuk, rapi. Selain itu nilai prestise yang ditawarkan ketika membeli barang dari supermarket atau minimarket membuat pasar tradisional semakin tersisih. Hal ini lantaran masyarakat sudah menginginkan sesuatu yang bersifat praktis dan instan, maka pasar modern dianggap menjadi solusi ampuh terhadap pemenuhan kebutuhan. Walaupun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kesiapan pihak pengelola supermarket lebih baik terhadap menciptakan kondisi berbelanja yang kondusif yang membuat masyarakat 'betah' berada lama-lama dalam supermarket. Namun demikian, dibalik semua kenyamanan di pasar modern menimbulkan budaya yang cenderung merugikan masyarakat secara tidak langsung karena keberadaan supermarket menimbulkan sifat individualistic, konsumtif, dan lebih mementingkan prestise. Tidak ada nilai-nilai budaya di dalam interaksi pasar modern.

Pasar melalui mekanisme harga diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk memecahkan masalah pokok ekonomi yaitu produksi, konsumsi dan distribusi. Secara ideal, mekanisme pasar dipandang paling dapat dipercaya, efektif dan efisien. Karena esensi dari pasar adalah transaksi, maka pasar harus bisa mengeliminasi segala sesuatu yang mengganggu kelancaran transaksi. Tanpa mengesampingkan fungsi dan peran pasar untuk memfasilitasi sesuatu transaksi secara efisien serta penuh perhitungan untuk mendapatkan untung, senyatanya tidak dapat menutup realitas pula jika pasar adalah juga sebagai modus interaksi social-budaya bahkan pasar juga mengandung fungsi religious sebagai sarana ibadah. Di pasar tradisional semacam pasar Dampit ini, keadaan yang sedemikian ini dapat diketahui

dengan mudah melalui berbagai indikasi bekerjanya pertukaran atas dasar logika memberi dan menerima sesuatu-, disertai oleh logika- tanda – terkait dengan status sosialnya.

Apapun yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat, sehendaknya tidak melupakan warisan budaya lokal yang sarat akan nilai-nilai social. Karena di dalamnya banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepada pasar Dampit tersebut, tidak seharusnya pasar tradisional hilang begitu saja, karena keberadaannya menyetuh semua kalangan. Ketika pasar tradisional hilang, maka satu lagi kebudayaan lokal yang punah.

b. Tanggapan Masyarakat Pasar Dampit mengenai

1)Tanggapan Masyarakat Pasar Dampit Mengenai Kebersihan Pasar

Dari penelitian yang penulis lakukan di pasar Dampit banyak masyarakat pasar baik pedagang maupun pengunjung yang mengeluhkan dengan masalah kebersihan pasar. Selama ini citra pasar tradisional adalah bau,kumuh, dan becek. Hal itu juga diungkapkan oleh beberapa pedagang, pasar Dampit kebersihannya masih kurang dengan minimnya petugas kebersihan dan kurang tanggapnya petugas pasar dalam membersihkan pasar.

Banyak sampah yang sering menumpuk di TPS membuat keresahan bagi banyak masyarakat pasar sehingga menimbulkan aroma yang tidak enak. Ketika hujan datang ungkap para pedagang sering terjadi banjir karena dikarenakan sampah-sampah yang berserakan di selokan-selokan. Kalau keadaan sudah seperti itu pasar menjadi becek dan kelihatan kumuh sehingga mengakibatkan para pengunjung jadi malas untuk masuk ke pasar Dampit.

Di saat hujan deras memang sering banjir karena atapnya banyak yang bocor dan lahan di luar lahan pasar selalu mendapat jatah luapan air dari selokan yang buntu oleh sampah dan tidak ketinggalan menebar aroma busuk. Ketika keadaan ini berlangsung pada jam pasar, sontak pula para pedagang beramai-ramai menghalau air yang masuk ke dalam pasar dengan alat yang diperlukan untuk segera mengalirkan ke arah saluran pembuangan

atau resapan air. Tanpa campur tangan petugas pasar masing-masing pedagang bersama-sama membersihkannya.

Pasar Dampit ini menurut salah satu pedagang adalah pasar yang kumuh, karena sampah-sampah sering terlambat di angkut. Kebersihan petugasnya dari pasar, iurannya termasuk jadi 1 dari karcis dengan retribusi. Minimnya petugas kebersihan membuat penanganan kebersihan menjadi lambat dan para petugas hanya membersihkan yang tampak dari luar pedagang yang ada di dalam jarang tersentuh oleh petugas. Dari sini perlu ketegasan dari petugas pasar untuk meminimalisir keadaan pasar yang kotor dan kumuh.

2) Tanggapan Masyarakat Pasar Mengenai Keamanan Pasar

Hasil peneliti di lapangan dengan wawancara ke beberapa masyarakat pasar khususnya pedagang mengenai keamanan pasar, banyak ditemukan tanggapan-tanggapan dan cerita tentang kondisi keamanan yang masih kurang karena masih sering terjadinya ulah nakal orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuat para masyarakat jadi merasa enggan untuk berbelanja di pasar, yaitu contohnya pencopetan. Bukan asing lagi yang menempel di semua pasar tradisional dengan pencopetan.

Pencopetan adalah salah satu masalah keamanan yang klasik yang berada di pasar dampit, kerawanan tidak lebih dari itu, namun pula relative susah untuk dihilangkan karena kejadian itu semakin marak terjadi di Pasar Dampit dengan modus yang berbeda-beda. Seperti yang diungkapkan oleh pedagang bahwa semakin lama semakin banyak kasus pencopetan yang terjadi di pasar Dampit. Kurang tanggap petugas pasar dalam mengantisipasi masalah ini yang membuat para pedagang geram, karena dari pihak petugas pasar masih jarang memantau ke dalam pasar. Padahal para pedagang setiap bulannya ditarik uang keamanan rata-rata sebesar Rp. 6.000. Dan yang paling ditakutkan oleh pedagang adalah kalau ada kasus pencopetan, kepercayaan masyarakat menjadi berkurang dan itu juga merupakan salah satu faktor menurunnya pasar (sepi).

Taraf pekerjaan petugas keamanan dinas pasar sehari-hari adalah pada tingkat melakukan pemantauan keamanan pada siang hari dan penjagaan keamanan pada malam hari, menerima laporan pengaduan pengunjung pasar yang kehilangan dan tidak lebih dari itu. Tetapi nyatanya peran dari aparaturnya masih belum kelihatan, seperti yang telah diungkapkan. Dari hal di atas perlu ada keterbukaan dari para petugas pasar untuk mencari jalan keluar dan mengantisipasi serta meminimalisir kejadian pencopetan di dalam pasar Dampit guna untuk mengembalikan citra pasar dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar Dampit. Bila otoritas pasar berhak menarik biaya retribusi keamanan, secara normatif semestinya juga bahwa pedagang menikmati rasa nyaman, aman yang sebanding. Ini yang banyak dimasalahkan dan dipertanyakan oleh pedagang.

3) Tanggapan Masyarakat Pasar Mengenai Ketertiban Pasar

Situasi pasar yang tertib sangat di inginkan oleh masyarakat pasar, kapanpun saatnya selalu menjadi syarat yang diperlukan bilamana suatu pasar dikehendaki dapat berfungsi dengan baik. Ketertiban adalah menyangkut pada ketaatan dan kepatuhan semua pelaku pasar termasuk pula otoritas pasar pada aturan dan norma pasar dalam menjalankan peran maupun kepentingan masing-masing. Dengan logika yang sama, terdapat adanya pelanggaran ketertiban pasar yang disebabkan oleh kesalahan perilaku masyarakat pasar, baik pedagang, pengunjung, maupun pengelola pasar secara kolektif maupun secara sendiri-sendiri.

Menunjuk pada salah satu sumber dari ketidaktertiban pasar tradisional, yakni PKL, diantara para pedagang terdapat penyikapan yang berbeda demikian pula pada pengelola pasar juga memiliki standar terhadap keberadaan para PKL. Petugas pasar memberikan sebutan sebagai pedagang tidak bersurat. PKL ini dianggap sebagai pengganggu ketertiban. PKL yang menempati seputar lingkaran sisi luar pasar, kanan-kiri pasar, tangga jalan masuk, ruang terbuka, bahkan di dalam pasar sepanjang lorong jalan utama pasar, di depan tokoh/ bedak pedagang yang membuat pelintas/pengunjung susah lewat karena jalan sempit.

Ketika situasi ini ditanyakan pada pedagang banyak yang mengeluhkan masalah PKL ini yang menyebabkan penataan pasar tidak rapi, tidak nampak pasar itu menghadap kemana, mana yang depan dan mana yang belakang. Tidak hanya itu saja banyak pedagang yang menyebutkan kalau PKL menyebabkan jalan masuk menuju pasar semakin sempit. semua pedagang meresahkan hal ini, tetapi belum ada kejelasan dari petugas pasar dalam menangani PKL-PKL. Selama ini menurut para pedagang petugas pasar hanya menegur sekali dua kali saja tetapi setelah itu dibiarkan dan ditarik retribusi. Dari sini masih belum ada ketegasan dari petugas pasar yang bertanggung jawab penuh terhadap ketertiban pasar. Tetapi tidak hanya dari para PKL yang menyebabkan penataan pasar tidak rapi tapi menurut pengunjung yang peneliti wawancara pedagang juga ikut andil membuat pasar tidak tertata dengan rapi karena banyak pedagang yang mengeluarkan dagangannya sampai di teras-teras yang menyebabkan jalan juga semakin sempit.

Perlu ada kesadaran dari setiap pihak yang berkepentingan baik itu dari pedagang maupun otoritas publik. Otoritas publik mempunyai kewenangan yang tinggi dalam memberikan ketegasan kepada para pedagang yang tidak menaati aturan yang ada, jadi untuk menumbuhkan adanya nilai seperti itu diperlukan keseriusan dari para petugas pasar untuk menangani masalah-masalah yang ada di pasar seperti contohnya PKL agar tidak menimbulkan *asymmetric information*.

4) Tanggapan Masyarakat Pasar Mengenai Retribusi Pasar

Masalah retribusi sangat sensitif bagi para pedagang, banyak yang antusias ketika membicarakan retribusi. Retribusi pasar merupakan pajak atau iuran yang harus dikeluarkan pedagang kepada petugas pasar. Retribusi ditarik kepada penghuni pasar oleh petugas yang berwenang ada yang setiap hari dan ada yang langganan yaitu satu bulan sekali.

Dalam wawancara dengan para pedagang penulis menangkap bahwa mereka menginginkan ada timbal balik dari pemerintah ketika mereka setiap hari mengeluarkan selebaran uang untuk membayar retribusi karena yang

dirasakan oleh para pedagang selama ini belum ada kontribusi yang diberikan dari pembayaran retribusi itu fasilitas juga belum memadai, banyak infrastruktur yang rusak. Dengan pengertian maupun pemahaman tersebut telah menunjukkan kalau bagi kebanyakan pedagang, mengkesankan bahwa pembayaran uang retribusi harus disertai dengan hak-hak pelayanan yang harus diterimanya terkait dengan pembayaran termaksud. Bahwa pelayanan yang diperoleh pedagang terkait dengan retribusi dari pengelola pasar belum memadai sesuai dengan harapan para pedagang.

Dari ungkapan di atas Pemerintah daerah juga dapat dipandang telah gagal melindungi pasar tradisional, ketika lebih terpicat perhatian dan fasilitasi perijinan dan penyediaan lahan pada berbagai pasar modern yang bermodal besar, sementara disisi lain pasar tradisional semacam pasar dampit menunjukkan kinerja ekonomi yang semakin menurun. Pemerintah bertindak menjadi pihak yang berkepentingan mendapatkan pendapatan besar atas alasan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Ketika pemegang otoritas pasar menyelenggarakan pungutan pada para pedagang yang bernama “retribusi”, maka sifat dari pungutan itu adalah seharusnya bersifat timbal balik atau memenuhi hubungan *reciprocity* yaitu harus diimbangi dengan fungsi pelayanan yang memadai bagi kepentingan transaksi di pasar, yang ini berbeda sifatnya dengan pungutan pajak.

Semestinya pula secara normatif dengan otonomi daerah menurut proporsinya pemerintah daerah termasuk warga masyarakat di dalamnya memiliki otoritas sendiri mengatur daerahnya dan itu mencakup pula pada aspek ekonomi di daerah yang juga menunjuk pada pasar tradisional sebagai institusi publik. Warga masyarakat termasuk pedagang tentunya memiliki hak dan kesempatan untuk menikmati fasilitasi dari pemerintah (kabupaten) agar kinerja pasar dapat meningkat. Dengan ini, penataan dan pengelolaan pasar dampit ini sebagai milik publik seharusnya lebih banyak berpihak pada kepentingan publik (masyarakat), karena dengan adanya pasar secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

c. Substansi *Emic* Pedagang Pada *Sustainability* Pasar Dampit

Secara substansial, terhadap masalah yang dihadapi oleh hampir semua pasar tradisional di Indonesia, yakni *omzet* usaha yang menurun dan daya saing yang tidak dapat mengimbangi dan menandingi kinerja pasar modern. Seperti apa yang sudah dikemukakan oleh pedagang bahwa perkembangan pasar dari tahun ke tahun grafiknya tidak menanjak, walaupun naik tapi kenaikannya tidak drastis, bisa dikatakan semakin tahun semakin menurun

Banyak keinginan-keinginan pedagang dengan keberlanjutan pasar Dampit yang sebagian banyak pedagang adalah penduduk asli Dampit yang mensandarkan hidupnya hanya pada pasar. Keinginan para pedagang berkaitan dengan pembenahan infrastruktur yang ada di pasar Dampit, banyak yang harus dibenahi dan fasilitas yang lebih mendukung. Dan juga masalah jarak pendirian swalayan (pasar modern) yang jauh keberadaannya dari pasar Dampit.

Infrastruktur yang baik sangat erat kaitannya dengan suatu kinerja pasar yang baik. Ada banyak permasalahan terkait dengan infrastruktur pasar, adanya permasalahan adalah bersumber pada mengelola dan mengorganisasi bangunan pasar. Pasar Dampit sebagai pasar tradisional dapat dikatakan mengalami permasalahan yang terkait dengan masalah umum yang juga dihadapi pasar-pasar tradisional lainnya, yakni bangunan pasar yang kurang terawat, kebersihan yang tidak terpelihara dengan baik, selokan bermasalah ketika turun hujan deras, sempit karena koridor jalan terisi oleh barang dagangan atau PKL yang mangkal, gelap karena kurang penerangan, pengap karena sirkulasi udara kurang baik, dan gerah.

Berlarutnya kondisi infrastruktur sangat berkemungkinan besar diantaranya dilatari oleh disorientasi kepentingan pengelola pasar (pemegang otoritas pasar) maupun kesenjangan kepentingan pedagang pasar, sehingga kepedulian terhadap infrastruktur pasar yang nyaman menjadi terabaikan. Orientasi kepentingan pengelola pasar boleh jadi menempatkan pasar Dampit hanya sebatas sebagai sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD), bagi petugas karyawannya sebagai sumber pendapatan jangka pendek tanpa memandang dalam perspektif lainnya yang lebih luas, yaitu mengenai sustainabilitas, serta pula memaknai fungsi pasar Dampit menurut sudut pandang sepihak.

Di sisi lain, pedagang juga terdapat keterbatasan dalam mempengaruhi perubahan infrastruktur pasar karena posisinya dalam pasar Dampit adalah masih banyak bukan sebagai pemilik bedak. Termasuk pula dengan adanya formalisasi terhadap masalah pemeliharaan, keamanan, kebersihan, yang ditangani oleh petugas pasar, menjadikan upaya mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas infrastruktur pasar Dampit bukan menjadi kompetensi para pedagang.

Kinerja pasar selalu dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur pasar telah diakui oleh semua pihak pasar, pedagang, pembeli, maupun pengelola pasar. Infrastruktur yang diantaranya berkenaan dengan beban tempat usaha, keberagaman ketersediaan pelayanan, segi komparasi tempat usaha, kemudahan jangkauan, aman dari gangguan, fasilitas, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, dsb. Pasar Dampit sebagai ruang publik yang pada terbangun organisasi, struktur, yang walaupun hubungan social yang terjadi dibangun sendiri oleh komunitas pedagang, namun ruang publik ini tidak terlepas dari intervensi pemerintah.

Sebagai ruang publik pada diri pasar dengan sifatnya yang birokratis konvensional, sektor publik relatif tidak leluasa dan lambat dalam berhubungan dengan inovasi bilamana dibandingkan dengan sektor bisnis (yang melekat pada pasar modern). Kelambanan pasar sebagai ruang kepentingan publik dalam melakukan inovasi terkait erat dengan tradisi dan karakternya yang relative statis, formal, dan rigid, cenderung mempertahankan *status-quo* dan tidak responsive terhadap perubahan. Sebagai pengganggu kinerja di pasar bukan sebatas dalam konteks kelembagaan, namun pula menyangkut pada individu pelakunya, karena pada umumnya pelaku (ekonomi) yang terlibat di sektor publik hanya menjalankan tugas dan fungsinya secara apa adanya. Pelaku pasar

tradisional semacam pasar Dampit bilamana disandingkan dengan pelaku pasar modern, tentulah terdapat semacam kecenderungan yang sifatnya tidak sama.

Pesatnya perkembangan pasar modern membuat pasar tradisional semakin terdesak. Pasalnya pasar tradisional yang selama ini dicitrakan becek, bau, kumuh, dan jorok membuat masyarakat enggan berbelanja di pasar tradisional. Sementara tawaran lebih baik datang dari pasar modern. Konsumen terfasilitasi dengan tempat yang bersih, nyaman, dan strategis, berbeda jauh dengan pasar tradisional yang fasilitasnya sangat kurang. Keadaan fisik pasar Dampit banyak yang rusak, jalan, atap banyak yang bocor, keinginan pedagang ada renovasi, yang penting untuk saat ini yang harus segera ditangani adalah atap-atap yang bocor dan saluran-saluran air yang dipenuhi dengan sampah. Ungkap dari beberapa pedagang yaitu Ketika semua sedikit demi sedikit diperbaiki banyak pedagang yang peduli dan rutin membayar retribusi.

Kondisi pasar Dampit yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat pasar khususnya kebanyakan pedagang untuk pembenahan terhadap infrastruktur pasar. Upaya pembenahan infrastruktur sangat perlu untuk mengembalikan minat konsumen terhadap pasar tradisional dan mengembangkan keberadaan pasar Dampit sebagai pasar tradisional. Pihak pemerintah masih belum menyentuh bangunan pasar. Seperti yang diungkapkan oleh pak Ponidi penghuni pasar Dampit yaitu bahwa mulai pasar pindah sampai sekarang masih belum ada renovasi.

Kurangnya komunikasi antara pedagang dan aparat membuat tidak seimbang dan berjalan sendiri-sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Ponidi, bahwa Komunikasi dengan petugas pasar sangat kurang, walaupun ada sosialisasi belum efisien karena sosialisasinya hanya lewat selebaran kertas dan tidak dipedulikan lagi oleh pedagang-pedagang di pasar.

2. Tanggapan *Stakeholders* Pemerintah

a. Tanggapan *Stakeholders* pemerintah terhadap keberadaan Pasar Dampit.

Dari beberapa petugas pasar yang peneliti wawancara banyak kesan positif tentang keberadaan pasar Dampit itu dan arti penting dari adanya pasar. Perlu pembuktian dari para petugas pasar yang disini mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan pasar karena disini peran dari pemerintah sangat banyak jadi harus benar-benar berusaha melakukan tugas sebagai mestinya dengan penuh tanggung jawab. Karena keberadaan pasar sangat memberikan banyak kontribusi, baik itu pemerintah ataupun masyarakat pasar.

Pedagang dan lembaga pasar tradisional benar-benar memerlukan perubahan-perubahan yang dapat meningkatkan daya saing maupun posisi tawar terhadap pemasok sehingga kelangsungan usahanya mendapatkan peluang pasar yang lebih besar, dapat mengembangkan sistem pemasaran, jalinan hubungan kemitraan antar pelaku dalam proses pemasaran, pengembangan potensi usaha agar memiliki keunggulan komparatif untuk dapat mengimbangi kinerja supermarket. Jika ini tidak dilakukan, maka pasar tradisional wadah utama penjualan produk-produk berskala ekonomi rakyat yang beraal dari petani, nelayan, pengrajin dan home industri, sandaran hidup puluhan juta orang akan semakin banyak yang tutup dan semakin banyak yang akan kehilangan mata pencaharian.

Dalam sebuah konsep pembangunan, pemerintah harus bergerak cepat untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Harus ada perubahan-perubahan dari pemerintah untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada di dalam pasar Dampit agar tujuan-tujuan yang tertulis dalam visi dan misi bisa tercapai. Seperti apa yang telah dikemukakan oleh Kristiadi (1994) memberi pengertian tentang administrasi pembangunan adalah “administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian.” Selanjutnya dengan misi yang jelas dari pemerintah, semua pihak dapat memutuskan kebijakannya sendiri apa yang sebaiknya

dilakukan dan bagaimana cara terbaik melakukannya, serta memberikan dampak positif bagi semua lapisan dimana pembangunan itu diselenggarakan termasuk lingkungan sekitarnya.

Perencanaan adalah suatu gejala yang umum dan mutlak diperlukan, terutama bagi usaha-usaha yang mempunyai lapangan yang luas. Selain dari itu perencanaan itu urgensinya esensial serta merupakan fungsi pertama yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, jadi merupakan persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mewujudkan tujuan. Banyak kegiatan pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah setidaknya pada tahap awal pembangunan yang paling utama adalah pembangunan prasarana dasar, baik prasarana ekonomi maupun sosial. Prasarana ekonomi meliputi perhubungan dan transportasi, energi, irigasi, pasar, dan sebagainya. Pembangunan yang berkelanjutan menuntut administrasi publik yang tanggap terhadap masalah yang di hadapi lingkungan masyarakat, baik itu lingkungan fisik alam, lingkungan ekonomi maupun lingkungan sosial. (Kartasamita, 1996). Dan disini perlu adanya perbaikan-perbaikan dari pihak pemerintah untuk memperbaiki prasarana dasar yang ada di pasar Dampit agar konsistensi dari pasar Dampit berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah di rencanakan, karena pemerintah bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan masyarakat dan dengan adanya pasar mendukung pembangunan serta dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Dari sini perlu ada *Public planning* untuk mewujudkan tujuan dan menetapkan arah dan strategi, sehingga nantinya terdapat unsur-unsur yang terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur, program dan proses. Publik adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur, dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan Pemerintah sebagai pembangkit partisipasi seluruh lapisan masyarakat juga harus mampu melihat dan mengantisipasi keadaan dalam arti lebih baik mencegah akan terjadinya berbagai kemungkinan kendala daripada menanggulangi di kemudian hari.

b. Tanggapan Pemerintah Terhadap Pasar Dampit mengenai

1) Tanggapan Pemerintah Terhadap Kebersihan Pasar Dampit

Pasar Dampit sebagai satu-satunya pasar di desa Dampit, pusatnya pasar masyarakat Dampit, banyak potensi yang terdapat di pasar Dampit . Pasar dampit selalu tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan sebagai pusat perdagangan. Kondisi pasar kurang terawat sehingga penampilannya terkesan kumuh. Seperti apa yang di ungkapkan oleh banyak pedagang dan petugas pasar karena yang menjadi sorotan utama di pasar Dampit adalah masalah kebersihan.

Otoritas pasar berdasarkan penelitian selalu mengupayakan masalah kebersihan karena secara rutin dari pihak UPPD selalu membersihkan pasar yaitu mengangkut sampah dan menyapu lantai. Yang menyebabkan kesan kumuh pada pasar adalah tumpukan sampah yang ada di TPS, menurut staf pada UPPD pasar Dampit tugasnya hanya mengangkut sampah ke TPS untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Kurang ada koordinasi dari kedua dinas ini yang membuat adanya saling tuduh dan mengalihkan tanggung jawabnya. Koordinasi menempati peranan penting karena begitu banyak di pasar Dampit ini tumpang tindih pekerjaan yang disebabkan kurang koordinasi seperti contoh di atas antara petugas pasar dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam menangani sampah, kendati keseluruhannya itu dapat disinkronkan dan diatur demi tujuan dan kepentingan bersama.

Adanya eksternalitas yaitu polusi sampah, adanya barang publik adalah menjadi alasan pembenaran tentang perlunya pemerintah dalam pengelolaan Pasar Dampit, termasuk pula mereduksi berbagai potensi kegagalan pasar (*market failure*) yang menyangkut informasi pasar yang tidak sempurna. Informasi yang pada banyak hal enggan dilakukan oleh pelaku pasar. Diaperindag dan Pasar maupun UPPD Dampit perlu bekerja dalam konteks melengkapi mekanisme pasar dan mengambil langkah tindakan yang mendorong pasar Dampit bekerja lebih baik.

Pengelola pasar memiliki keharusan menjalankan secara baik kewajiban dan tanggung jawab mengatur ketertiban, kebersihan dan kenyamanan, kesehatan, memelihara keamanan pasar sekurang-kurangnya sebanding dengan standar tuntutan kualifikasi pengelolaan sebagaimana seperti yang ada di pasar modern. Masalah kebersihan bukan masalah yang mendominasi di dalam pasar Dampit, bisa diselesaikan bersama-sama. Perlu ada kesadaran dari setiap individu baik itu otoritas pasar maupun masyarakat pasar dalam menjaga kebersihan. Untuk menyukseskan ada baiknya di setiap sudut pasar disediakan tempat sampah agar pengunjung juga sama-sama menjaga kebersihan pasar.

2) Tanggapan Pemerintah mengenai Ketertiban Pasar Dampit

Salah satu resiko yang menyertai pasar Dampit ini adalah tata ruang dan tata isi pasar. Pasar Dampit ini menjadi berkesan kumuh dan semrawut. Struktur penataan ruang pasar tradisional dampit ini tidak menjadikan perilaku dan penampilan para pelakunya terdorong kearah tindak yang mengapresiasi ketertiban, peka pada kebersihan. Sehingga 'pendidikan', pembelajaran', tertib dan bersih adalah salah satu misi penting yang harus di bangun oleh pasar tradisional agar kinerjanya meningkat. Disini tantangan pengelola dan pedagang untuk dapat berbenah diri; untuk terlebih dahulu menertibkan diri, memelihara kebersihan; maka setelah itu akan dapat membatasi gangguan ketidak tertiban.

Peran seorang pemimpin sangat mempengaruhi karena pemimpin adalah seseorang yang mempengaruhi pihak lain yang berkepentingan melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Perlu ada koordinasi di sini antara pemimpin dan bawahan, karena koordinasi menempati peranan penting karena begitu banyak tumpang tindih pekerjaan yang disebabkan tidak adanya koordinasi, kendati keseluruhannya itu dapat disinkronkan, diatur demi tujuan dan kepentingan bersama. Menurut hasil penelitian dari rata-rata petugas pasar banyak yang menyebutkan kalau pedagang pasar Dampit itu sulit di atur, dengan besarnya pasar Dampit perlu kesabaran yang tinggi

dalam menangani para pedagang. Banyak para PKL yang berjualan di tempat-tempat fasilitas pasar Dampit seperti di jalan-jalan, di tangga-tangga menuju ke pasar selalu di penuh dengan para PKL. Petugas selalu memberikan peringatan kepada para PKL ketika awal PKL itu bermunculan tetapi hal itu tidak seterusnya dilakukan oleh petugas . perlu suatu ketegasan pemimpin dengan bawahan dalam berkoordinasi agar bisa mengatasi masalah seperti PKL.

Di pasar Dampit para petugas pasar masih belum ada ketegasan dalam mengatasi suatu masalah yang berkaitan dengan para PKL, dari awal harus ada aturan yang jelas mengenai PKL. Di sisi lain PKL yang perspektif usahanya adalah semata-mata mencari penghasilan tanpa menghiraukan perspektif norma dan aturan dalam memanfaatkan setiap jengkal lokasi pasar untuk ditempati, dan mereka juga membayar retribusi. Disini diperlukan peran dari pemerintah seperti menurut Siagian (1984, h. 194-202) yaitu pemerintah selaku dinamisator, bahwa pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditujukan dengan sikap, tindak-tanduk, perilaku dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan. Dari pengertian di atas perlu ada keterbukaan dari pemerintah untuk memeberikan pengarahan kepada para pedagang agar tidak terjadi *asymmetric information*.

Penurunan kinerja yang terjadi di pasar adalah karena terdapat adanya pelanggaran ketertiban pasar, yang disebabkan oleh tindakan moral hazard para pelaku pasar, baik pedagang, maupun pengelola pasar secara kolektif maupun secara individu. Sebagai regulator, arah kebijakan yang semestinya adalah wajib memelihara kelancaran distribusi perdagangan, membuat aturan hukum yang dapat melindungi kelangsungan pasar dengan baik demi kesejahteraan masyarakat maupun memberikan pelayanan publik kepada semua pelaku ekonomi yang terkait dengan pasar tradisional secara adil, melakukan pengawasan, dan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam institusi pasar. Peran regulasi tentunya diorientasikan untuk

mendekatkan pada kondisi pasar yang baik sehingga tidak terjadi kegagalan pasar. Realitasnya pada pasar tradisional yang *public good* ini boleh dikatakan miskin atau sangat kurang sentuhan regulasi, bahkan yang dirasa bagi pedagang adalah pengabaian pelayanan dasar yang diperlukan para pedagang dalam pasar. Bilamana pasar Dampit sebagai pasar tradisional dikehendaki dapat berfungsi dengan baik, Kebijakan seyogyanya memberikan insentif yang memungkinkan diperlukan ketertiban yang menyangkut ketaatan, kepatuhan pada aturan dan norma pasar semua pelaku pasar termasuk pula oleh otoritas pasar..

3) Tanggapan Pemerintah Mengenai Retribusi Pasar

Retribusi pasar Dampit dikenakan pada sekitar 1.087 Pedagang resmi. Namun dinas Disperindag dan Pasar juga memungut biaya pada retribusi pada pedagang legal atau PKL seperti halnya pedagang resmi yang berjualan pada wilayah pasar Dampit. Hasil dari wawancara diketahui menurut petugas pasar khususnya adalah petugas pungut bahwa pedagang tidak sesuai dengan Perda dalam membayar dan setiap harinya masih ada pedagang yang tidak mau membayar.

Menurut beberapa petugas pasar bahwa uang retribusi diperuntukan bagi para pedagang guna untuk pembangunan pasar namun kenyataannya selama ini masih belum nampak. Pemerintah daerah juga dapat dipandang telah gagal melindungi pasar tradisional, ketika lebih terpicat perhatian dan fasilitasi perijinan dan penyediaan lahan pada berbagai pasar modern dan bermodal besar, sementara disisi lain pasar tradisional semacam pasar dampit menunjukkan kinerja ekonomi yang semakin menurun. Pemerintah bertindak menjadi pihak ketiga yang berkepentingan mendapatkan pendapatan besar atas alasan peningkatan pendapatan asli daerah(PAD). Ketika pemegang otoritas pasar menyelenggarakan pungutan pada para pedagang yang bernama “retribusi”, maka sifat daripada pungutan itu adalah bersifat timbal balik atau memenuhi hubungan *reciprocity* yaitu haruslah diimbangi dengan fungsi pelayanan yang memadai bagi kepentingan transaksi di pasar yang ini berbeda sifatnya.

Semestinya pula secara normatif dengan otonomi daerah menurut proporsinya pemerintah daerah termasuk warga masyarakat di dalamnya memiliki otoritas sendiri mengatur daerahnya dan itu mencakup pula pada aspek ekonomi di daerah yang juga menunjuk pada pasar tradisional sebagai institusi publik. Warga masyarakat termasuk pedagang tentunya memiliki hak dan kesempatan untuk menikmati fasilitas dari pemerintah (kabupaten) agar kinerja pasar dapat meningkat. Dengan ini, penataan dan pengelolaan pasar dampit ini sebagai milik publik seharusnya lebih banyak berpihak pada kepentingan publik (masyarakat), hal ini sangat penting untuk mengatasi kemunduran penyelenggaraan administrasi publik karena masyarakat umum bukan hanya menilai apa yang dilaksanakan oleh para administrator publik saja, tetapi juga apa yang tidak dilaksanakan, karena dengan adanya pasar secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

c.Substansi *Emic* Pemerintah terhadap *Sustainability* Pasar Dampit

Kristiadi (1994) memberi pengertian tentang administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian. Oleh karena itu administrasi pembangunan juga merupakan pendukung perencanaan dan implementasinya. Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu informan yang menjabat di seksi pengembangan pasar. Dari situ diketahui bahwa pemerintah selalu mengusahakan untuk pertahanan dan kemajuan pasar tradisional selalu melakukan perbaikan-perbaikan dan berinovasi untuk perubahan-perubahan lebih baik dari masalah-masalah yang ada di Pasar Dampit dan pasar Tradisional pada umumnya bahwa pedagang pasar harus diberdayakan, pemerintah memfasilitasi, kemudian di dalam melestarikan pasar tradisional dengan mengadakan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana. Dari pernyataan tersebut harus benar-benar dibuktikan agar suatu pembangunan dalam hal ini pasar Dampit bisa berjalan dengan tujuan yang telah ditentukan seperti hakekatnya dalam administrasi pembangunan .

Dengan merujuk pada dasar Keynes, yang memandang penting campur tangan pemerintah dalam perekonomian adalah untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*) akibat persaingan tidak sehat, mencegah dampak buruk, realitas empiric di lapangan kepentingan itu tidak sepenuhnya selalu tercapai, yang terjadi dapat dikatakan sebaliknya, campur tangan pemerintah kabupaten pada pasar Dampit melalui Disperindag dan Pasar mengelola pasar dengan mengatur jumlah pedagang, menangani keamanan, ketertiban, kebersihan, dan menarik retribusi justru semakin terperangkap pada pola formal yang ikut menambah permasalahan atau sebagai penyumbang kegagalan baru (*inefisiensi*) dalam pasar. Dikembalikan kepada ide dasar tentang diperlukannya campur tangan pemerintah untuk mengelola pasar Dampit, sesungguhnya adalah untuk memelihara kelangsungan mekanisme pasar agar para pelakunya dapat terkoordinasi secara baik dan benar, sehingga pasar Dampit sebagai pasar Tradisional memiliki kinerja yang efisien dan efektif, yang diantaranya adalah mengurangi ketidaksetaraan informasi dan meningkatkan kepercayaan.

Tjokroamidjojo (1995:52) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai fungsi yaitu salah satunya adalah perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Pemerintah di sini harus mempunyai program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pasar khususnya pedagang, diperlukan suatu agenda dari pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang di hadapi oleh para pedagang, bagaimanapun juga para pedagang tidak bisa bergerak tanpa ada peran dari pemerintah, yaitu sebagai stabilisator, bahwa pemerintah adalah stabilisator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program, kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.

Telah diakui oleh semua pihak pasar, pedagang, pembeli, maupun pengelola pasar. Infrastruktur yang diantaranya berkenaan dengan beban tempat usaha, keberagaman ketersediaan pelayanan, segi komparasi tempat usaha, kemudahan jangkauan, aman dari gangguan, fasilitas, kenyamanan,

kebersihan, ketertiban, dsb. Pasar Dampit sebagai ruang publik yang pada terbangun organisasi, struktur, yang Infrastruktur yang baik sangat erat kaitannya dengan suatu kinerja pasar yang baik. Ada banyak permasalahan terkait dengan infrastruktur pasar, adanya permasalahan adalah bersumber pada mengelola dan mengorganisasi bangunan pasar. Pasar Dampit sebagai pasar tradisional dapat dikatakan mengalami permasalahan yang terkait dengan masalah umum yang juga dihadapi pasar-pasar tradisional lainnya, yakni bangunan pasar yang kurang terawat, kebersihan yang tidak terpelihara dengan baik, selokan bermasalah ketika turun hujan deras, sempit karena koridor jalan terisi oleh barang dagangan atau PKL yang mangkal, gelap karena kurang penerangan, pengap karena sirkulasi udara kurang baik dan gerah. Peran Pemerintah sebagai fungsi alokasi menunjukkan pada peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan *public goods* atau dengan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan, baik secara *private* maupun *public goods* dan menentukan komposisi dari *public goods*.

Berlarutnya kondisi infrastruktur sangat berkemungkinan besar diantaranya dilatari oleh disorientasi kepentingan pengelola pasar (pemegang otoritas pasar) maupun kesenjangan kepentingan pedagang pasar, sehingga kepedulian terhadap infrastruktur pasar yang nyaman menjadi terabaikan. Orientasi kepentingan pengelola pasar boleh jadi menempatkan pasar Dampit hanya sebatas sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi petugas karyawannya sebagai sumber pendapatan jangka pendek tanpa memandang dalam perspektif lainnya yang lebih luas, yaitu mengenai *sustainability*, serta pula memaknai fungsi pasar Dampit menurut sudut pandang sepihak. Di sisi lain, pedagang juga terdapat keterbatasan dalam mempengaruhi perubahan infrastruktur pasar karena posisinya dalam pasar Dampit adalah masih banyak bukan sebagai pemilik bedak. Termasuk pula dengan adanya formalisasi terhadap masalah pemeliharaan, keamanan, kebersihan, yang ditangani oleh

petugas pasar, menjadikan upaya mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas infrastruktur pasar Dampit bukan menjadi kompetensi para pedagang.

Kinerja pasar selalu dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur pasar walaupun hubungan social yang terjadi dibangun sendiri oleh komunitas pedagang, namun ruang publik ini tidak terlepas dari intervensi pemerintah. Sebagai ruang publik pada diri pasar dengan sifatnya yang birokratis konvensional, sektor publik relatif tidak leluasa dan lambat dalam berhubungan dengan inovasi bilamana dibandingkan dengan sektor bisnis (yang melekat pada pasar modern). Kelambanan pasar sebagai ruang kepentingan publik dalam melakukan inovasi terkait erat dengan tradisi dan karakternya yang relative statis, formal, dan rigid, cenderung mempertahankan *status-quo* dan tidak responsive terhadap perubahan. Sebagai pengganggu kinerja di pasar bukan sebatas dalam konteks kelembagaan, namun pula menyangkut pada individu pelakunya, karena pada umumnya pelaku (ekonomi) yang terlibat di sektor publik hanya menjalankan tugas dan fungsinya secara apa adanya.

Pelaku pasar tradisional semacam pasar Dampit bilamana disandingkan dengan pelaku pasar modern, tentulah terdapat semacam kecenderungan yang sifatnya tidak sama. Pemerintah sebagai Selaku pelopor, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusun rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

Regulasi yang dilakukan pemerintah termasuk dalam fungsi alokasi. Fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna menjamin terpenuhinya kondisi yang adil dan merata. Fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Walaupun anggaran yang ada sedikit harus dapat di distribusikan dengan baik karena untuk kepentingan bersama demi suatu pembangunan yang disini lebih tepatnya adalah ada perubahan untuk lebih baik lagi pada Pasar Dampit .

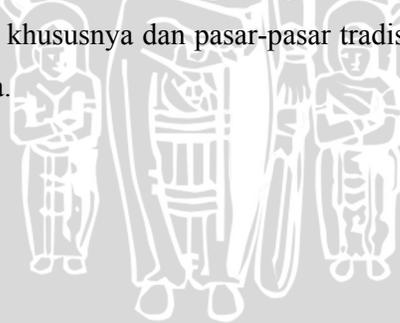
Konsep kemitraan yang diinginkan oleh pemerintah bisa membuka celah dari permasalahan yang dihadapi di dalam pasar, karena disini memang sangat diperlukan kesadaran tanggung jawab dari para dinas yang berkepentingan di dalam pasar Dampit yaitu antara Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Harus ada kejelasan mekanisme kerja, karena mekanisme dan prosedur kerja merupakan peraturan permainan yang harus ditaati dalam penyelesaian tugas lintas sektoral dan multidimensional. Karena ini menyangkut interaksi, interdependensi, dan koordinasi antar instansi di samping berlaku secara internal dalam lingkungan satu-satuan kerja.

Antara pemerintah dan para masyarakat pasar khususnya para pedagang harus bisa bekerja sama untuk memperbaiki permasalahan yang ada di dalam pasar tidak untuk menang dan kalah harus berjalan seiringan dan saling mendukung. Dan pemerintah selaku dinamisator, bahwa pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditujukan dengan sikap, tindak-tanduk, perilaku dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.

Adanya payung hukum yang dapat memberi kejelasan berlangsungnya suatu proses perubahan dan dapat memberikan kejelasan arah dari sebuah tujuan itu. Dari setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus benar-benar bisa secara keseluruhan dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan. Walaupun pemerintah mempunyai penopang berupa peraturan-peraturan yang dibuat secara kontinyu bisa lebih berjalan secara efektif dan efisien apabila sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau sesuai dengan keadaan yang ada. Pemerintah terlalu pragmatis terhadap keadaan yang sudah dihadapi bisa dikatakan kalau para otoritas publik ini masih belum ada penguatan dalam masalah hukum. Dan sudah seharusnya pemerintah selaku stabilisator, bahwa pemerintah adalah stabilisator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program, kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.

Antara *Responsiveness* dengan *effectiveness* oleh pemerintah harus diperhatikan dan diseimbangkan. *Responsiveness* yang perhatian utama ditujukan terhadap tanggapan-tanggapan masyarakat pasar. Sedangkan di pihak lain *effectiveness*, yaitu perhatian utama dari pemerintah yang berkepentingan terhadap pencapaian apa yang dikehendaki, demi suatu tujuan yang terencana.

Masalah – masalah yang dihadapi oleh para pedagang pasar Dampit apabila pemerintah mendiamkan, menyepelekan tanpa mengambil langkah antisipasi, bahkan tidak mencegah setelah terjadinya, maka pemerintah tidak bisa lari dari tuduhan sebagai cikal bakal penyebabnya. Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan atau masalah, menjadi penganjur, inovasi dengan cara terbaik dan tindakan terarah, hal ini sangat penting untuk mengatasi kemunduran penyelenggaraan administrasi publik. Adanya Raperda Kabupaten Malang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diharapkan menjadikan jalan keluar atau solusi dan sejauh mana pemerintah melakukan penanganan terhadap masalah yang ada di dalam pasar Dampit khususnya dan pasar-pasar tradisional lain di kabupaten Malang pada umumnya.



Tabel 4.1 Hasil pengolahan data
Stakeholders Masyarakat Pasar

KATEGORI	SUMBER DATA	EMIC	REKAPITULASI
Keberadaan Pasar Dampit	1. Pak Herman 2. Pak Amin 3. Pak Abdul 4. Bu Paimah 5. Arif	1. sumber penghasilan, membantu keadaan ekonomi 2. lapangan pekerjaan, tercipta kekeluargaan (guyub) 3. tempatusaha, perjuangan hidup. 4. pusat perbelanjaan 5. sumber penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan banyak arti yang kompleks bagi kehidupan - Banyak masyarakat Dampit yang menggantungkan hidupnya pada Pasar Dampit - Pasar Dampit menjadi perjuangan kelangsungan hidup banyak keluarga - Pasar Dampit satu-satunya pasar yang ada di desa Dampit - Tempat usaha yang menjanjikan bagi sumber penghidupan masyarakat pasar Dampit. - Dalam Pasar Dampit menciptakan kekeluargaan, masyarakat pasar yang <i>guyub</i>.
Kebersihan	1. Bu Sri 2. Bu. Paimah 3. Bu. Misnah 4. Bedak Sahabat 5. Bedak Ojo Dumeh	1. kebersihan kurang, sampah berserakan, pasar kumuh 2. Pasar kotor dan bau. 3. petugas pasar tidak peka, pengunjung pasar membuang sampah tidak pada tempatnya	<ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan dalam Pasar Dampit kurang terjaga - Banyak masyarakat pasar yang masih belum sadar terhadap kebersihan - Pasar Dampit merupakan pasar kumuh karena sampah tersebar dimana-mana

		<p>4. pasar kumuh, sampah selalu telat di angkut, minimnya petugas kebersihan</p> <p>5. petugas pasar kurang tanggap, sampah menumpuk di selokan dan di TPA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ketika musim hujan menebarkan aroma yang tidak sedap dan becek, karena selokan tersumbat oleh sampah - Para pedagang membayar karcis kebersihan - Minimnya petugas kebersihan di pasar Dampit dalam penanganan kebersihan - Kurang tanggapnya petugas pasar dalam menangani masalah kebersihan sehingga menyebabkan pasar kotor dan kumuh.
<p>Keamanan</p>	<p>1. Bu Suharmi</p> <p>2. Pak Parjo</p> <p>3. Bedak Barokah</p> <p>4. Pak Parno</p>	<p>1. Keamanan menurun, petugas tidak pernah memantau</p> <p>2. tidak aman, banyak yang kehilangan, membayar keamanan setiap bulan.</p> <p>3. respon petugas tidak maksimal</p> <p>4. pasar rame rawan dengan pencopet, kalau siang kurang penjagaan keamanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rentan terhadap pencopet - Pencopetan adalah salah satu masalah keamanan yang berada di Pasar Dampit - pedagang membayar rutin kepada petugas pasar uang keamanan. - Kurangnya pemantauan dari petugas Pasar. - ketika siang juga diperlukan penjaga keamanan agar para pengunjung nyaman berada di Pasar Dampit

			- Peran dari aparaturnya masih belum kelihatan ketika ada masalah di dalam pasar.
Ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bu. Paimah 2. Pak Parlan 3. Bu Fatma 4. Pak Parjo 5. Bu. Ari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. masalah tidak tertib adalah PKL, pasar menjadi morat-marit. 2. jalan sempit karena PKL, pemandangan pasar menjadi kumuh, keluhan tidak didengarkan oleh petugas. 3. pemerintah hanya diam 4. kelemahan pasar adalah penataan PKL, pasar tidak rapi, belum ada ketegasan dari petugas. 5. pedagang mengeluarkan barangnya jalan menjadi sempit 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber dari ketidaktertiban dalam Pasar Dampit adalah para PKL - Pasar Dampit menjadi tidak tertata karena PKL sangat mengganggu penataan pasar Dampit. -Pasar Dampit menjadi morat marit tidak jelas pasar menghadap kemana, bagian depan yang mana dan belakang yang mana. - keluhan dari para pedagang tidak di dengarkan oleh para petugas - Pasar tidak tertib karena para pedagang mengeluarkan barang-barangnya sampai keluar toko/bedak -Petugas pasar tidak tegas dalam menangani para PKL.
Retribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toko Adinda 2. Bedak Ojo Dumeh 3. Toko Sido Dadi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. kewajiban berupa iuran, sarana dan prsarana masih perlu dibenahi 2. retribusi untuk pembenahan pasar. 3. pajak pedagang, ditargetkan setiap 	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi adalah kewajiban berupa iuran yang harus dipenuhi - Retribusi merupakan pajak pedagang menempati bedak-bedak di pasar - Pembayaran retribusi harus disertai dengan hak-hak

		harinya.	<p>pelayanan yang harus diterima oleh para pedagang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi sebaiknya untuk pembenahahn atau perbaikan infrastruktur di dalam pasar Dampit.
<p><i>Sustainability</i> Pasar Dampit</p>	<p>1. Pak Parno 2. Pak Parjo 3. Pak Ponidi</p>	<p>1. perkembangan pasar semakin tahun semakin menurun, banyak toko modern, pemerintah lebih memperhatikan pasar Dampit. 2. Fasilitas masih belum ada, infrastruktur pasar banyak yang rusak 3. pasar belum pernah direnovasi, himpunan pedagang masih semu, komunikasi dengan petugas kurang, toko modern agar dibatasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan Pasar Dampit semakin tahun semakin menurun - Banyak pasar modern yang muncul di luar seperti indomaret dan alfamert perlu dibatasi keberadaannya. - Fasilitas Pasar Dampit masih belum ada dari pemerintah, infrastruktur yang ada perlu diperbaiki lagi. - sejak awal Pasar Dampit ini berdiri masih belum ada renovasi - Pasar Dampit lebih diperhatikan keberadaannya tidak hanya dipungut saja. - perlu ada komunikasi antara pemerintah dengan pedagang dalam mengatasi permasalahan yang ada di pasar.

Stakeholders Pemerintah

KATEGORI	SUMBER DATA	EMIC	REKAPITULASI
Keberadaan Pasar Dampit	1. Kepala UPPD Dampit 2. Sie Pengembangan pasar 3. Pegawai Pasar Dampit	1. tempat jual beli, menumbuhkan perekonomian rakyat. 2. denyut nadi perekonomian masyarakat. 3. Pasar kelas 1, kesadaran pedagang kurang.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar Dampit berpotensi untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat - Pasar Dampit sebagai pusat distribusi hasil pertanian masyarakat Dampit dan sekitarnya. - Pasar Dampit merupakan Pasar Tradisional kelas I yang mempunyai wilayah cukup luas - Pasar Dampit denyut nadi perekonomian masyarakat pasar, keberadaannya harus selalu dikembangkan - Pasar Dampit sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah
Kebersihan	1. Pegawai Pasar Dampit	1. kebersihan selalu menjadi masalah, perlu kesadaran dari pribadi masing-masing, kalau hujan selalu banjir, tanggung jawab hanya sampai TPS, berupaya untuk selalu menjaga kebersihan.	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas kebersihan selalu menjalankan tugasnya secara rutin. - Perlu kesadaran dari semua pihak yang ada di pasar Dampit - Koordinasi antara petugas pasar dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang masih kurang.
Ketertiban Pasar Dampit	1. Petugas Pasar	1. ketertiban di pasar Dampit masih	- Masalah utama di pasar Dampit adalah PKL

	<p>Dampit</p> <p>2. Staf</p> <p>3. Juru Pungut</p>	<p>kurang, fasilitas umum digunakan berjualan, parapedagang nekat-nekat.</p> <p>2. sudah berusaha dalam menangani PKL</p> <p>3. Masalah terlalu kompleks, para PKL membayar retribusi.</p>	<p>-Fasilitas umum digunakan oleh para PKL untuk berjualan</p> <p>-Upaya penertiban selalu dilakukan tetapi para PKL banyak yang melanggar</p> <p>- Para PKL tetap dikenakan retribusi karena berjualan masih di area pasar Dampit</p>
Retribusi	<p>1.Pak Hadi</p> <p>2.Ibu Yanti</p> <p>3. Pak Arya</p>	<p>1. Harus selalu memenuhi target</p> <p>2.pemungutan dilakukan oleh juru pungut menggunakan karcis, pedagang membayar tidak sesuai dengan Perda</p> <p>3. uang retribusi disetor setiap hari</p>	<p>- Tarif retribusi berdasarkan Perda yang berlaku.</p> <p>- Bukti pembayarannya berupa karcis.</p> <p>- Dari sekian banyaknya para pedagang membayar tidak sesuai dengan Perda yang diberlakukan.</p> <p>- Setiap harinya harus setor sesuai dengan target yang ditentukan kepada Dinas.</p>
Sustainability Pasar Dampit	<p>1.Pak Hadi</p> <p>2.Pak Hari</p> <p>3.Komisi A DPRD Kab.Malang</p>	<p>1.Beban moral kepada para pedagang</p> <p>2. Pasar harus diberdayakan, pemeliharaan pasar Dampit harus ditingkatkan, melakukan</p>	<p>- Pedagang Pasar diberdayakan, pemerintah memfasilitasi</p> <p>- Melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa dinas terkait di dalam pasar Dampit (Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan)</p>

		<p>kemitraan.</p> <p>3. membuat perda, keterbatasan dana, jumlah pasar tradisional di kabupaten Malang ada 39, <i>culture</i> sangat mempengaruhi.</p>	<p>- Mempunyai keinginan dan terus beruang mempertahankan eksistensi pasar Tradisional termasuk Pasar Dampit</p> <p>- Perlu ada kerjasama dengan pedagang untuk membangun Pasar Dampit sesuai dengan visi dan misi</p> <p>- Keterbatasan dana untuk memberdayakan pasar</p> <p>- Membuat Raperda untuk menyelamatkan pasar tradisional.</p>
--	--	--	---

D. Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Reformasi Administrasi Pembangunan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di Pasar Dampit yang sudah peneliti uraikan sebelumnya di atas dilihat dari beberapa masalah yang ada, di Pasar Dampit diperlukan suatu reformasi administrasi pembangunan yang mencakup beberapa sasaran pembangunan yaitu ;

1. Pengembangan Kelembagaan

Dalam keberlangsungan kegiatan di Pasar Dampit tidak hanya melihat dari faktor ekonomi saja tetapi juga tidak mengabaikan pranata-pranata dan sikap serta pengaruh terhadap produktivitas kerja agar eksistensi dari Pasar Dampit terus berkembang. Kelembagaan sebagai objek yang dinilai penting dalam penelitian ini, karena untuk memahami bahwa semua yang ada di dalam pasar Dampit ini sebagai sebuah lembaga. Untuk mengkaji peran kelembagaan dalam pasar Dampit ini maka persoalan pokok yang perlu diketahui adalah mendalami fungsi kelembagaan yang bekerja di dalam pasar.

Dalam Pasar Dampit terdapat beberapa kelembagaan yaitu, pemerintah, pasar, dan komunitas pasar (masyarakat pasar). Ada pranata, kebiasaan-kebiasaan yang harus ditaati mereka dan kebiasaan itu akan menjadi rutinitas didasarkan pada suatu kesepakatan bersama. Bisa diartikan juga sebagai organisasi atau kaidah baik formal maupun informal, yang mengatur perilaku dan tindakan dalam pasar Dampit baik dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam Pasar Dampit masih tidak ada aspek kelembagaan yang kuat, yaitu pemerintah dan masyarakat, juga tidak terdapat komunitas yang bisa mendukung kemajuan pasar. Jika pasar mewakili kelembagaan ekonomi, maka pemerintah mewakili politik, sedangkan komunitas (masyarakat) mewakili sosial. Masing-masing perlu menjalankan peran yang ideal. Disini perkembangan maupun kemunduran pasar dipengaruhi dan mempengaruhi kekuatan pemerintah maupun komunitas (masyarakat). Maka fungsi pemerintah sebagai kelembagaan dapat menjadi pengatur jalannya kedua kelembagaan, yaitu komunitas dan pasar. Secara proporsional pemerintah diperlukan peran sehingga kedua kelembagaan tersebut dapat berjalan dengan ideal. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab dalam mengkonstruksikan tata hubungan yang antar ketiganya secara sinergis. Bentuk implementasinya, pemerintah secara luwes dapat bertindak diantara kecenderungan -kecenderungan peran diantara sebagai katalisator atau fasilitator, dan regulator.

Persoalan-persoalan yang ada di dalam Pasar Dampit berkaitan dengan kebersihan, keamanan, dan ketertiban akan berjalan dengan sendirinya, walaupun tidak harus melalui keputusan formal. Dari masyarakat pasar dan pemerintah membuat kesepakatan bersama dalam membentuk peraturan yang memudahkan koordinasi dalam membentuk harapan masing-masing yang mungkin dapat dicapai dengan saling bekerja sama. Tidak harus formal, apa yang cocok dengan kemampuan mereka itu yang harus dipertahankan. Jadi pada dasarnya adalah

kesepakatan bersama tetapi perlu ditata (siapa melakukan kegiatan apa, siapa bertanggung jawab kepada siapa). Jadi disini tidak semua diserahkan dan dilakukan oleh pemerintah saja tetapi dibagi antara pemerintah dan masyarakat pasar yang nantinya keduanya akan merasa sama-sama bertanggung jawab dengan Pasar Dampit

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber yang paling penting dan yang paling strategis di dalam suatu organisasi. Pentingnya sumber daya manusia juga terlihat dari kenyataan bahwa karena manusia mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh sumber daya lain. Seorang pimpinan dalam menjalankan dan mengemudikan roda organisasi sangat tergantung pada kemampuan untuk mengenali dan mengarahkan para bawahannya sehingga mampu bekerja secara efisien, efektif, dan produktif. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengembangan sumber daya manusia harus dijadikan sebagai salah satu sasaran pokok dalam pembangunan administrasi.

Dalam pasar Dampit sumber daya dari pemerintah maupun dari masyarakat harus dikembangkan. Selama ini yang ada di dalam Pasar Dampit adanya kewenangan dari pemerintah dan masyarakat harus mentaati. Petugas pasar mindsetnya masih kaku oleh karena itu ada kekhawatiran mengeksploitasi masih muncul. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia sangat penting keduanya antara pemerintah dan masyarakat pasar harus berjalan bersama. Masyarakat pasar jangan hanya menggantungkan kepada pemerintah karena pemerintah jugas terbatas.

3. Pengembangan kemampuan (*capacity building*)

Dikaitkan dengan transparansi, keterbukaan, orientasi pelayanan, perubahan tuntutan masyarakat serta kesediaan menerima perubahan dengan segala implikasinya menuntut aparat pemerintah untuk meningkatkan segala pengetahuan dan keterampilannya. Para petugas

pasar dapat mengikuti pelatihan-pelatihan agar produktivitas kerja semakin tinggi dan memberikan motivasi kepada para petugas pasar. Harapan kedepannya para petugas pasar akan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengelola pasar.

Pada prinsipnya antara pemerintah dan masyarakat pasar saling belajar, kalau ada masalah harus duduk bersama-sama tidak membebani satu sama lain dan bergerak ke arah tujuan yang lebih baik demi tercapainya keinginan bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk mengembangkan Pasar Dampit. Jadi ada korelasi antara masyarakat pasar dan pemerintah dalam mengatasi masalah yang ada di dalam Pasar Dampit.

E. Pembahasan *Emic* menuju *Ethic*

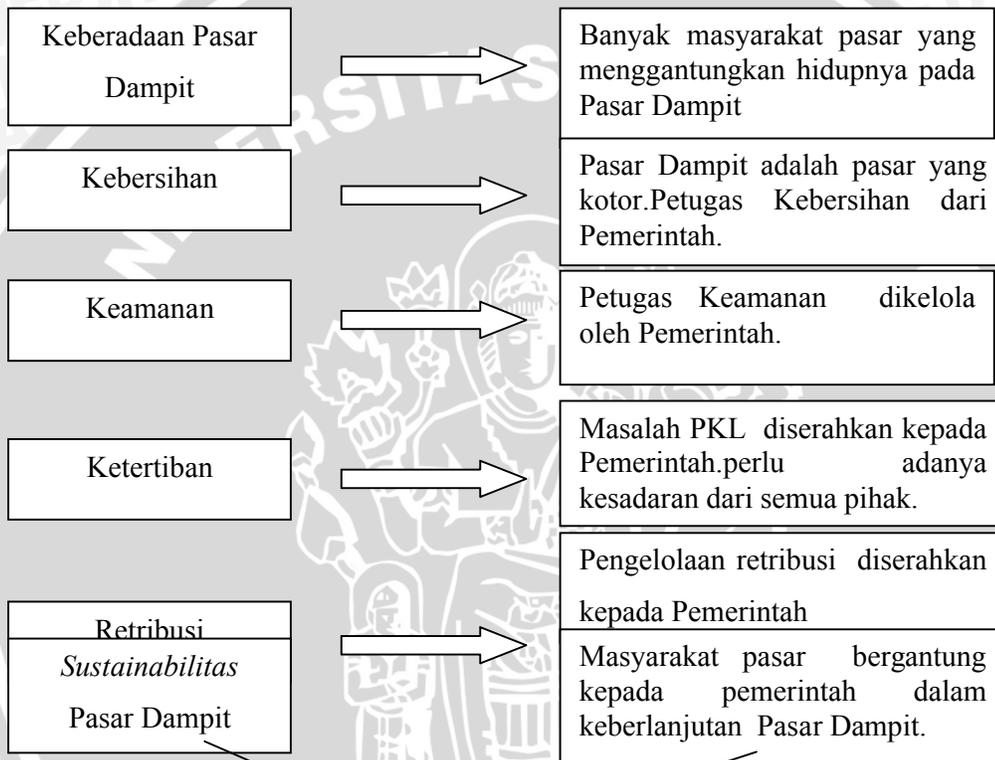
Dari hasil penelitian yang sudah peneliti uraikan di atas terlihat bahwa terdapat masalah yang sangat kompleks yang terjadi di pasar Dampit. Seperti yang sudah peneliti gambarkan dalam tabel, banyak masyarakat pasar yang tanggap terhadap kondisi Pasar Dampit. Peran pemerintah yang masih belum nampak, disini otoritas publik masih belum tegas dalam mengambil keputusan untuk kelangsungan Pasar Dampit agar lebih berkembang lagi. Peran pemerintah sebagai fasilitator masih belum nampak, karena kondisi fisik bangunan dan infrastruktur di Pasar Dampit masih belum tertata.

Pemerintah sudah memungut pasar dengan retribusi seharusnya ada timbal balik yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat pasar, jangan hanya memungut tetapi tidak memberikan kontribusi sama sekali kepada Pasar Dampit. Seharusnya dikembalikan lagi kepada pasar untuk kepentingan pembangunan atau fasilitasi, karena pasar adalah salah satu asset publik yang harus dilindungi. Dengan adanya pasar, secara tidak langsung menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya masyarakat warga Dampit.

Dalam masalah- masalah yang dihadapi oleh para masyarakat pasar seperti kebersihan, ketertiban, keamanan, dan lain sebagainya diserahkan kepada

pemerintah. Pengelolaan kebersihan ditangani oleh kelompok kebersihan yang berasal dari pihak pemerintah. Masalah keamanan pemerintah menunjuk seseorang untuk menjadi *security*. Semua urusan yang ada di Pasar Dampit dikelola oleh Pemerintah. Oleh karena itu tanggung jawab pemerintah sangat besar sekali dalam penataan Pasar Dampit. Seperti pada gambar di bawah ini :

STAKEHOLDERS MASYARAKAT PASAR



Semua Urusan yang ada di Pasar Dampit oleh masyarakat pasar diserahkan kepada Pemerintah. Masyarakat pasar Dampit masih bergantung pada pemerintah.

Ketika masyarakat Pasar Dampit menyerahkan semuanya kepada pemerintah. Maka pemerintah akan merasa bahwa masyarakat pasar hanya bergantung pada mereka, ketika pemerintah beranggapan seperti itu dikhawatirkan nantinya pemerintah akan mengeksploitasi. Seyogyanya masyarakat pasar harus menggunakan penetapan, bahwa tetap diserahkan semua kepada pemerintah tetapi masyarakat harus tetap dilibatkan dalam pengambilan keputusan (tembung atau musyawarah) Reformasi administrasi nembanounan

Pedagang adalah sebuah komunitas yang membutuhkan media fisik berupa pasar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan masalah kebersihan, keamanan, dan ketertiban diserahkan kepada petugas pasar. Masyarakat pasar Dampit masih tergantung pada pemerintah, mereka tidak sanggup mengelola pasar sendiri. Jadi setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pasar selalu diserahkan kepada pemerintah. Masyarakat sebenarnya masih belum siap dengan *market* karena masih bergantung pada pemerintah. Masyarakat pasar Dampit banyak keinginan tetapi masih belum siap untuk mengelola. Jadi Pasar tetap milik Pemerintah sama dengan kehendak pemerintah bahwa pasar sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah .Oleh karena itu :

- Pemerintah harus mampu mensubsidi Pasar Dampit
- Pemerintah harus mampu memberdayakan Pasar Dampit
- Pemerintah harus mampu mengelola dan melindungi Pasar Dampit
- Pemerintah bagaimana mencari solusi dari masalah yang ada di Pasar Dampit
- Harus ada sinergi diantara keduanya yaitu *stakeholders* pasar dan *stakeholders* pemerintah.

2. Pasar Dampit dipegang oleh *market*

Pedagang mempunyai kesadaran kritis tentang pentingnya kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Namun bentuk respon yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut bersifat individual. Sebenarnya masyarakat Pasar Dampit mempunyai kemampuan untuk mengelola pasar sendiri tetapi mereka harus mempersiapkan :

- Kelembagaan yang kuat dan terorganisir
- Adanya swakelola pasar dalam bentuk Koperasi
- Peraturan yang dibuat oleh masyarakat pasar

Ketika Pasar Dampit dikelola oleh masyarakat pasar (*market*) sendiri. Pemerintah harus mendukung dengan memfasilitasi Pasar Dampit dan diserahkan semuanya kepada masyarakat Pasar Dampit karena Pasar adalah aset publik. Dengan adanya Pasar secara tidak langsung bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tanggung jawab pemerintah salah satunya adalah membuat masyarakat hidup lebih sejahtera. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk lebih kreatif mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi pemerintah tidak hanya memungut tetapi memberikan kontribusi kepada masyarakat pasar (*market*).

3. Pasar Dampit dipegang oleh *market* dan *government*

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan bahwa pemerintah memiliki dana yang minim untuk pembangunan. Hal ini merupakan kekurangan dari pemerintah dengan minimnya dana kalau pasar Dampit dipegang oleh pemerintah. Masyarakat pasar dengan kelembagaan yang kurang terorganisir juga masih belum mampu untuk mengelola Pasar Dampit. Dalam pengelolaan pasar Dampit bisa melakukan kerjasama dari pihak pemerintah dan masyarakat pasar, karena keduanya sama-sama mempunyai kepentingan. Pasar adalah tempat masyarakat pasar mendapatkan pekerjaan serta penghasilan dan pemerintah menganggap pasar sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah.

Selama ini petugas pasar mindset berpikirnya masih kaku, pemerintah mempunyai kewenangan dan masyarakat pasar harus mentaati. Dari sini ada kekhawatiran pemerintah mengeksploitasi pasar. Sebaiknya dalam mengatasi masalah untuk mendapatkan sebuah solusi, pihak pemerintah dan *market* bisa bermusyawarah. Jadi tidak semua masalah diserahkan kepada pemerintah saja. Hal ini sesuai dengan konsep *good governance* yang harus dipegang oleh pemerintah, contohnya : ketika membicarakan masalah keamanan, bisa mengambil beberapa orang untuk mencari solusi, bisa saja mengambil salah satu dari masyarakat pasar yang dipercaya untuk menjadi petugas keamanan. Masalah kebersihan ada kesepakatan bersama-sama dari pihak masyarakat pasar dan pemerintah

dalam mengatasi kebersihan. Para pedagang bertanggung jawab pada bedaknya masing-masing dalam menjaga kebersihan, dan Dari sini pemerintah dan masyarakat pasar berjalan bersama-sama mengatasi masalah yang ada di Pasar Dampit. Jadi ada timbal balik antara pemerintah dan masyarakat untuk saling mempertahankan dan memajukan Pasar Dampit.

Untuk mewujudkan reformasi pembangunan di Pasar dari segi sumber daya perlu ditingkatkan dan perlu adanya pematapan diantara aspek kelembagaan yaitu pemerintah dan pasar. Harus ada kesadaran dari setiap pihak baik itu pemerintah ataupun masyarakat. Pemerintah harus mempunyai manajemen yang kuat, diantaranya *public planning*, *public actuating*, *public controlling*, *public coordinating*, dan *public leading*.



BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir penulisan ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai hasil penelitian dan pembahasan di bab IV dan V .

A. KESIMPULAN

1. a. Kondisi Pasar Dampit masih belum begitu baik, hal tersebut bisa dilihat dari kondisi pasar yang terkesan kotor, kurang tertata dengan baik. Selain hal itu sarana dan prasarana yang dimiliki pasar Dampit kurang begitu memadai sehingga masih perlu pembenahan dan perbaikan.
- b. Pasar Dampit merupakan instrumen pendapatan ekonomi local dengan berbagai jenis potensi. Pasar Dampit memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat pasar Dampit (pedagang, pembeli, dan lain sebagainya). *Sustainability* Pasar dampit memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat pasar karena sebagian masyarakat pasar Dampit menggantungkan dan menaruh hidupnya pada pasar. Banyak nilai-nilai budaya dan nilai moral yang terbangun dalam pasar Dampit.
- c. Masalah kebersihan, keamanan, ketertiban, dan retribusi dikelola oleh pemerintah. Dalam pasar Dampit pedagang memiliki kesadaran kritis tentang pentingnya kebersihan, keamanan, ketertiban, dan lain sebagainya, yang indikator itu menunjukkan hal itu cukup banyak ditemukan dalam meresponnya, namun bentuk respon yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut lebih tepat dikatakan bersifat individual.

d. Pasar Dampit sangat membantu dalam penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran masyarakat sekitar. Dengan adanya pasar, pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya dalam menyediakan kesempatan kerja bagi warganya serta membuka pasar bagi produk-produk ekonomi yang dikerjakan warganya. Pasar Dampit menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri.

2. a. Pengelola pasar kurang memiliki perencanaan dan konsep pengembangan pasar Dampit. Lebih jauh lagi, karena tidak memahami tugas pokok tentang misi pasar tradisional (pasar Dampit) secara semestinya, maka pengelola pasar bertindak yang tidak sejalan dengan norma serta aturan pasar Dampit yang harus dipelihara dan seharusnya dikawal dengan sebaik-baiknya. Pemerintah memiliki mindset yang kurang tepat atau keliru terhadap pengelolaan pasar Dampit.
- b. Peran pemerintah sebagai kendali utama dalam penentuan berbagai kebijakan ekonomi masyarakat khususnya *public goods* menyebabkan ekonomi rakyat menjadi terpinggirkan akibat kekurangpekaan dalam memahami problema dan kepentingan pedagang pasar yang sesungguhnya.
- c. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dalam otonomi daerah yang sekarang ini tidak memiliki kebijakan yang memberikan tempat bagi kemajuan pasar tradisional secara konsepsional.

- d. Kelembagaan di pasar Dampit tidak optimal, dalam praktek pelaksanaannya kedua kelembagaan yang ada (pasar dan pemerintah) yang satu sama lain disamping memiliki celah kekurangan pada masing-masing, juga tidak terjadi sinergi produktif ke arah kinerja lebih kreatif dan maju.
- e. Pasar Dampit lebih kepada pemerintah, masyarakat pasar menyerahkan semuanya kepada pemerintah dalam pengurusan semua aspek. Walaupun dibebankan kepada pemerintah dibandingkan dengan PAD masih seimbang.

B. SARAN

1. a. Semakin berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko modern , maka pasar Dampit (pasar tradisional) perlu dilindungi dan diberdayakan agar dapat tumbuh serta berkembang secara serasi, sinergi dan bersaing sehat. Serta dilakukan pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern karena selama ini potensi ekonomi terbesar di desa Dampit salah satunya adalah pasar Dampit seharusnya pemerintah mampu memberikan perhatian lebih terhadap pasar.
- b. Sejalan dengan berkembangnya daerah dan meningkatnya aktivitas perdagangan masyarakat serta untuk mengoptimalkan fungsi pasar Dampit (pasar tradisional) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan, diperlukan pasar yang

aman,nyaman, dan tertib karena banyak masyarakat desa Dampit yang menaruh harapan hidupnya di pasar Dampit. Bukan hanya keberadaannya saja yang harus dipertahankan, melainkan kearifan lokal budaya harus tetap dijaga.

c. Komunitas pedagang sangat diperlukan karena menjadi payung pelindung bagi tiap pedagang terhadap berbagai hal yang menyangkut fasilitas dukungan dan bantuan terkait dengan persoalan yang tidak dapat diatasinya sendiri.

d. Masyarakat pasar sebaiknya tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, ada beberapa masalah yang ada di dalam pasar Dampit dapat dikelola oleh masyarakat pasar karena jika diserahkan kepada pemerintah ditakutkan pemerintah mengeksploitasi. Masyarakat harus menyiapkan misalnya; kelembagaan yang kuat dan terorganisir, swakelola pasar dalam bentuk koperasi, peraturan yang dibuat bersama-sama dalam kesepakatan masyarakat pasar.

2. a. Sebaiknya, perekonomian publik yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak seperti pasar Tradisional menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat. Pengelolaannya telah menyimpang sebagai akibat dari diabaikannya watak pasar tradisional sebagai *public good* yang bersifat kerakyatan.

b. Mengharapkan kinerja ekonomi pasar menjadi sehat tidak cukup dengan merenovasi bangunan fisik pasar. Institusi memerlukan aturan formal yang memadai dan dipatuhi. Perlu ada reformasi administrasi

pembangunan di pasar yang sasarannya adalah pengembangan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan kemampuan (*capacity building*) dari pemerintah dan pihak masyarakat pasar agar bersama-sama dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

- c. Pengelola pasar memiliki keharusan menjalankan secara baik kewajiban dan tanggung jawabnya mengatur ketertiban, kebersihan, kenyamanan, dan memelihara keamanan pasar. Sebaiknya dalam mengatasi masalah untuk mendapatkan sebuah solusi, pihak pemerintah dan *market* bisa bermusyawarah. Jadi tidak semua masalah diserahkan kepada pemerintah saja. Hal ini sesuai dengan konsep *good governance* yang harus dipegang oleh pemerintah
- d. Pemerintah sebagai regulator , arah kebijakan yang semestinya adalah wajib memelihara kelancaran distribusi perdagangan, membuat aturan hukum yang dapat melindungi kelangsungan pasar dengan baik demi kesejahteraan masyarakat maupun memberikan pelayanan publik yang terkait dengan pasar tradisional khususnya pasar Dampit secara adil, melakukan pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam institusi pasar.
- e. Mengharapkan agar pengelola Pasar Dampit dapat memperbaiki kinerja secara proporsional, memfasilitasi dan memberikan pelayanan secara semestinya sehingga mendukung (atau sekurang-kurangnya tidak menghambat) pedagang dalam mewujudkan suatu harapan. Maka pilihan yang paling realistis adalah mendorong pelaku utama pasar itu sendiri,

yaitu pedagang pasar yang harus mengambil peran lebih kreatif dan inovatif.

- f. Mengharap agar pengelola pasar Dampit dapat berbuat lebih banyak agar pasar Dampit dapat memperbaiki kinerja secara proporsional, karena masyarakat pasar mengandalkan pemerintah. Walaupun masyarakat pasar menyerahkan semua kepada pemerintah. Pemerintah seyogyanya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemerintah harus tetap memperhatikan pasar dari segala aspek. Pemerintah memfasilitasi dan memberikan pelayanan secara semestinya sehingga mendukung keberlanjutan pasar Dampit. Jadi ada timbal balik antara pemerintah dan masyarakat untuk saling mempertahankan dan memajukan Pasar Dampit.
- g. Pemerintah perlu mengambil langkah tindakan yang mendorong pasar Dampit bekerja lebih baik, serta mengoreksi kegagalan pasar dan lebih baik lagi dapat menjadi katalisator mekanisme pasar menjadi lebih efektif. Tindakan pemerintah sebagai regulator juga diperlukan untuk dapat mengatasi masalah yang dialami oleh para pelaku pasar.
- h. Untuk mewujudkan reformasi pembangunan di Pasar dari segi sumber daya perlu ditingkatkan dan perlu adanya pemantapan diantara aspek kelembagaan yaitu pemerintah dan pasar. Harus ada kesadaran dari setiap pihak baik itu pemerintah ataupun masyarakat. Pemerintah harus mempunyai manajemen yang kuat, diantaranya *public planning*, *public actuating*, *public controlling*, *public coordinating*, dan *public leading*.

DAFTAR PUSTAKA

- 2010. *Kabupaten Malang Dalam Angka*. Malang: Badan Pusat Statistik
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Cetakan Kesembilan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Budiyanto. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta : Erlangga.
- Chairun, Nasirin. 2004. *Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta : UI Press
- Fukuyama, Francis. 2005. *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Hamzah, Fahri. 2007. *Negara, BUMN, dan Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta. Yayasan Paham Indonesia.
- Kristiadi, J.B. *Perspektif Administrasi Publik Menghadapi Tantangan abad 21*. Jurnal Administrasi dan Pembangunan, edisi khusus, volume I no.2, 1997.
- Leksono, Sonny. 2009. *Runtuhnya Modal Sosial, Pasar Tradisional*. Malang: CV. Citra Malang.
- Mas'ood, Mohtar. 2003. *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Media Group.
- Miftah Thoha. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Milles dan Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif (Terjemahan)*. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Muluk, Khoirul M R. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Malang : Bayumedia.

_____. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Surabaya: ITS Press.

Rahardjo, Dawam M. *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya

Siagian P .Sondang .1982. *Administrasi Pembangunan* : Konsep, dimensi, dan strateginya. Jakarta : Gunung Agung.

_____. 1984. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta : Gunung Agung.

Soeprapto, Riyadi. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Malang : UM Press.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Sukirno, Sadorno. 2007. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan)*. Jakarta : Kencana Prenada.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang (UM Press)

Sudarman, Ari. 1992. *Teori Ekonomi Mikro Edisi Ketiga*. Yogyakarta : BPF

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta

Tjokroamidjojo, Bintoro, dkk.1985. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.

Tjokroamidjojo, Bintoro, dkk. 1987. *Materi Pokok Administrasi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES.

Tjokroamidjojo, Bintoro, Mustapadjaya. 1980. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.

Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Propinsi Jawa Timur.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum

Internet

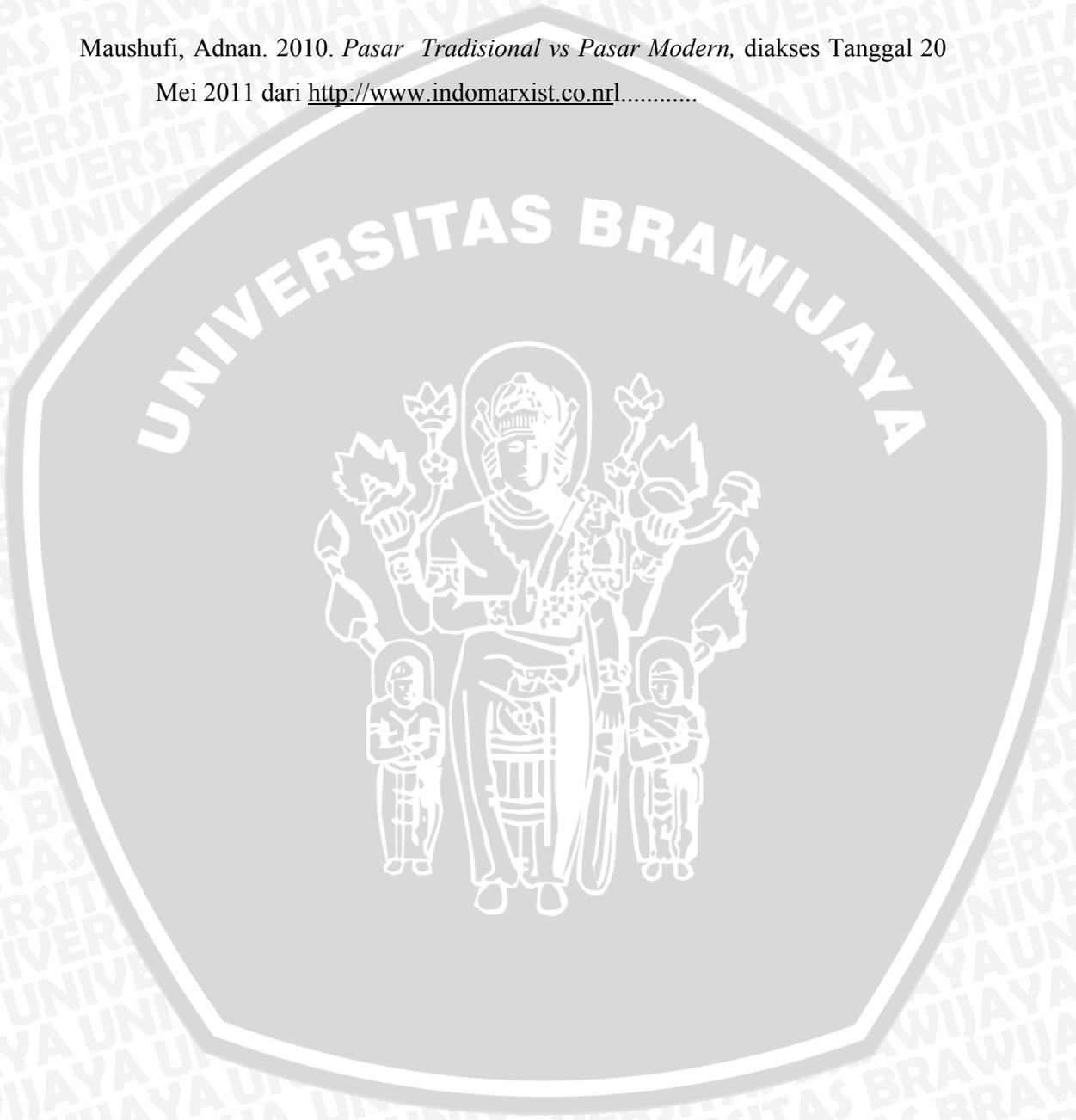
Anonymous. 2008. Pasar Tradisional, diakses pada Tanggal 20 Mei 2011 dari <http://en.wikipedia.org//.....>

Feriyanto, Nur.2007. *Menyoroti Pasar Tradisional*, diakses pada Tanggal 12 September 2011 dari <http://www.serulink.com/mail.php>

Ferriati, Dwi.2008. *Pasar Tradisional vs Pasar Modern*, diakses pada Tanggal 12 September 2011 dari <http://www.indomarxist.co.nr/>

Halim, Alif.2009. *Cara Menang Pasar Tradisional dari Ritel Modern*, diakses pada Tanggal 20 Mei 2011 dari <http://www.indocashregister.com>

Maushufi, Adnan. 2010. *Pasar Tradisional vs Pasar Modern*, diakses Tanggal 20 Mei 2011 dari <http://www.indomarxist.co.nrl>.....



CURRICULUM VITAE

Nama : Heda Swandaning Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 0810310246
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 25 Agustus 1990
Pendidikan : 1. SD Negeri 02 Sedayu-Turen Tamat Tahun 2002
2. SMP Negeri 1 Turen Tamat Tahun 2005
3. SMA Negeri 1 Turen Tamat Tahun 2008
Alamat : Jl. Salak 1 No. 22 Turen-Malang
Email : heda_fia08@yahoo.com



PEDOMAN WAWANCARA

1. Stakeholders Masyarakat Pasar
 - a. Alasan para pedagang memilih berjualan di Pasar Dampit
 - b. Kondisi kebersihan, keamanan, dan Ketertiban pasar Dampit.
 - c. Masalah retribusi pasar berkaitan dengan pembangunan pasar.
 - d. Tanggapan masyarakat pasar mengenai PKL.
 - e. Tanggapan masyarakat pasar mengenai infrastruktur Pasar Dampit.
 - f. Tanggapan masyarakat pasar mengenai kinerja dan kebijakan petugas pemegang otoritas dalam pengelolaan pasar Dampit.
 - g. Keinginan masyarakat pasar dengan keberlanjutan Pasar Dampit.
2. Stakeholders Pemerintah
 - a. Tanggapan pemerintah terhadap keberadaan Pasar Dampit.
 - b. Tugas petugas pasar dalam mengelola pasar Dampit terkait juga dengan masalah kebersihan, keamanan, dan ketertiban Pasar Dampit.
 - c. Solusi yang diberikan terhadap masalah-masalah yang ada di Pasar Dampit.
 - d. Kontribusi yang diberikan kepada Pasar Dampit terkait dengan pembayaran retribusi.
 - e. Tanggapan pemerintah terhadap keberlanjutan Pasar Dampit.

LAMPIRAN
GAMBAR KONDISI PASAR DAMPIT



Jalan Unit I (Sebelah Barat)



Jalan Unit I (Sebelah Timur)





Jalan Unit I (Akses Ke Sub Terminal Pujiharjo)



Jalan Unit III (Sebelah Timur)



Jalan Unit III (Tengah Pasar Pisang)



Jalan Tengah Unit III



Jalan Tengah Unit III



Tempat Pembuangan Akhir



Atap Rusak (Unit I)



Atap Rusak (Unit II)